

Timbulnya sosiologi pendidikan dapat gambarkan; masyarakat mengalami perubahan sangat cepat, progresif, dan kerap kali menunjukkan gejala “desintegrasi” (berkurangnya kesetiaan terhadap nilai-nilai umum). Perubahan sosial yang cepat ini sering menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti itu juga dialami dunia pendidikan, sehingga lembaga-lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya. Maka para ahli sosiologi diharapkan dapat menyumbangkan pemikirannya untuk ikut memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental.

Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan ialah suatu ilmu yang mengkaji masalah-masalah pendidikan dengan pendekatan sosiologis, atau sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental.

Guru adalah jabatan dan pekerja profesional, indikator untuk mengukur keprofesionalan adalah apabila kelas yang diberi pelajaran menjadi “surganya siswa untuk belajar”, atau “kehadiran seorang sebagai guru di kelas bisa membuat hati siswa menjadi sejuk, dan rindu jika sang guru belum hadir, atau dengan perkataan lain kehadirannya sang guru sangat dinantikan para siswa”. Kepribadian guru seperti ini menurut penulis hanya akan ada pada guru yang memahami sosiologi pendidikan dan mengimplementasikan sosiologi pendidikan dalam pekerjaan dan profesinya.

Kepribadian guru juga dapat mempengaruhi suasana kelas/sekolah, baik kebebasan yang dinikmati anak dalam mengeluarkan pendapatnya dan mengembangkan kreatifitasnya maupun pengembangan Kepribadiannya. Kebebasan guru juga tergantung atasannya (Kepala Sekolah, Pengawas, Kadiknasnya, sampai Menteri Diknasnya), keseluruhannya dipengaruhi, dibatasi, serta diarahkan pada pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sudahkah kita mencapai kondisi yang demikian? Insya Allah.

Dr. Tjipto Subadi, M.Si

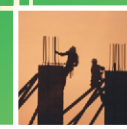
SOSIOLOGI DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis

SOSIOLOGI DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis

Dr. Tjipto Subadi, M.Si



Dr. Tjipto Subadi, M.Si

SOSIOLOGI DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis

Penerbit2009

SOSIOLOGI DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Suatu Kajian Boro dari Perspektif Sosiologis Fenomenologis

Penulis : Dr. Tjipto Subadi, M.Si

Editor : Farida, Roikhan

Design Cover : Zie Informatika & Gesign

Lay Outer : Zie Informatika & Design

Cetakan Pertama : Desember 2009

Diterbitkan Oleh :

Tiga Target Baru Israel (Suara Merdeka, 2009), Prospek Suara Partai Islam (Suara Merdeka, 2009), Masa Depan Malaysia (Suara Merdeka, 2009), Gunung Api sebagai Pasak Bumi (Suara Merdeka, 2009), Menakar Kesiapan BRT di Kota Atlas (Joglo Semar, 2009), Pat Gulipat di Bank Century (Suara Merdeka, 2009), Di Balik Politik Nuklir Iran (Suara Merdeka, 2009).

Jurnal Ilmiah (lima tahun terakhir) Pendidikan dalam Perspektif Perubahan Sosial (Varidika, ISSN:0852-0976). Manajemen Pendidikan Dasar sebaga Determinan Mutu Pendidikan di Indonesia (Varidika, ISSN: 0853-2974). Boro: Mobilitas Penduduk Suatu Pendekatan Kualitatif Fenomenologis (Akademika, ISSN: 0216-8219). Kepuasan Siswa Ditinjau dari Unjuk Kerja Guru Fasilitas Pembelajaran dan Keselamatan Kerja Siswa di SMK Negeri 1 Ngawen Gunungkidul.(Pengelolaan Pendidikan ISSN 2085-126X). Peningkatan Kualitas Micro Teaching dan PPL Melalui Lesson Study bagi Calon Guru Matematika FKIP-UMS (Pengelolaan Pendidikan ISSN -126XI).

Penelitian Hibah Kompetitif: Peningkatan Kualitas Micro Teaching dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) Melalui Lesson Study bagi Calon Guru Matematika pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UMS 2007 (PHK Matematika). Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Guru Melalui Pelatihan Lesson Study bagi Guru SD Surakarta 2008 (DP2M Dikti). Model Lesson Study untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Psikologi Umum pada Program Studi PGSD FKIP-UMS 200 (PHK PGSD). Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia (Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi) 2009 (Penelitian untuk Publikasi Internasional Batch II DP2M Dikti)

RIWAYAT PENULIS



Penulis: Dr. H.Tjipto Subadi, M.Si., Sukoharjo 7 Juni 1953. menikah 1 Januari 1979. Istri; Hj. Siti Badiriyah. Tjipto Subadi dosen PGSD, dosen Pendidikan Matematika FKIP dan dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis adalah alumnus MI Muhammadiyah Gatak.

Kelasman tahun 1966, SMP YAPI Tegalondo dan menempuh Ujian Persamaan PGAP Negeri Klaten tahun 1971, PGAA Negeri Surakarta tahun 1972, Sarjana Pendidikan FKIP-UNS tahun 1979, S2 Sosiologi Pedesaan UMM tahun 1996. Gelar Doktor Ilmu Sosial UNAIR Surabaya tahun 2004.

E-mail tjiptosubadi@yahoo.com. Mengajar S1 Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan, Studi Kemuhammadiyah, Studi Islam III, ISD, Psikologi Umum, Pengantar Sosiologi dan Layanan Bimbingan Belajar. Mengajar S2 Mata Kuliah: Sosiologi Pendidikan, Metodologi Penelitian Kualitatif dan, Paradigma Ilmu Sosial Pendidikan.

Publikasi Artikel di Mass Media (dua tahun terakhir): Kalkulasi Resiko Serangan Israel ke Iran (Solopos, 2008). Isra' Mi'raj dan Pemberantasan Korupsi (Republika, 2008), Kasus Supriyadi dan Misteri Sejarah (Joglo Semar, 2008), Menyelamatkan Senjata Nuklir Pakistan (Joglo Semar, 2008), Koalisi Permanen Golkar - PDIP (Joglo Semar, 2008), Pisowanan Agung Jilid II (Joglo Semar, 2008), Sikap Politik Sultan HB X (Suara Merdeka, 2008), Malaysia Setelah Badawi (Suara Merdeka, 2008), Terorisme Pascaeksekusi Amrozi CS (Suara Merdeka, 2008), Menelisik Misteri Pembunuhan Munir (Suara Merdeka, 2008), Mega Hidayat dan Rakornas PDIP Solo (Suara Merdeka, 2008), Perang Besar di Timur Tengah (Pikiran Rakyat, 2009),

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan bimbingan dan petunjuknya sehingga buku ini bisa terbit. Buku ini ditulis berangkat dari hasil penelitian tentang “*Boro: Mobilitas Penduduk Masyarakat Tegalombo Sragen*”. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di mana para ilmuwan muda dalam mengkaji fakta sosial ada kecenderungan menggunakan pendekatan teoritik kualitatif fenomenologis sehingga mendorong peneliti untuk menerbitkan hasil penelitian ini menjadi sebuah buku.

Buku ini tidak akan bisa terbit apabila tidak mendapatkan bantuan dan bimbingan akademik dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D, Prof. Dr. Salladien dan Prof. Dr. Sunyoto Usman sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran-saran akademik sehingga penulis memperoleh pengalaman, ilmu pengetahuan dan wawasan akademik meskipun masih harus terus belajar, dan belajar.

Terima kasih yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Koordinator Kopertis VI Jawa Tengah dan H. Mardiyanto Menteri Dalam Negeri (pada saat penelitian dan proses buku ini disusun beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah) yang telah memberikan dorongan, bantuan, do'a yang sangat berharga bagi penulis sehingga buku ini dapat selesai.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman dosen dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per-satu, yang telah memberikan dorongan dan harapan sekaligus do'a sehingga buku ini dapat selesai.

Secara khusus saya sampaikan terima kasih juga kepada Hj. Siti Badriyah (Istriku tersayang) dan Erlina Farida Hidayati, ST & Fajar Roikhan, Noor Fitria Dewi, ST & Eko Haryanto, ST., Noor Ngazizatul Maziyyah calon Sarjana Farmasi, Dian Sari Maisaroh calon Sarjana Kelautan (anak-anakku yang kusayangi), Muhammad Rozan Yumissalam, Zidan Muhammad Nafis, Afzaluddin Haidar Al Fahri (cucu yang tersayang) yang menjadi motivator agar buku ini cepat selesai.

Kepada Penerbit yang telah bersedia menerbitkan tulisan saya ini menjadi sebuah buku, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih. Hal ini sangat penting karena sebenarnya buku ini telah selesai disusun tahun 2004 karena sesuatu hal baru bulan Desember 2009 bisa diterbitkan, untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.

Buku ini pasti ada kekurangan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini pada masa-masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat, amien.

Kartasura, Desember 2009
Tjipto Subadi

Trent, William L., 1997, *Outcomes of School Desegregation: Findings from Longitudinal Research*, Journal of Negro Education, Vol. 66, No. 3, Summer 1997. pp. 255-257.

Veeger, 1990, *Realitas Sosial*, Gramedia, Jakarta.

Voelki, K. E., 1993, *Academic Achievement and Expectations Among African-American Students*, Journal of Research and Development in Education, Vol. 27, No.1, Fall 1993, pp.42-55.

William Jullius Wilson, 1987, *The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy*, Chicago: The University of Chicago Press.

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff, Edisi Keempat, *Sociology*, A. Feffer dan Simons Internasional University Edition. Houghton Nifflin Company-Boston.

Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Zainuddin Maliki, 2008, *Sosiologi Pendidikan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Zuniga, Robin Etter, 1991, *The Road to College: Educational Progress by Race and Ethnicity*, Study Sponsored by the Western Interstate Commission for Higher Education and The College Board, Boulder, Colo, Wiche Publications.

[http://zanikhan.multiply.com/journal/item/501/Sejarah dan Aliran Besar dalam Sosiologi](http://zanikhan.multiply.com/journal/item/501/Sejarah_dan_Aliran_Besar_dalam_Sosiologi).

[http://www.Bpk.penabur.or.id/kpskt/berita/200006/Winarno Surakhmad, *Profesionalisme Dunia Pendidikan*, From: artikel2.htm](http://www.Bpk.penabur.or.id/kpskt/berita/200006/Winarno_Surakhmad,_Profesionalisme_Dunia_Pendidikan,_From:_artikel2.htm), Jakarta, 27 Mei 2002.

- Soetjipto Wirosarjono, 1987, *Dakwah, Potensi dalam Kesenjangan*, Pesantren No. 4/Vol.III/1987.
- Sommers, Christina Hoff, *The War Against Boys*, The Atlantic Monthly, May 2000, pp59-74.
- Suhaya S. Pradja, 1987, *Aliran-Aliran Filsafat dari Rasionalisme Hingga Sekularisme*, Alva Grasia, Bandung.
- Suwarno, 1986, *Migrasi Penduduk Desa-Kota dan Kesempatan Kerja*, Survey di Tiga Kota Sumatera Utara, Majalah Demografi Indonesia, 13(25) Juni, LD-FE, UI. Jakarta
- Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta
- Standing Guy, 1981, *Migration and The Labor Process for Migration Survey*, Geneva International Labor Office.
- Tjipto Subadi, 2004, *Boro: Mobilitas Pendidik Masyarakat Tegalombo*, (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya 2004), Surabaya.
- Tom Campbell, 1994, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Titus dkk., TT., *Living Issues In Philosophy*, (terj.) M. Rasjidi, Bulan Bintang, Jakarta.
- Tirtoharjo, 1994, *Pengembangan dan Perubahan Sistem Pendidikan Abad XXI*. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Tobroni, Syamsul Arifin, 1994, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, SI Press: Yogyakarta.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I SOSIOLOGI	1
A. Pendahuluan	1
1. Pengertian Sosiologi	2
2. Objek Sosiologi.....	4
3. Sejarah Lahirnya Sosiologi	6
B. Peletak Dasar Sosiologi	10
1. Auguste Marie Francois Xavier Comte.....	10
2. Emile Durkheim.....	14
C. Masyarakat dan Proses Sosial.....	17
1. Interaksi Sosial.....	17
2. Perubahan Sosial.....	21
3. Stratifikasi Sosial	25
4. Struktur Sosial	26
5. Institusi Sosial	28
6. Kelompok Sosial.....	29
D. Teori-Teori Sosiologi Makro.....	38
1. Perspektif Teori Struktural Fungsional	38
2. Perspektif Teori Konflik	44
3. Marxianisme Karl Marx	51
3. Perspektif Teori Pertukaran	56
BAB II SOSIOLOGI PENDIDIKAN	63
A. Pengertian Sosiologi Pendidikan.....	63
B. Objek Sosiologi Pendidikan	64
C. Sejarah Sosiologi Pendidikan.....	65

D. Teori-Teori Sosiologi Pendidikan (Teori Mikro).....	67
1. Perspektif Fenomenologi.....	67
2. Interaksi Simbolis	80
3. Kebudayaan	83
4. Etnometodologi	85
BAB III PERMASALAHAN PENDIDIKAN	89
A. Permasalahan Kualitas Pendidikan	89
1. Permasalahan Nasional	89
2. Kondisi Pendidikan di Jawa Tengah	90
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran	91
B. Kompetensi Guru.....	92
1. Kompetensi Paedagogik.....	94
2. Kompetensi Kepribadian	94
3. Kompetensi Profesional	94
4. Kompetensi Sosial	95
BAB IV PROSES SOSIOLOGI PENDIDIKAN.....	97
A. Kelas sebagai Sistem Sosial.....	97
1. Perubahan Sosial dan Pendidikan	98
2. Pendidikan dan Pembaharuan Masyarakat	99
B. Mobilitas Sosial	99
1. Determinasi Mobilitas Sosial	100
2. Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas	100
C. Kontribusi Pendidikan Terhadap Kesuksesan Ekonomi	101
1. Pendidikan dan Ekonomi pada Zaman Modern	102
2. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	102
D. Tantangan Dunia Pendidikan dalam Persaingan Global	103
1. Heterogenitas Tingkat Pendidikan Masyarakat	103
2. Keterpurukan Perekonomian Masyarakat	104
3. Masalah Pemerataan Pendidikan.....	105

Publisher, Inc., terj., oleh Farid Wajdi , S. Menno, 1995 cet. Ke 2
Sosiologi Makro, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2000, *Dalam Ekosistem dan Kesejahteraan Manusia; Suatu Kerangka Pikir untuk Penilaian*, Laporan Kelompok Kerja Conceptual Framework Millenium Ecosystem Assesment 2000.

Selo Sumardjan, 1993, *Cultural Change in Rural Indonesia, Sabela: Mort Univ. Press. Soerjono Soekanto, 1986, Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.

Simuh, 1987, *Masalah Kerangka Dasar Kebudayaan Islam Modern, dalam A. Rifa' i Hasan, Perspetif Islam dalam Pembangunan Bangsa*, PLP2M: Yogyakarta.

Sudharto, tt, *Penelaahan Teori Tentang Perubahan Sosial, dalam M. Rush Karim, Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.

Sukardi, 2006, *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan, Usaha Keluarga*, Yogyakarta.

Suparlan, 2003, *Peran Pendidikan dalam Era Global*, Alumni, Bandung.

Soekarwati, 2000, *Pendidikan Sebagai Cermin Budaya*, Aksara Baru, Jakarta.

Soejatmoko, 1991, *Manusia dan Dunia yang Sedang Berubah, dalam Conny R. Semiawan (ed.), Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Abad XXI*, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.

Educational Attainment, American Sociological Review, Vol. 41, 1976, pp. 413-431.

Petirim Sorokin, 1928, *Contemporary Sociological Theories*, Harper & Row, New York, and Evanston

Puecell, P., and L. Steward, *Dick and Jane in 1989*, Sex Roles, Vol. 22, 1990, pp. 177-185.

Ramlan Surbakti, 1997, *Teori-Teori Sosial Makro*, Dihimpun dari Beberapa Sumber Internet, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Raywid, Mary Anni, *Separate Classes for the Gifted? A Skeptical Look*, Educational Perspectives, Vol. 26, No. 1, 1989.

Ravik Karsidi, 2005, *Sosiologi Pendidikan*, LPPM, UNS, Surakarta.

Robert H. Lauer, 1989, *Perspectives on Social Change*, (terj.) Alimanda, Bina Aksara: Jakarta.

Robert M.Z. Lawang, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

_____, 1990, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Roucek dan Werren, 1962, *Sociology an Introduction*, Littefield, Adams & Co Peterson, New Jersey,

Sanderson, 1991, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realita Sosial*, Jakarta, Rajawali Press.

_____, Sanderson, 1991, *Macro Sociology*, Haper Collis ,

BAB V RAS GENDER DAN PENDIDIKAN

(Kajian di Amerika)	107
A. Gender dan Pendidikan	107
1. Perbedaan Jenis Kelamin dalam Sistem Pendidikan	108
2. Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan di Sekolah Amerika	109
3. Pengalaman-Pengalaman dan Aktifitas di Sekolah	110
4. Prestasi dan Motivasi dalam Kasus Matematika dan Sains	110
5. Pemberantasan Perbedaan Gender	111
B. Kelas, Ras dalam Peluang Mendapatkan Pendidikan	111
D. Pengalaman Pendidikan Minoritas Terpilih di Amerika Serikat .	114
1. <i>Hispanic Student</i> (Pelajar Hispanic).....	114
2. Pelajar Asia	115
3. Pelajar Amerika Asli.....	115
E. Meningkatkan Sekolah Bagi Siswa Minoritas	116

BAB VI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF

PERUBAHAN SOSIAL	119
A. Sebuah Perspektif tentang Pendidikan	120
B. Perubahan Sosial dan Implikasinya.....	122
C. Realitas Pendidikan dan Orientasi Masa Depan	129
D. Pendidikan Proses Perubahan	134
1. Pendidikan dan Paradigma Masyarakat Indonesia Masa Depan	137
2. Peran Perubahan Terhadap Ketahanan Ideologi.....	138
3. Peran Perubahan dalam Bidang Politik.....	138
4. Peran Perubahan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi	140
E. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan yang Terbuka.....	141

BAB VII PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendidikan Islam Masa Lugman	143
B. Arah Perubahan Paradigma Pendidikan	144
C. Perubahan Baru Paradigma Pendidikan	145

BAB VIII KAJIAN SOSIOLOGI BORO	155
A. Pengertian <i>Boro</i>	155
B. Teori Migrasi Everett S. Lee	156
1. Teori Dorong-Tarik (<i>Push-Pull Theory</i>)	157
2. Kritik Teori Migrasi Lee	161
C. Struktur Masyarakat Desa	163
1. Konstruksi Sosial Proses <i>Boro</i>	164
2. Konstruksi Sosial Makna <i>Boro</i>	166
3. Sosiologi <i>Boro</i>	167
D. Modifikasi Teori Migrasi Everett S. Lee	168
E. Implikasi Temuan Penelitian <i>Boro</i>	169
 DAFTAR PUSTAKA	 173

Muhammad Noor Syam, 1986, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Pendidikan Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.

Muhyi Batubara, 2004, *Sosiologi Pendidikan*, Ciputat Press, Jakarta.

Mulyasa, 2004, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Metz, Mary H., 1994, *Desegregation as Necessity and Challenge*, *The Journal of Negro Education*, Vol. 63. No.1, 1994, pp. 64-76.

Moore, Joan, and Raquel Pinderhughes (eds), 1993, *In the Barrios: Latinos and the Underclass Debate*, New York: Russell Sage Foundation.

Neppel, Tricia K. And Ann D. Murry, 1997, *Social Dominance and Play Patterns among Presschoolers: Gender Comparison, Sex Roles*: A. *Journal of Research*, Vol. 36. No. 5-6, March 1997, pp.381-393.

Noeng Muhadjir, 1998, *Pendidikan Holistik*, Kanisius, Yogyakarta.

_____, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (edisi III), Rake Sarasin, Yogyakarta

_____, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik Rasionalistik dan Phenomenologik*, Rake Sarasin, Yogyakarta

Onno W. Purbo, Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia, From: <http://www.detik.com/net/onno/jurnal/20004/aplikasi/pendidikan/p-19.shtml>. 2000.

Portes, Alejandro, and Kenneth L. Wilson, *Black-White Differences in*

Mardiyanto, 2003, *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 14 Tahun 2002 Tentang REPETADA Prop. Jateng*, Semarang, Pemerintah Daerah Propinsi Jateng.

Moleong J. L., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Margaret M. Poloma, 1992, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta

Mastuhu, 1994, *Arah Pendidikan Modern*, Tarsito, Bandung.

_____, 1999, *Pemberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Logos, Jakarta.

Mansour Fakih, 2002, *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mayor Polak, 1797, *Sosiologi: Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Cetakan ke Sembilan, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta.

M. Nata Saputra, 1982, *Pengantar Sosiologi*, Multi Aksara, Yogyakarta.

Mike S. Arifin, 1994, *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Kalimasahada Press, Malang.

Miles, B. M., Michael, H., 1984, *Qualitative Data Analysis*, dalam H.B. Sutopo, *Taman Budaya Surakarta dan Aktivitas Seni di Surakarta*, Laporan Penelitian, FISIPOL UNS.

Muchtar Buchori, 1987. *Sosok Pendidikan Masa Kini*, Aksara Baru, Jakarta.

_____, 1990, *Analisis Pendidikan. Makalah Seminar Nasional*, UMS, Surakarta.

BAB I SOSIOLOGI

A. Pendahuluan

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sosial yang objeknya adalah masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dari sosiologi adalah; sosiologi bersifat logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, akumulatif, dan empiris, teoritis, kumulatif, non-etis.

Sosiologi bersifat logis artinya sosiologi disusun secara masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika sebagai pola pemikiran untuk menarik kesimpulan. Sosiologi bersifat objektif artinya sosiologi selalu didasarkan pada fakta dan data yang ada tanpa ada manipulasi dari data. Sosiologi bersifat sistematis artinya sosiologi disusun secara rapi, sesuai dengan kaidah keilmuan. Sosiologi bersifat andal artinya sosiologi dapat dibuktikan kembali, dan untuk suatu keadaan terkendali harus menghasilkan hasil yang sama. Sosiologi bersifat dirancang/direncanakan artinya sosiologi didesain lebih dahulu sebelum melaksanakan aktivitas penyelidikan. Sosiologi bersifat akumulatif artinya sosiologi merupakan ilmu yang akan selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan keinginan dan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penemuan (kesimpulan, kebenaran) kemudian menggugurkan penemuan sebelumnya.

Sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil penelitian. Sosiologi bersifat kumulatif, artinya sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori lama. Sosiologi bersifat non-etnis, artinya sosiologi yang dibahas

dan dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang tergabung pula dalam ilmu-ilmu sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan agar lebih jelas mari kita ikuti uraian berikutnya.

1. Pengetian Sosiologi

Sosiolog De Saint Simon bapak perintis sosiologi (1760-1825) menjelaskan bahwa sosiologi itu mempelajari masyarakat dalam aksi-aksinya, dalam usaha koleksinya, baik spiritual maupun material yang mengatasi aksi-aksi para peserta individu dan saling tembus menembus (lihat "*Traite de Sociologie* 1962, dari Georges Gurvitch Jilid I hal. 32). Mayor Polak (1979) memberikan komentarnya terhadap pandangan Simon tersebut bahwa definisi itu agak samar-samar bagi para pendatang baru dalam bidang sosiologi. Maka kemudian Polak menyampaikan pandangannya tentang sosiologi yang diawali dengan pernyataannya sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu kompleks atau disiplin pengetahuan tentang suatu bidang realitas tertentu, yang didasarkan pada kenyataan (fakta-fakta) dan yang disusun serta diantar-hubungkan secara sistematis dan menurut hukum-hukum logika. Karena pengetahuan ilmiah didasarkan pada fakta-fakta maka orang sering menamakannya "objektif". Pernyataan ini kurang tepat. Pada hakekatnya tidak ada pengetahuan objektif. Hasil-hasil pengamatan kita tentang dunia luar semuanya diolah dalam otak kita masing-masing, jadi sifatnya subjektif. Tetapi panca indera kita adalah serupa dan tidak tunduk kepada logika yang sama, sehingga kita dapat menemukan pengetahuan ilmiah itu "antar-subjektif". Untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang sosiologi berikut ini penulis sajikan pengertian sosiologi dari beberapa pandangan para ahli tentang sosiologi.

Kata sosiologi mula-mula digunakan oleh Auguste Comte, bapak sosiologi, dalam tulisannya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive (Positive Philosophy)* tahun 1842. Sosiologi berasal dari bahasa latin yang dari dua kata; *Socius* dan *Logos*. Secara harfiah atau

Koento Wibisono, 1982, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

K. Bertens, 1991, *Panorama Filsafat Modern*, Gramedia: Jakarta.

Lederman, Fouglass, 1994, *A key Sport-Equity Case, The Chronicle of Higher Education*, October 5, 1994, p. A51.

Mabogunje, 1970, *System Approach to a Theory of Rural-Urban Migration*, Geography Analysis.

Mantra dan Sumatri, 1988, *Migrasi Penduduk Aceh Berdasarkan Data Supas 1985*, Kerjasama LDFE Universitas Shah Kuala dan Kantor Menteri Negara KLH, Jakarta.

Mantra, 1987, *Population Movement In West Rice Communities: A Case Study of Two Dukuh In Yogyakarta Special Region*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

_____, 1981, *Population Mobility in West Java*, Ph.d Thesis. Yogyakarta: GajahMada University Press.

M Amien, 1983, *Mobiltas Penduduk Pedesaan di Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang dan Pengaruhnya terhadap Peningkatamn Pendapatan*, Disertasi UGM, Yogyakarta.

M. Arifin, 1991, *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Bumi Aksara.

Malcolm Weters, 1994, *Modern Sociological Theory*, SAGE Publication, London Thausand Oaks, New Delhi.

- Jabal Tarik Ibrahim, 2003, *Sosiologi Pedesaan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Jalaluddin Rahmat, 1989, *Islam Menyongsong Peradaban Dunia Ketiga*, Ulumul Qur'an, Vol.,2, 1989.
- _____, 1987, *Islam Alternatif*, Mizan: Bandung.
- Jalal. 2001, *Peran dan Fungsi Pendidikan Formal*, Alumni, Bandung.
- J.B.A.F. Mayor Polak, 1979, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*, Ihtiar Baru, Jakarta.
- Jeanne H. Ballantine, 2001, *The Sociology of Education. A Systematics Analysis*, Upper Saddle River, New Jersey
- Jujun S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral Sosial dan Politik*, Gramedia, Jakarta.
- John Weistart, 1998, *Title IX and Intercollegiate Sports: Equal Opportunity?* The Brookings Review, Vol. 16, No.4, Fall 1998 pp. 39-43.
- Kartini Kartono, 1992, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, Mandar Maju: Bandung.
- Kuntowidjoyo, 1989, *Ilmu Sosial Profetik*, Umul Qur'an, Vol. I 1989.
- _____, 1991, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung.
- Koentjoroningrat, 1987, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Gramedia: Jakarta.

etimologis kata *socius* berarti; teman, kawan, sahabat, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi berarti ilmu pengetahuan tentang bagaimana berteman, berkawan, bersahabat atau suatu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat, dengan kata lain sosiologi mempelajari tentang masyarakat/ilmu pengetahuan tentang hidup masyarakat.

Secara operasional menurut Auguste Comte (1789-1853) menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat serta hasilnya harus disusun secara sistematis. Emile Durkheim (1858-1917) pernah menamakan sosiologi adalah ilmu tentang lembaga-lembaga sosial, yakni pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang sudah “tertera” yang sedikit banyak menundukkan para warga masyarakat.

Pitirim Sorokin (terjemahan bebas dari Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, 1928: 760-761, dalam Soejono Soekanto 1986: 15) bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya. Dan ciri umum dari pada semua jenis gejala-gejala sosial. Roucek dan Warren (terjemahan bebas dari Roucek dan Werren, *Sociology an Introduction*, 1962: 3) bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff dalam bukunya yang berjudul “*Sociology*” Edisi Keempat, halaman 39 dijelaskan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya berupa organisasi sosial. J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers, dalam bukunya yang berjudul “*Modern Sociology, Systematic en Analyze*, (1964: 24) dijelaskan bahwa sosiologi ilmu pengetahuan tentang

struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. (Soerjono Soekanto, 1986:15-16)

Pengertian sosiologi dari ilmuwan sosial yang lain, misalnya Mayor Polak (1979: 4-8) menjelaskan bahwa sosiologi adalah (1) suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat, (2) sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan yakni antar hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (3) sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan yakni antara hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok baik formal maupun material, (5) sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antar-hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis.

Pengertian sosiologi yang lain disampaikan juga oleh Alvin Bertrand, ia mengatakan bahwa sosiologi adalah studi tentang hubungan antar manusia (*human relationship*). P. J. Bouwman, juga memberikan sumbangan pemikiran tentang pengertian sosiologi adalah ilmu masyarakat secara umum. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial (Ary H. Gunawan, 2000: 3). Pengertian ini hampir sama dengan pengertian sosiologi yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial.

Dari beberapa definisi tentang sosiologi tersebut di atas terdapat dua hal yang penting dalam memahami sosiologi. *Pertama*, masyarakat sebagai keseluruhan dan *kedua*, masyarakat sebagai jaringan antar hubungan sosial. Tugas sosiologi adalah untuk menyelami, menganalisa dan memahami jaringan-jaringan antar hubungan itu.

2. Objek Sosiologi

Meyer F. Nimkoff, dalam M. Nata Saputra (1982: 30-31)

Hauser, Robert M., and Douglas K. Anderson, 1991, *Post-High School Plans and Aspirations of Black and White High School Seniors: 1976-1986*, *Sociology of Educations*, Vol. 64, No. 4, October 1991, p. 272.

_____, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

_____, 2003, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Hugo, Graeme, J., 1975, *Population Mobility in West Java, Indonesia*, Ph.D. Dissertation, Departement of Demography, The Australia National University, Canberra (Unpublished).

Imam Bernadib, 1987, *Filsafat Pendidikan, (Sistem dan Metode)*, Yayasan Penerbit FIP FKIP, Yogyakarta.

Indiant M. 2004, *Sosiologi Untuk SMA*, Erlangga, Jakarta.

Irving M. Zeitlin, 1998, *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, Penerjemah Juhanda dan Anshori, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Iskandar Alisjahbana, 1988, *Harapan dan Keprihatinan Kemajuan dan Teknologi Informasi Masa Depan, dalam Daliar Noer; Iskandar Alisjahbana (ed.), Perubahan, Pembaharuan dan Kesadaran Menghadapi Abad ke-21*, Dian Rakyat: Jakarta.

J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers, 1964, *Modern Sociology, Systematic en Analyze*, Vijfde druk, Aula Boeken, Utrecht-Antwerpen.

- George Ritzer, 1980, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, CV. Rajawali. 1980, Jakarta.
- Goodman, J. L., 1993, *Reading Toward Womanhood: The Baby-Sitters Clup Books and Our Daughters*, Tikkun, Vol. 8, No. 6, 1993, pp. 7-11.
- Gordan, C.R., Knopp B., 1982, *Qualitative Research for Education: A Introduction to Theory and Method*, Boston: Ally and Bacon, Inc.
- Gotette, Kimberly, and Yu Xie, *Educational Expectations of Asian American Youths: Determinants and Ethnic Differences*, *Sociology of Education* 72, No 1, 1999, pp 22-36.
- Hadi Mulyo, 1989, *Masa Depan, Cerah atau Suram, Ulumul Qur'an, Vol. 2. Hasan Langgulung, 1988, Azas-Azas Pendidikan Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta.
- Hugo, 1975, *Population Mobility in West Jawa, Indonesia*, Ph.D. Dissertation, Departement of Demogaphy, The Australia National University, Canberra (Unpublished).
- Hadi Sutomo, 1993, *Hubungan Antara Mobilitas Horizontal dan Mobilitas Vertikal Migran Sirkuler Sektor Informal di Kota Wonosobo dan Cilacap*, Yogyakarta, Disertasi, UGM.
- H.A.R. Tilaar, 1992, *Manajemen Pendidikan Nasional; Kajian Masa Depan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hujair AH. Sanaky, 1999, *Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern*, *Jurnal Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi, Volume V Th IV, ISSN: 0853 - 7437, FIAI UII, Agustus 1999, Yogyakarta.*

membagi objek sosiologi ke dalam 7 objek, yaitu; faktor dalam kehidupan sosial manusia, kebudayaan, sifat hakiki manusia (*human nature*), kelakuan kolektif, persekutuan hidup, lembaga sosial, dan perubahan sosial (*social change*). Dalam garis besarnya ada 3 pendapat tentang objek sosiologi, yaitu;

- a. Objek sosiologi adalah individu (*individualisme*). Tokohnya George Simmel, yang memandang masyarakat dari sudut individu; kesatuan kelompok itu asalnya semata-mata dari kesatuan yang nyata berwujud yang terdiri dari manusia-manusia perorangan. George Simmel menitikberatkan pada daya pengaruh mempengaruhi antara individu-individu yang merupakan sumber segala pembentukan kelompok.
- b. Objek sosiologi adalah kelompok manusia/masyarakat (*kolektivisme*). Tokohnya Ludwik Gumplowicz. Baginya masyarakat atau kelompok manusia merupakan satu-satunya objek sosiologi. Dalam peristiwa sejarah, individu adalah pasif di mana kehidupan kerokhaniannya ditentukan oleh kehendak masyarakat. Perhatian Ludwik terutama dicurahkan pada perjuangan antara golongan-golongan.
- c. Objek sosiologi adalah realitas sosial. Pandangan yang individualistis dan kolektivistis tersebut di atas itu biasanya dipandang sebagai berat sebelah, karena itu pandangan ketiga ini ingin menjauhi kelemahan itu. Pandangan ini melihat kehidupan sosial dari sudut saling mempengaruhi dan bersikap tidak memihak terhadap pertentangan antara kedua faham tersebut. Bahkan ada yang tidak mengakui pertentangan yang ada antara kedua faham itu. Ada dua tokoh dalam pandangan ini; Ch. H. Cooley berpendapat sosiologi ditujukan kepada realitas sosial. Ia mengembangkan konsepsi dari saling tergantung dan ketidakterpisahannya individu dan masyarakat. "Diri sendiri dan masyarakat itu adalah dua anak kembar". Begitu pula kesadaran sosial tak terpisah dari kesadaran sendiri. Teori Cooley berdasarkan pendapat bahwa pergaulan hidup masyarakat merupakan suatu keseluruhan. Individu dan masyarakat tak dapat ada sendiri-sendiri, tetapi kedua-duanya merupakan segi-segi dari suatu kenyataan. Satu hal yang penting dari teori ini adalah pengertian tentang

“*primary group*” seperti keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan sahabat dan sebagainya. *Primary group* dengan hubungan *face to face* yang akrab, merupakan tempat mencetak semua sikap pribadi seseorang dan sikap-sikap sosial.

L. Von Wiese. Ia menamakan sosiologi *Beziehunglehre*, yaitu ilmu pengetahuan mengenai perhubungan antara sesama manusia, atau hubungan sosial. Sosiologi dipandang sebagai ilmu pengetahuan empiris dan objeknya adalah perhubungan manusia membentuk sosial. Dasar penyelidikan sosiologi adalah hubungan sosial/proses sosial, yaitu perubahan-perubahan dalam *social distance* (perubahan-perubahan dalam jarak hubungan sosial). Ia terutama memperhatikan proses-proses sosial dari “*assosiasi*” (perkaitan) dan “*disosiasi*” (perpecahan). Dalam suasana sosial, ia hanya melihat proses-proses dan rangkaian peristiwa-peristiwa yang tentunya juga melibatkan individu. Menurut Jabal Tarik Ibrahim (2002: 2) objek sosiologi adalah masyarakat, masyarakat yang dimaksud adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan antar manusia dalam masyarakat. Masyarakat (*society*) adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal hidup bersama menjadi satu kesatuan dalam sistem kehidupan bersama. Sistem hidup bersama ini kemudian menimbulkan kebudayaan termasuk sistem hidup itu sendiri.

3. Sejarah Lahirnya Sosiologi

Sebagai suatu disiplin akademis yang mandiri, sosiologi masih berumur relatif muda yaitu kurang dari 200 tahun. Istilah sosiologi untuk pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte dan oleh karenanya Comte sering disebut sebagai bapak sosiologi. Istilah sosiologi ia tuliskan dalam karya utamanya yang pertama, berjudul *The Course of Positive Philosophy*, yang diterbitkan dalam tahun 1838. Karyanya mencerminkan suatu komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah. Menurut Comte ilmu sosiologi harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis bukan pada kekuasaan dan spekulasi. Hal ini merupakan pandangan baru pada saat itu.

Di Inggris Herbert Spencer menerbitkan bukunya *Principle of Sociology* dalam tahun 1876. Ia menerapkan teori evolusi organik pada

Djohar, 1999, *Soal Reformasi Pendidikan Omong Kosong*, Tanpa Mengubah UU No.2/89”, Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999, Yogyakarta.

Doyle Paul Johnson, 1981, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective*, John Wiley & Sons, Inc., terj., Florida.

Everett S. Lee, 1966, *A Theory of Migration*, *Demography* 3 (1) 47-57. Alexandria: Population Association of America.

Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, 1986, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Mizan: Bandung.

F. Firmansyah, 1988, *Masalah Ketenaga Kerjaan Menjelang Era Tinggal Landas, Dilema Pengangguran Intelektual*, dalam *Suara Merdeka*, Jum'at 3 Juni 1988.

Fasli Jalal, 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita, Yogyakarta.

Faisal Ismail, 1998, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Tiara Ilahi Press, Yogyakarta.

Finn Collin, 1991, *Social Reality*, Routledge, New York, London,

Geewax, Marilyn, 1995, *Meeting Puts Focus on Girls*, *Dayton Daily News*, September 17, 1995, p.16A.

Gipp, Gerald E., and Sandra J. Fox, *Promoting Cultural Relevance in American Indian Education*, *National Forum*, Vol. 71, Spring 1991, pp.2-4.

- Arifin, 1994, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalima Sahada Press.
- Ary H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*,
- Amrullah Ahmad, 1991, *Kerangka Dasar Masalah Pendidikan Islam, dalam Musleh Usa (ed.), Pendidikan Islam di Indonesia; Antara cita dan Fakta*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Berger, P. and T. Luckmann, 1967, *The Social Construction of Reality*, London, Allen Lane.
- _____, 1990, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, Jakarta, LP3ES.
- _____, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*, Jakarta, LP3ES.
- Bogdan, C.R., Knopp B., 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*, Boston: Ally and Bacon, Inc.
- _____, 1991, *The Problems of Philosophy Social Reality*, New York, London, Routledge.
- Brookover, Wilbur B., Fritz J. Erickson, and Alan W. McEvoy, 1996, *Creating Effective Schools : An In-Service Program for Enhancing School Learning Climate and Achievement*, Homes Beach, Fla: Learning Publications.
- C.A. Van Peuersen, 1985, *Strategi Kebudayaan* (Terj.) Dick Hartoko, Kanisius: Yogyakarta.

masyarakat manusia dan mengembangkan teori besar tentang “evolusi sosial” yang diterima secara luas beberapa puluh tahun kemudian. Seorang Amerika Lester F. Ward yang menerbitkan bukunya “*Dynamic Sociology*” dalam tahun 1883, menghimbau kemajuan sosial melalui tindakan-tindakan sosial yang cerdas yang harus diarahkan oleh para sosiolog. Seorang Perancis, Emile Durkheim menunjukkan pentingnya metodologi ilmiah dalam sosiologi. Dalam bukunya *Rules of Sociological Method* yang diterbitkan tahun 1895, menggambarkan metodologi yang kemudian ia teruskan penelaahannya dalam bukunya berjudul *Suicide* yang diterbitkan pada tahun 1897. Buku itu memuat tentang sebab-sebab bunuh diri, pertama-tama ia merencanakan desain risetnya dan kemudian mengumpulkan sejumlah besar data tentang ciri-ciri orang yang melakukan bunuh diri dan dari data tersebut ia menarik suatu teori tentang bunuh diri.

Kuliah-kuliah sosiologi muncul di berbagai universitas sekitar tahun 1890-an. *The American Journal of Sociology* memulai publikasinya pada tahun 1895 dan *The American Sociological Society* (sekarang bernama *American Sociological Association*) diorganisasikan dalam tahun 1905. Sosiolog Amerika kebanyakan berasal dari pedesaan dan mereka kebanyakan pula berasal dari para pekerja sosial; sosiolog Eropa sebagian besar berasal dari bidang-bidang sejarah, ekonomi politik atau filsafat.

Urbanisasi dan industrialisasi di Amerika pada tahun 1900-an telah menciptakan masalah sosial. Hal ini mendorong para sosiolog Amerika untuk mencari solusinya. Mereka melihat sosiologi sebagai pedoman ilmiah untuk kemajuan sosial. Sehingga kemudian ketika terbitnya edisi awal *American Journal of Sociology* isinya hanya sedikit yang mengandung artikel atau riset ilmiah, tetapi banyak berisi tentang peringatan dan nasihat akibat urbanisasi dan industrialisasi. Sebagai contoh suatu artikel yang terbit di tahun 1903 berjudul “*The Social Effect of The Eight Hour Day*” tidak mengandung data faktual atau eksperimental. Tetapi lebih berisi pada manfaat sosial dari hari kerja yang lebih pendek.

Namun pada tahun 1930-an beberapa jurnal sosiologi yang ada lebih berisi artikel riset dan deskripsi ilmiah. Sosiologi kemudian

menjadi suatu pengetahuan ilmiah dengan teorinya yang di dasarkan pada observasi ilmiah, bukan pada spekulasi-spekulasi. Para sosiolog tersebut pada dasarnya merupakan ahli filsafat sosial. Mereka mengajak agar para sosiolog yang lain mengumpulkan, menyusun, dan mengklasifikasikan data yang nyata, dan dari kenyataan itu disusun teori sosial yang baik.

Sejarah lahirnya sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut;

- a. Sejak tahun 1800-an ketika Auguste Comte pertama kali menggunakan kata sosiologi dalam bukunya yang berjudul; *Positive Philosophy* pada tahun 1842, sosiologi kemudian diakui sebagai ilmu pengetahuan dan Comte kemudian disebut sebagai bapak sosiologi karena Comte-lah yang pertama mengusulkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan pengamatan empiris, disusun secara sistematis, dan ilmiah.
- b. Kemudian pada tahun 1876, Herbert Spencer (Inggris) menerbitkan teks sosiologi pertama.
- c. Pada tahun 1883 di Amerika, Lester F Ward menerbitkan buku yang berjudul *Dynamic Sociology*.
- d. Disusul sosiolog yang lain, Max Weber di Jerman, Emile Durkheim di Perancis, dan kemudian diikuti William Graham Sumner, Charles Horton Cooley, dan Albion W Small di Amerika Serikat.
- e. Pada tahun 1890 kalangan Universitas di Amerika memunculkan sosiologi dan menerbitkan *American Journal of Sociology* tahun 1895. Dalam perkembangannya kemudian di Amerika membentuk organisasi *American Sociological Association* pada tahun 1905.
- f. Selanjutnya dijelaskan bahwa sejarah perkembangan sosiologi menurut Dr. P.J. Bouman dalam Saputra (1982: 8) membagi dalam 4 fase yaitu; (1) Fase pertama, sosiologi sebagai bagian dari pandangan filsafat umum, terutama mengenai negara, hukum, dan moral dalam srelsel etika atau norma keagamaan, (2) Fase kedua, sosiologi yang berdasarkan ajaran ketentuan hukum kodrat yang meliputi segalanya, (3) Fase ketiga, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi dengan metode ilmu pengetahuan lainnya, (4)

DAFTAR PUSTAKA

Abu Loghod and Richard Hay Jr (eds), *Strid World Urbanization*, London, Longman.

Abdullah Malik Fadjar, 1984, *Rangkaian Pembahasan di Seputar Perencanaan Pendidikan*, Yasadaya: Malang.

_____, 1991, *Peradaban dan Pendidikan Islam*, Rajawali: Jakarta.

_____, 1992, *Pancasila; Dasar Filsafat Negara Prinsip-Prinsip Pengembangan Kehidupan Beragama*, UMM-Press: Malang.

Ahmad Watik Pratiknya, 1990, *Pendidikan Profesionalitas, Tantangan Masa Depan*, Dalam *Inovasi* No. 8 Th IV Desember 1990.

Ali Shariati, 1987, *Mart and Islam*, (Terj.) M. Amin Rais, Rajawali: Jakarta.

A.M Saefuddin, 1987, *Disekularisasi Pemikiran, Landasan Islamisasi*, Mizan: Bandung.

Astrid S. Sutanto, 1983, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta: Bandung.

_____, 1977, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung, Bina Cipta.

dimensional yang berkepanjangan, dalam hal ini isyarat bahwa di masa mendatang kebanyakan negara berkembang terutama yang penduduknya cukup besar seperti India dan termasuk Indonesia akan menghadapi masalah besar, kecuali bila berhasil dalam menyusun strategi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya.

Kepada Pemda disarankan agar ada kebijakan untuk memfasilitasi pelaku *boro* dan keluarganya, misalnya; perbankan (koperasi simpan pinjam), asuransi jaminan sosial pelaku *boro* dan keluarganya atau fasilitas lain yang bisa meringankan beban keluarga *boro*.

Fase keempat, sosiologi yang berdiri sendiri dengan objek, metode, dan pembentukan pengertian sendiri.

- g. Sedangkan menurut Ary. H. Gunawan (2000: 8-9) mazhab-mazhab sosiologi setelah Comte adalah; (1) mazhab geografi dan lingkungan, ajaran (teori) yang menghubungkan faktor keadaan alam (lingkungan) dengan struktur serta organisasi social, lingkungan mempengaruhi struktur dan organisasi sosial. Jadi lingkungan mempengaruhi struktur serta organisasi sosial (2) mazhab organis dan Evolusioner, membandingkan masyarakat manusia dengan organisme manusia dan beranggapan bahwa organisasi secara evolusi akan semakin sempurna sifatnya. (3) mazhab formil, masyarakat merupakan wadah saling hubungan (interaksi) antara individu dengan kelompok, dan seseorang tidak mungkin menjadi pribadi yang bermakna tanpa menjadi warga masyarakat, (4) mazhab psikologi, masyarakat adalah proses imitasi (*La societe' c'est limitation*), yaitu proses kejiwaan, semua interaksi sosial dan seluruh pergaulan antar manusia, masyarakat menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia mulai mengimitasi manusia lain, (5) mazhab ekonomi, Karl Marx mempergunakan metode sejarah dan filsafat untuk membentuk suatu teori tentang perubahan perkembangan manusia menuju suatu keadaan yang berkeadilan sosial, (6) mazhab hukum, hukum itu adalah kaidah-kaidah yang memiliki sanksi di mana berat ringannya sanksi tergantung pada sifat pelanggaran.
- h. Di Indonesia pada tahun 1948 ilmuwan sosial yang pertama kali mengajarkan sosiologi adalah Soenario Kolopaking di Akademi Ilmu Politik sekarang bernama UGM. Perkembangan sosiologi di Indonesia, menurut Selo Soemardjan, sosiologi telah dibicarakan oleh Sri Paku Buwono IV dari Surakarta dalam karyanya “Wulang Reh” antara lain mengajarkan tata hubungan para anggota berbagai golongan dalam *intergroup relations*.
- i. Ki Hajar Dewantara juga telah memberikan sumbangannya kepada sosiologi dengan konsepsi kepemimpinan, pendidikan serta kekeluargaan di Indonesia dan sekarang dikenal dengan istilah “Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut Wuri Handayani.

- j. Sosiolog yang lain yang memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sosiologi adalah Mr. Djody Gondokoesoemo dengan bukunya yang berjudul *Sosiologi Indonesia*.
- k. Hasan Shadily dengan bukunya *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* telah memuat bahan-bahan sosiologi modern.
- l. Drs. JBAF Mayor Polak (tamatan Universitas Leiden Belanda) telah menerbitkan buku Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas. Solo Soemarjan dengan bukunya *Social Changes In Yogyakarta (1962)* tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Yogyakarta sebagai akibat revolusi politik dan sosial pada waktu pusat revolusi masih di Yogyakarta, dan *Setangkai Bunga Sosiologi* yang merupakan buku wajib beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

B. Peletak Dasar Sosiologi

1. Auguste Marie Francois Xavier Comte

Ia pertama yang memberikan istilah “sosiologi” dan dia sering dipandang sebagai bapak disiplin ini dan disebut sebagai peletak dasar sosiologi, karya utamanya berjudul *The Course of Positive Philosophy* yang diterbitkan antar tahun 1830 dan tahun 1842, mencerminkan suatu komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah yang harus diterapkan untuk menemukan hukum-hukum alam yang mengatur gejala-gejala sosial. Kenyataan sosial harus dibedakan dari tingkat individu. Institusi-institusi sosial dan arah perubahan sosial yang umum dapat dijelaskan hanya menurut prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang mengatasi individu atau prinsip-prinsip psikologi individu. Teori-teori, konsep-konsep Comte yang umum mengenai sosiologi sebagai studi ilmiah tentang struktur sosial atau kenyataan sosial sampai sekarang masih merupakan pegangan dasar dalam perspektif sosiologi. (Robert M.Z. Lawang, 1994:13-14)

Comte juga melihat hasil dari Revolusi Perancis cenderung ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran. Menurut mereka reorganisasi masyarakat hanya dapat berhasil jika orang mengembangkan cara berpikir yang baru tentang masyarakat. Gagasan inilah yang mendorong Comte kemudian selalu berpikir tentang

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan proses *boro* dan makna *boro* tersebut di atas yang dilihat sebagai realitas subjektif dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka dapat disarankan sebagai berikut:

Metode kualitatif dianjurkan untuk terus dilakukan dalam penelitian mobilitas penduduk, karena jenis metode kualitatif ini menyentuh kehidupan nyata, dan pendekatan yang objektif. Hal ini terutama disebabkan pendekatan yang *empirik*, menyeluruh, serempak dan menyentuh makna yang terkandung didalamnya. Perspektif fenomenologi juga dianjurkan untuk terus digunakan dalam mengkaji fenomena sosial karena perspektif ini akan mampu mengkaji makna sebagai realitas subjektif, *first order understanding* dan *second order understanding* yang dikemukakan oleh Berger juga relevan digunakan untuk memperoleh informasi atau interpretasi migran terhadap makna *boro*, dan kemudian dari penjelasan tersebut peneliti melakukan interpretasi dari interpretasi itu sampai diperoleh pengetahuan yang ilmiah berkaitan dengan makna itu.

Kepada para peneliti kependudukan, khususnya peneliti yang ingin berkonsentrasi pada kajian mobilitas penduduk/migrasi, untuk dapat mempertimbangkan kajiannya pada proses dan makna yang harus dilihat sebagai realitas subjektif, karena pada kenyataannya kebanyakan dari penelitian migrasi yang ada hanya mengkaji dampak dan sebab migran melakukan migrasi, yang hasilnya sangat kental dengan persoalan-persoalan ekonomi dan kurang menyentuh dimensi sosialnya. Padahal mobilitas penduduk/migrasi tidak bisa lepas dengan persoalan-persoalan sosial. Maka aspek-aspek sosial juga menjadi permasalahan tersendiri dari penelitian migrasi.

Kepada pemerintah, agar diupayakan penyusunan strategi kebijakan penataan kependudukan, strategi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pengembangannya, yakni sistem informasi kesempatan kerja, jaringan sosial dan jaminan sosial daerah potensi *boro* kepada calon-calon *boro* (masyarakat pedesaan) dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan, persoalan mobilitas penduduk dan gejala sosial bagi masyarakat pedesaan, mengingat masalah ini di Indonesia sangat mendesak lebih-lebih dalam menghadapi krisis multi-

vertikal bahwa pelaku *boro* status sosialnya lebih tinggi dari pada warga masyarakat yang tidak melakukan *boro*.

Sedangkan implikasi terhadap falsafah hidup jawa “*mangan ora mangan anggere kumpul*” (makan tidak makan asalkan berkumpul) adalah bahwa tindakan *boro* mampu mempengaruhi masyarakat desa dari berpikir irrasional menjadi berpikir rasional. Aliran irasional mengatakan bahwa “*mangan ora mangan anggere kumpul*” mereka ini tetap tinggal di desa tidak *boro* dan tidak berani meninggalkan falsafah hidup jawa tersebut. Sedangkan aliran rasional mengatakan bahwa “*kumpul ora bakal mangan menowo ora obah*” (berkumpul tidak akan makan jika tidak bekerja) mereka ini rela meninggalkan desa, anak-anak dan keluarganya untuk melakukan *boro*. Dengan kata lain bahwa falsafah hidup jawa tersebut sudah ditinggalkan oleh pelaku *boro*.

Kedua, terkait dengan kajian yang dikemukakan oleh Husserl di atas maka implikasi dari temuan penelitian ini bahwa tidaklah berlebihan jika analisis terhadap masyarakat yang melakukan *boro* tersebut sudah dapat dikatakan mempunyai tingkat kesadaran tetap yang dinamis dalam keinginan dan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kajian selanjutnya merujuk pada perilaku *boro* yang dimaknai sebagai suatu proses kesadaran yang berkelanjutan (*ego transcendental*) menuju pada keinginan dan kebutuhan untuk melakukan perubahan hidup.

Ketiga, terkait dengan banyak faktor yang mendasari tindakan seseorang melakukan *boro* (faktor ekonomi dan non-ekonomi) dan banyak makna seseorang melakukan *boro* (makna ekonomi, makna kesadaran jaringan sosial dan makna kesadaran jaminan sosial, makna kesadaran religiusitas, makna kesadaran ilmu pengetahuan dan meningkatkan status sosial), maka implikasi hasil penelitian ini adalah memodifikasi teori migrasi kuantitatif Everett S. Lee yang dilihat sebagai realitas objektif menjadi teori migrasi yang kualitatif yang dilihat sebagai realitas subjektif. Implikasi hasil penelitian ini sama sekali tidak menolak teori migrasi Lee yang kuantitatif tetapi lebih pada menambah khasanah teori migrasi yang telah ada. Harapan dari penelitian ini terhadap kajian-kajian migrasi selanjutnya bisa sampai pada kajian kuantitatif-kualitatif.

perkembangan masyarakat dengan karya keduanya berjudul *Sistem of Positive Politics*, dalam karya yang kedua ini ia mengusulkan “politik positif” itu didasarkan pada gagasan bahwa kekuatan yang sebenarnya yang mendorong seseorang dalam kehidupannya adalah perasaan, bukan pertumbuhan intelegensi manusia yang mantap. Dalam beragama Comte mengembangkan agama yang baru “agama humanitas” Comte, pendiri aliran filsafat positivisme, dengan tiga ajaran yang terkenal yang disebut “hukum tiga tahap” (*law of three stages*).

Melalui hukum inilah ia menyatakan bahwa sejarah manusia baik secara individu maupun kelompok telah berkembang menurut tiga tahap, yakni; (1) tahap teologi atau fiktif, (2) tahap metafisik atau abstrak, dan (3) tahap positif atau ilmiah/riil. (Koento Wibisono, 1982:11-16)

Tahap Teologi atau Fiktif. Tahap ini merupakan tahap awal setiap perkembangan jiwa atau masyarakat. Dalam tahap ini manusia selalu berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada. Gejala atau fenomena yang menarik perhatian manusia, olehnya selalu dikaitkan dengan atau diletakkan dalam konteksnya dengan sesuatu yang mutlak. Karena itu, dalam tahap ini manusia selalu berusaha untuk mempertanyakan hal-hal yang paling sukar, sejalan dengan tingkah laku dan perbuatannya, yang karena praintuisinya menganggap bahwa hal-hal yang paling sukar tadi harus dapat diketahui dan dikenalnya. Menurut Comte, tahapan teologi ini tidak akan muncul begitu saja melainkan didahului pula oleh suatu perkembangan secara bertahap pula yaitu; tahap fetisyisme, politeisme, monoteisme.

Fetisyisme adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang didasari oleh pemikiran-pemikiran yang mempunyai anggapan bahwa segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia (gunung, kali, pohon, batu, patung cincin dan lain-lain) mempunyai suasana kehidupan yang sama seperti manusia, dan akan mempunyai pengaruh dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, bahkan akan menentukan terhadap kehidupan manusia.

Politeisme adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang didasari oleh pemikiran-pemikiran yang mempunyai anggapan bahwa

daya pengaruh atau kekuatan penentu itu tidak lagi berasal dari benda-benda yang berda di sekeliling manusia, melainkan berasal dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang berada di sekeliling manusia. Karena itulah, maka sekarang, segala pikiran, tingkah laku dan perbuatan manusia harus disesuaikan serta diabdikan kepada keinginan para makhluk yang tidak kelihatan tadi. Dalam bentuk kehidupan semacam inilah, kepercayaan timbul bahwa setiap benda, setiap gejala dan peristiwa alam dikuasai dan diatur oleh dewanya masing-masing, sehingga demi kepentingan dan keselamatan dirinya, manusia harus mengabdikan dan menyembah para dewa tadi melalui upacara-upacara ritual.

Monoteisme, yaitu suatu bentuk kehidupan masyarakat yang didasari oleh pemikiran-pemikiran yang mempunyai anggapan bahwa pengaruh dan kekuatan penentu itu tidak lagi berasal dari dewa-dewa yang menguasai dan mengatur benda-benda atau gejala-gejala alam, melainkan berasal dari satu kekuatan mutlak, adikodrati, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan merupakan satu-satunya penentu, sebab pertama dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada, sehingga dengan demikian segala pikiran, tingkah laku dan perbuatan manusia selalu diorientasikan kepada Tuhan, sejalan dengan dogma-dogma agama yang dianut manusia.

Tahap Metafisik atau Abstrak. Dengan berakhirnya tahap monotesisme, berakhir pulalah tahap teologi atau fiktif. Ini disebabkan karena orang mulai merubah cara-cara berfikirnya, dalam usahanya untuk mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gejala-gejala alam. Dogma-dogma agama ditinggalkan, kemampuan akal budi dikembangkan.

Tahap metafisik menurut Comte merupakan tahap peralihan seperti dialami oleh perkembangan dan pertumbuhan seseorang dari masa kanak-kanak remaja dewasa tua. Sehingga tahap metafisik dalam perkembangan jiwa manusia merupakan tahap yang akan menghantarkan perubahan yang amat mendasar, karena tahap metafisik merupakan masa peralihan yang akan mengantarkan jiwa manusia menuju ke perkembangan yang paling akhir, pada saat inilah istilah ontologi mulai dipergunakan, dan yang akan terjadi pada tahap

sangat dominan mendorong warga masyarakat “kuli setengah kenceng” melakukan *boro* atau migrasi sirkuler.

Dikatakan modifikasi teori migrasi Lee karena penelitian ini dilakukan dengan memahami sesuatu di balik tindakan *boro* dengan melakukan kajian alasan di balik tindakan *boro*, proses *boro* dan maknanya. *Boro* yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak hanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ekonomi rasional yang disebabkan oleh kesenjangan daerah asal dan daerah tujuan saja atau kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan semata. Banyak faktor non-ekonomi yang mempengaruhi seseorang melakukan *boro*, di antara faktor non ekonomi tersebut adalah hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang terjalin dalam masyarakat desa. *Boro* dilakukan dengan mengikuti anggota keluarga yang telah melakukan *boro* sebelumnya, atau sebaliknya anggota keluarga yang telah berhasil sebagai *boro* kemudian mengajak anggota keluarga (kerabat) untuk ikut melakukan *boro*. Selain itu, *boro* juga dilakukan dengan tujuan menambah wawasan/ilmu pengetahuan dan status sosial, *boro* dilakukan karena adanya kesadaran jaringan sosial, kesadaran jaminan sosial, kesadaran melaksanakan perintah agama (religiusitas).

Dengan kata lain, asumsi Lee dengan teori dorong-tariknya (*push-pull theory*) tidak sepenuhnya mampu menjelaskan fenomena *boro* masyarakat desa, banyak faktor yang tidak disebut oleh Lee sebagai faktor pendorong *boro* (migrasi) justru menjadi faktor penting mendorong terjadinya *boro* sebagaimana tersebut di atas.

E. Implikasi Temuan Penelitian *Boro*

Pertama, *boro* yang dilakukan oleh masyarakat kuli setengah kenceng sebagaimana diuraikan di atas berimplikasi bahwa fenomena *boro* oleh masyarakat kuli setengah kenceng dapat menjadi alat “mobilitas vertikal” untuk menjadi “elite”. Mobilitas vertikal ini tidak hanya didorong keberhasilan individu pelaku *boro* tetapi juga oleh pandangan masyarakat desa yang melihat pelaku *boro* memiliki status sosial lebih tinggi dari pada anggota masyarakat yang tidak *boro*. Dengan kata lain, ada konstruksi sosial yang turut mendorong mobilitas

ada, terdapat tiga *strategi survival* yaitu; (1) menjadi bagian dari masyarakat dan tetap tidak melakukan mobilitas, (2) melawan (resistensi), dan (3) membentuk jaringan, akomodatif, memelihara keharmonisan keluarga, dan kemudian memilih meninggalkan desanya.

D. Modifikasi Teori Migrasi Everett S. Lee

Di antara teori besar (*grand theory*) dalam membahas migrasi adalah teori dorong tarik (*push-pull theory*) yang dikemukakan oleh Everett S. Lee. Teori ini mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu: (1) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal (2) faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan (3) faktor rintangan dan (4) faktor pribadi. Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negatif atau bersifat netral. Faktor-faktor di daerah asal dikatakan positif kalau sifatnya mendorong migrasi, dan negatif kalau menghambat migrasi, serta netral kalau tidak berpengaruh terhadap migrasi. Sedangkan faktor-faktor di daerah tujuan dikatakan positif kalau menarik migrasi, negatif kalau menghambat migrasi, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migrasi.

Penelitian Lee ini kemudian melahirkan banyak kritik. Utamanya disebabkan oleh penjelasannya yang hanya mendasarkan pada fenomena objektif (material) dan mengabaikan fenomena subjektif (non material). Lee hanya menerangkan hubungan kausal dan tidak sampai pada alasan di balik tindakan. Asumsi ekonomi yang digunakannya hanya sebatas asumsi ekonomi rasional yang melihat migrasi dari sisi kesenjangan ekonomi daerah asal dan daerah tujuan atau ketimpangan hubungan desa-kota.

Penelitian terhadap *boro* masyarakat desa ini memodifikasi terhadap teori migrasi Lee tersebut, disebut modifikasi karena fenomena *boro* (migrasi) dalam masyarakat desa tidak hanya di dasarkan atas fenomena objektif (material), hubungan kausal (*push-pull*), dan faktor kesenjangan ekonomi daerah asal dan daerah tujuan saja, tetapi juga didasarkan atas fenomena subjektif, faktor-faktor non-ekonomi juga ikut mempengaruhi, bahkan faktor non-ekonomi tersebut

peralihan ini jiwa manusia akan mengalami konflik, di sinilah kemudian peran akal budi untuk menjelaskan adanya sesuatu. Bukan lagi kekuasaan *magic* yang menentukan melainkan analisis fikir untuk menemukan hakekat sehingga ditemukan adanya tingkatan atau urutan dari yang ada.

Kemudian akan dibedakan antara ada secara natural dan ada secara supranatural, dunia fisik dengan metafisik, antara ontologi yang menggambarkan struktur ada yang alamiah dan metafisik yang menceritakan struktur ada yang supranatural. Sejalan dengan itu apa yang dinyatakan ada adalah yang abstrak, substansial, jauh, dan tertutup dari subjek (manusia) yang telah menentukan identitas dirinya.

Tahap Positif atau ilmiah/riil. Manusia tidak lagi puas dengan yang abstrak, lalu manusia lebih dekat dengan hal-hal yang dapat dijelaskan melalui pengamatan seperti hukum gravitasi. Pada saat itulah perkembangan jiwa manusia tiba pada tahapan yang paling akhir yaitu tahap positif, riil, di atas pandangan ilmiah yang matang, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan metafisik. Menurut Comte tahap ini sebagai tahap perkembangan masyarakat yang akan diatur oleh kaum elit cendekiawan dan industrialis dengan rasa perikemanusiaan sebagai dasar untuk mengatur kehidupan ini. Menurut Comte, pada tahap positif ini sebagai tahap perkembangan masyarakat pada saat industrialisasi sudah dapat dikembangkan, disertai peranan kaum elit cendekiawan dan industrialisasi yang bersama-sama mengatur masyarakat secara ilmiah

Catatan: Apabila dalam tahap teologi kesatuan keluarga merupakan dasar bagi kehidupan masyarakat sedangkan dalam tahap metafisik negara yang merupakan dasar, maka akhirnya dalam tahap positif ini, seluruh umat manusialah yang merupakan dasar itu.

Ajaran pokok Comte antara lain bahwa ia selain mengembangkan hukum tiga tahap (teologis, metafisis, dan positif), Comte membedakan sosiologi ke dalam statika sosial dan dinamika sosial. Selain itu, ia juga menawarkan tentang gejala sosial dapat dipelajari secara ilmiah melalui metode-metode pengamatan, percobaan, perbandingan dan sejarah. Ajaran yang lain Comte adalah

fakta kolektif historis dan masyarakat terikat pada hukum-hukum tertentu dan tidak pada kehendak manusia.

Sumbangan Comte. Sumbangan Comte terhadap perkembangan sosiologi/sosiologi pendidikan adalah Comte secara kreatif menyusun sintesa dari banyak aliran pemikiran yang bertentangan yang sudah dikembangkan orang lain, ia mengusulkan ilmu masyarakat (sosiologi) dengan dasar empirik yang kuat, ia juga memusatkan perhatiannya pada tingkat cultural kenyataan sosial. Sumbangan Comte yang khas terhadap perkembangan sosiologi/sosiologi pendidikan adalah sintesa dua perspektif yang saling bertentangan mengenai keteraturan sosial yakni “positivisme” dan “organisme”. Positivisme menerima dengan sepenuhnya pandangan dunia ilmiah berdasarkan hukum-hukum alam, serta strategi untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan masyarakat. Orang positivis percaya bahwa hukum-hukum alam yang mengendalikan manusia dan gejala sosial dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan sosial dan politik untuk menyelaraskan institusi-institusi masyarakat dengan hukum-hukum itu. Hasilnya akan berupa suatu masyarakat di mana penalaran akal budi akan menghasilkan kerjasama dan di mana takhayul, ketakutan, kebodohan, paksaan dan konflik akan dilenyapkan. Titik pandang ini sangat mendasar dalam gagasan Comte mengenai kemajuan yang mantap dari positivisme.

2. Emile Durkheim

Sosiologi lahir di tengah-tengah persaingan pengaruh antara 2 ilmu yaitu filsafat dan psikologi, oleh karena itu tak heran kalau pengaruh kedua cabang ilmu itu masih saja terasa sampai saat ini. Emile Durkheim sebagai perintis sosiologi lahir tahun 1858, sebagaimana dijelaskan oleh George Ritzer (1980: 4) adalah orang pertama yang mencoba melepaskan sosiologi dari dominasi kedua kekuatan yang mempengaruhinya itu yakni melepaskan sosiologi dari alam filsafat positif Auguste Comte untuk kemudian meletakkan sosiologi ke atas dunia empirik dan melepaskan diri dari psikologi. Dua karya besar Durkheim yakni; *Suicide* (1951) adalah hasil karya yang di dasarkan

kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya, *boro* sebagai pedagang dikaitkan dengan pekerjaan Nabi bahwa pada masa hidupnya beliau bekerja sebagai pedagang, berdagang merupakan sebuah simbol dalam melaksanakan ajaran agama, hal ini berarti bahwa *boro* memiliki makna kesadaran religiusitas.

c. Makna Kesadaran Jaminan Sosial

Boro dengan mengikuti anggota keluarga yang telah melakukan *boro* atau sebaliknya *boro* yang sukses di daerah tujuan mengajak anggota keluarga lain di daerah asal untuk melakukan *boro* menunjukkan *boro* memiliki makna kesadaran jaringan sosial, sedangkan *boro* yang dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan kesehatan anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan menunjukkan *boro* memiliki makna kesadaran jaminan sosial.

d. Makna Kesadaran Ilmu Pengetahuan dan dan Status Sosial

Selain itu, *boro* ingin mencari ilmu (pengalaman) yang dikaitkan dengan figur Hamka yang meninggalkan kota Minang ke Jakarta dengan tujuan ingin menuntut ilmu kemudian beliau menjadi ulama dan intelektual yang sangat dikagumi dan dihormati menunjukkan *boro* memiliki makna kesadaran ilmu pengetahuan dan status sosial dalam *boro*.

3. Sosiologi Boro

Struktur masyarakat desa di samping dipengaruhi oleh struktur pemilikan tanah juga dipengaruhi oleh struktur status sosial, artinya; partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih dikaitkan dengan struktur masyarakat desa yakni struktur status sosial. Orang yang memiliki status sosial tinggi mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan seseorang yang berstatus sosial rendah. *Boro*, oleh masyarakat desa ini digolongkan sebagai anggota masyarakat yang memiliki status sosial lebih tinggi dibanding dengan anggota masyarakat yang tidak *boro* (tetap tinggal di desanya). Karena status sosial *boro* lebih tinggi dengan anggota masyarakat yang tidak *boro*, maka *boro* dikenakan sumbangan wajib pembangunan desa lebih besar dari pada anggota masyarakat yang tidak *boro*.

Di samping itu struktur masyarakat tersebut masing-masing memiliki *strategi survival* dalam menghadapi situasi dan kondisi yang

Ketiga, proses *boro* juga tidak bisa mengabaikan keberadaan *boro* lama bahwa *boro* lama menjadi sumber informasi yang berharga bagi pelaku *boro* yang baru. Sekalipun calon *boro* di daerah asal telah menerima dan mempertimbangkan berbagai informasi mengenai daerah tujuan *boro*. Informasi yang positif dari *boro* yang terdahulu tentang peluang kerja, tempat tinggal sementara, dan hasil yang memadai akan menjadi pertimbangan seseorang untuk melakukan *boro*. Sebaliknya, jika informasi yang diterima negatif maka akan mempengaruhi mereka untuk tidak melakukan *boro*.

Keempat, proses penyesuaian diri *boro* di tempat *boro* tidak lepas dari keberadaan *boro* terdahulu, khususnya dalam hal informasi mengenai adat istiadat, norma atau kebiasaan masyarakat sekitar. Adaptasi *boro* terhadap lingkungan tempat *boro* menjadi sangat penting mengingat mereka memasuki kondisi sosial baru yang berbeda dengan daerah asal. Aktivitas seorang *boro* dalam organisasi-organisasi keagamaan, kesukuan, asosiasi pekerjaan dan perdagangan akan sangat membantu pelaku *boro* dalam memperlancar usaha (kegiatan ekonomi) dan mempermudah melakukan sosialisasi (penyesuaian diri) dengan lingkungan yang baru.

2. Konstruksi Sosial Makna *Boro*

Boro memiliki banyak makna (*meaningfull*), tidak hanya makna ekonomi (materi) tetapi juga makna non-ekonomi seperti makna kesadaran religiusitas, makna kesadaran jaringan sosial dan makna kesadaran jaminan sosial, makna kesadaran ilmu pengetahuan dan status sosial.

a. Makna Ekonomi

Boro yang dilakukan dengan maksud merubah kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan agar menjadi lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, kesehatan dan lain sebagainya menunjukkan makna ekonomi dalam *boro*.

b. Makna Kesadaran Religiusitas

Selain makna ekonomi tersebut di atas, *boro* juga memiliki makna lain yaitu *boro* ingin merubah nasib yang dikaitkan dengan keyakinan agama bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum

atas hasil penelitian empiris terhadap gejala bunuh diri sebagai suatu fenomena sosial, dan *The Rule of Sociological Method* berintikan konsep-konsep dasar tentang metode yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian empiris dalam lapangan sosiologi.

Durkheim merupakan salah seorang peletak dasar-dasar sosiologi modern, karena pemikirannya terpengaruh oleh tradisi para pemikir Perancis dan Jerman. Pandangan Durkheim tentang sosiologi; (1) Fakta sosial terdiri dari dua macam yaitu dalam bentuk material dan non material (2) Ide atau gagasan tidak dapat dijadikan sebagai objek riset, ide hanya berfungsi sebagai suatu konsepsi dalam pikiran dan tidak dapat dipandang sebagai barang sesuatu. Berbeda dengan Comte yang menempatkan dunia ide sebagai pokok persoalan studi sosiologi. (3) membangun suatu konsep dari fakta sosial dan fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. (4) Fakta sosial dinyatakan sebagai bahan sesuatu yang berbeda dengan ide (5) Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan (6) solidaritas sosial dan integrasi merupakan permasalahan substantif yang diperhatikan dalam karya utamanya, kemudian analisisnya harus didasarkan pada data empiris, dan data ini harus mengenai masyarakat atau struktur sosial itu sendiri, bukan data individual.

Disamping itu pandangan-pandangan Durkheim tentang sosiologi adalah (1) Sependapat dengan pandangan Montesquieu bahwa gejala-gejala sosial merupakan jenis tersendiri, juga sependapat tentang morfologi sosial dan metode perbandingan, (2) Sependapat dengan Rousseau bahwa orang-orang memerlukan aturan kolektif bagi perilaku mereka, yang mereka interaksikan dalam proses pendidikan (3) Memandang De Saint Simon sebagai orang yang meletakkan dasar metode positivisme, pelopor industrialisme, dan pembagian kerja yang selanjutnya menjadi tema penting dalam karya Durkheim (4) Memuji Aguste Comte atas penekanan pada sifat khas masalah sosial dan kesatuan metode dalam berbagai ilmu. Semua pengaruh ini diolah dengan kreatif oleh Durkheim sehingga sumbangnya sangat mengesankan dan berpengaruh besar terhadap sosiologi abad ke-20. (Indiatio M. 2004: 17)

Fakta sosial menurut Durkheim ada dua yaitu (1) bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi, merupakan bagian dari dunia nyata (*External World*). Contoh: arsitektur dan norma hukum, (2) bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (*external*), merupakan fenomena yang bersifat *inter subjective* yang hanya muncul dari kesadaran manusia. Contoh: egoisme, altruisme dan opini

Durkheim tidak menyatakan bahwa fakta sosial itu selalu berbentuk barang sesuatu yang nyata (*material thing*), sebagian merupakan sesuatu yang dianggap sebagai barang sesuatu, beberapa fakta sosial seperti arsitektur, norma hukum adalah merupakan barang sesuatu yang berbentuk material, alasannya karena dapat disimak dan diobservasi. Sedangkan fakta sosial yang lain seperti opini hanya dapat dinyatakan sebagai barang, sesuatu, tidak dapat dirancang adanya hanya dalam kesadaran manusia. Kedua macam fakta sosial itu adalah sama-sama nyata (*external*) bagi individu dan berpengaruh terhadap mereka. Fakta sosial yang berbentuk material mudah dipahami, norma hukum misalnya jelas merupakan barang sesuatu yang nyata ada dan berpengaruh terhadap kehidupan individu begitu pula arsitektur. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana fakta sosial non material dinyatakan (dijelmakan) oleh individu dan mempengaruhi mereka.

Durkheim dua tipe utama solidaritas, yaitu (1) Solidaritas Mekanis dan, (2) Solidaritas Organik. Solidaritas mekanis adalah tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan, bisa dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana dan mempunyai struktur sosial yang bersifat segmenter. Struktur sosial ini terdiri atas segmen-segmen yang homogen dan kurang menunjukkan keterpaduan satu sama lain. Apabila suatu segmen hilang, maka kehilangan ini boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap keseluruhan struktur masyarakat. Dalam masyarakat ini, semua anggotanya mempunyai kesadaran kolektif yang sama.

Solidaritas organik adalah merupakan sistem terpadu dalam organisme yang di dasarkan atas keragaman fungsi-fungsi demi kepentingan keseluruhan. Setiap organ memiliki ciri-cirinya masing-masing yang tidak dapat diambil alih oleh orang lain. Berlawanan

berhasil, atau sebaliknya orang yang telah sukses di daerah tujuan mengajak kerabatnya (*family*) untuk ikut melakukan *boro* menunjukkan bahwa proses *boro* berkaitan erat dengan kesadaran jaringan sosial atau kedekatan dengan orang yang telah *boro* dan sukses di daerah tujuan. Sedangkan proses *boro* yang dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan keluarga (istri dan anak-anak) yang ditinggalkan menunjukkan bahwa *boro* berkaitan erat dengan kesadaran jaminan sosial.

Konstruksi sosial proses *boro* sebagai mobilitas penduduk dan gejala sosial pada dasarnya menerangkan bahwa; *Pertama*, *boro* dilakukan dengan mengikuti orang yang sudah lama *boro* dan berhasil atau sebaliknya orang yang telah *boro* dan sukses di daerah tujuan mengajak kerabatnya (*family*) untuk ikut melakukan *boro*. Dengan kata lain, orang yang melakukan *boro* memiliki kesadaran jaringan sosial atau kedekatan dengan orang yang telah *boro* dan sukses di daerah tujuan dan memiliki kesadaran jaminan sosial yakni jaminan keamanan dan kesehatan bagi anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Proses *boro* seperti ini menggunakan “sistem siklus” yang teratur dan hubungan “sepesukuan”. Sistem siklus dan hubungan sepesukuan ini menjelaskan bahwa *boro* dilakukan dengan mengikuti orang yang telah *boro* antara *boro* yang lama dengan *boro* yang baru masih memiliki hubungan keluarga atau sedesa.

Kedua, proses pengambilan keputusan seseorang melakukan *boro* selain adanya kesadaran keuntungan ekonomi juga tergantung pada ada dan tidaknya kesadaran jaringan sosial dan kesadaran jaminan sosial. Adanya jaringan dengan kerabat yang telah lebih dulu berada di tempat *boro* akan meningkatkan motivasi dan keberanian seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya karena mereka diharapkan bisa menolong mencarikan pekerjaan di tempat *boro* dan memberikan bantuan ekonomi, tempat tinggal pada hari-hari pertama di daerah *boro*. Begitu juga adanya jaminan keamanan dan jaminan kesehatan bagi anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan juga akan meningkatkan motivasi dan keberanian seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya (meningkatkan dorongan mereka melakukan *boro*).

mendapatkan pekerjaan, rendahnya upah, terbatasnya lahan pertanian, rendahnya harga hasil pertanian di daerah asal, *boro* demi masa depan anak-anak (*boro* untuk membiayai sekolah anak-anaknya). Pada sisi lain *boro* bertindak karena alasan non ekonomi, mereka melakukan *boro* karena adanya “kesadaran” yakni kesadaran jaringan sosial dengan orang yang sedang *boro*, *boro* juga memiliki kesadaran jaminan sosial seperti jaminan keamanan dan jaminan kesehatan bagi keluarga yang ditinggalkan, *boro* ingin merubah nasib yang dikaitkan dengan perintah agama, *boro* ingin mencari pengalaman dan meningkatkan status sosial di desanya.

Selain itu, *boro* dianggap sebagai alat yang mampu mendorong mobilitas vertikal untuk menjadi elite masyarakat atau tokoh masyarakat. Mobilitas vertikal ini tidak hanya didorong orang keberhasilan individu pelaku *boro* tetapi juga oleh pandangan masyarakat desa yang melihat bahwa pelaku *boro* memiliki status sosial lebih tinggi dibanding dengan anggota masyarakat yang tinggal di desanya (yang tidak melakukan *boro*).

Dengan kata lain, ada konstruksi sosial yang turut mendorong mobilitas vertikal tersebut yakni pandangan pelaku *boro* dan masyarakat desa yang memosisikan pelaku *boro* lebih tinggi status sosialnya dibanding dengan anggota masyarakat yang tidak melakukan *boro* (tinggal di desa). Hal ini dapat dilihat dari sumbangan wajib pembangunan jalan desa yang dikenakan bagi pelaku *boro* lebih besar dibanding anggota masyarakat yang tidak *boro*. Begitu juga dalam setiap acara (kegiatan) sosial seperti *mantenan* atau *hajatan*, pelaku *boro* mendapat hak istimewa dengan duduk di baris paling depan dan mendapat pelayanan berbeda dari anggota masyarakat yang tidak *boro*.

1. Konstruksi Sosial Proses *Boro*

Proses *boro* menggunakan “sistem siklus” yang teratur dan hubungan “sepesukuan”. Sistem *boro* seperti ini menjelaskan bahwa *boro* dilakukan dengan mengikuti orang yang telah *boro* berhasil, antara *boro* yang baru dengan *boro* yang lama masih memiliki hubungan keluarga atau sedesa, dan sebaliknya orang yang telah sukses di daerah tujuan mengajak kerabatnya (*family*) untuk ikut melakukan *boro*.

Proses *boro* dengan mengikuti orang yang sudah lama *boro* dan

dengan masyarakat segmenter, maka di dalam masyarakat solidaritas organis terdapat saling ketergantungan yang besar sehingga mengharuskan adanya kerjasama. Berbeda dengan solidaritas mekanis yang didasarkan pada hati nurani kolektif, solidaritas organis didasarkan pada hukum dan akal.

Selain Comte (*positivisme dan organisme*) dan Durkheim (*struktur fungsional*), ada pemikir lain tentang teori sosiologi, yaitu Karl Marx (*konflik dan kekuasaan*) dan Max Weber (*tindakan sosial dan birokrasi rasional*). Seorang tokoh peralihan, yang mewakili pemikiran yang matang dari zaman perpecahan abad ke-18 adalah Adam Smith (*individualisme ekonomi*) mengemukakan dalam konsepnya tentang “tangan tersembunyi” (*invisible hand*), gagasan tentang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Akhirnya karya Alfred Schutz (*fenomenologi*) yang dicakup sebagai inspirasi perkembangan tertentu baru-baru ini dalam studi tentang masyarakat (khususnya fenomenologi) yang menghasilkan gagasan tentang 'masyarakat' sebagai kajian tentang makna, ide, dan interpretatif.

Berbeda dengan filsafat Aristoteles yang bersifat (*naturalistik dan teologis*). Aristoteles bukan sosiolog tetapi sebagai perintis filsafat “Aristotelian”. Pandangannya tentang manusia bahwa manusia adalah seekor hewan sosial, yakni bahwa ia tidak bisa hidup terus di luar sebuah kelompok sosial.

C. Masyarakat dan Proses Sosial

1. Interaksi Sosial

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial, makhluk yang berpikir, makhluk yang *instability*. Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup berkelompok atau senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lain, makhluk yang mampu berpikir untuk melakukan sesuatu, makhluk yang harus diajarkan sesuatu agar mampu bersosialisasi. Dari proses berpikir muncul perilaku atau tindakan sosial. Kalau perilaku dan tindakan sosial tersebut dilakukan dalam hubungan dengan orang lain maka terjadilah interaksi sosial. (Jabal Tarik Ibrahim, 2002: 10). Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan sosial tidak bisa lepas dengan

interaksi sosial. Interaksi sosial ini juga dapat dinamakan proses sosial, oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok-kelompok manusia (Gillin Gillin 1954: 489 dalam Soerjono Soekanto, 1986: 51). Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai, pada saat itu mereka saling berkomunikasi baik secara lisan maupun isyarat atau simbol, aktivitas-aktivitas itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial.

Terdapat beberapa macam interaksi sosial. Dilihat dari sudut subjeknya, interaksi sosial ada 3 macam interaksi sosial (1) Interaksi antar orang perorangan (2) Interaksi antar orang dengan kelompoknya atau sebaliknya (3) Interaksi antar kelompok. Dilihat dari segi caranya ada 2 yaitu; (1) Interaksi langsung (*direct interaction*) yaitu interaksi fisik, seperti berkelahi, hubungan seks dan sebagainya (2) Interaksi simbolik (*symbolic interaction*) yaitu interaksi dengan menggunakan bahasa/isyarat. (Ary H. Gunawan, 2000: 22)

Dilihat dari prosesnya interaksi sosial dibagi menjadi 4 yaitu: (1) Kerjasama (*cooperation*) (2) Persaingan (*competition*) (3) Pertikaian (*conflict*) (4) Akomodasi (*accommodation*) (5) Assimilasi (*assimilation*).

Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu interaksi (hubungan timbal balik) dari dan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama, misalnya; gotong-royong, berorganisasi, bergaining (perjanjian), MOU, hubungan patron-klien, hubungan simbiose-mutualistik, dan lain sebagainya.

Persaingan (*competition*) adalah suatu hubungan timbal-balik dari dan oleh dua orang atau lebih yang berlomba untuk mencapai tujuan yang sama, misalnya; UPNS (Ujian Pegawai Negri Sipil), UMPT (Ujian Masuk Perguruan Tinggi), Pileg (Pilihan Legislatif), Pilpres (Pilihan Presiden), dan lain-lain. Pertikaian (*conflict*) adalah perjuangan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-masing berkeinginan untuk mencapai keinginan bersama hal-hal yang sifatnya langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya.

tipologi migran berantai di mana seseorang yang telah berhasil di tempat tujuan kemudian menarik sanak-famili atau teman-temannya yang masih tinggal di daerah asal. Hal ini sesuai dengan temuan Harre, dalam Sutomo, (1993: 25) terhadap penelitiannya di Pulau Pitcairn, Selandia Baru, dijelaskan bahwa penelitian Lee sangat “deskriptif dan mengabaikan penjelasan”.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa penelitian Lee tentang migrasi sangat kuantitatif, dan hanya dilihat sebagai realitas objektif, padahal fenomena migrasi tidak bisa lepas dengan realitas subjektif. Fenomena migrasi ada sesuatu yang tersembunyi dibalik realitas objektif itu yaitu makna, makna migrasi ini yang belum dikaji oleh Lee. Oleh karena itu untuk menutupi kelemahan yang ada maka penelitian migrasi ini dilihat dari realitas subjektif, perspektif yang digunakan adalah perspektif fenomenologi.

C. Struktur Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil penelitian Tjipto Subadi (2004) yang berjudul; “*Boro: Mobilitas Penduduk Masyarakat Tegalombo Sragen*” disimpulkan bahwa setelah peneliti melakukan identifikasi struktur masyarakat desa, sebagaimana layaknya karakteristik daerah tradisional-agraris bahwa struktur masyarakat desa (Jawa) dipengaruhi oleh struktur kepemilikan tanah, srtuktur masyarakat desa terdiri dari; (1) kuli kenceng, (2) kuli setengah kenceng dan, (3) kuli ngindung.

Kuli kenceng adalah anggota masyarakat yang mempunyai tanah sawah, tanah pekarangan dan tanah tegalan. Kuli setengah kenceng adalah anggota masyarakat yang hanya memiliki tanah pekarangan dan tidak memiliki tanah sawah dan tanah tegalan. Sedangkan kuli ngindung adalah anggota masyarakat yang tidak memiliki tanah pekarangan, tanah sawah, dan tanah tegalan.

Dari ketiga struktur masyarakat tersebut di atas *boro* dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat “kuli setengah kenceng”. Para pelaku *boro* ini memiliki konstruksi sosial yang beragam berkaitan dengan alasan yang mendasari tindakan mereka melakukan *boro*, atau alasan mengapa mereka melakukan *boro*? Pada satu sisi, *boro* bertindak karena alasan ekonomi, mereka melakukan *boro* karena sulitnya a upah,

bahwa data-data angka dari hasil sensus, perlu diadakan pengecekan data di lapangan, hal ini dilakukan untuk menjaga validitas data, oleh karena itu penelitian yang hanya mengandalkan data sensus dan tidak diadakan pengecekan data di lapangan maka ini suatu kelemahan metode kuantitatif.

Pada sisi yang lain, penelitian kuantitatif seperti penelitian migrasi oleh Lee ini hanya menjelaskan fenomena objektif (material) dan tidak sampai memahami fenomena subjektif (non material) yaitu makna migrasi. Pusat perhatiannya hanya pada hubungan kausal dan tidak sampai pada alasan di balik tindakan. Paradigmanya sebatas pada positivisme dan sangat mengabaikan interpretivisme.

Kritik berikutnya pada kesimpulan bahwa; Penelitian Lee ini belum sampai pada kajian sosiologis dan mengabaikan dorongan sosiologis, barangkali karena memang penelitian Lee ini dirancang hanya akan melihat dorongan utama migrasi yakni dorongan ekonomi. Padahal motif ekonomi dan dorongan sosiologi orang melakukan migrasi sangat erat kaitannya, bahkan secara ekstrim keduanya tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian migrasi Lee belum sampai pada kajian sosiologis, dengan kata lain belum sampai pada tataran makna.

Kritik teori migrasi Lee juga disampaikan oleh Amin, dalam Mc Gee, 1977, dalam Abu-Lughod dan Hay, 1977, dalam Sutomo (1993: 24). bahwa, model tersebut menggunakan asumsi ekonomi rasional di mana keputusan migrasi diambil dengan dasar pengetahuan yang cukup tentang dua buah ubahan, yakni; kesenjangan pendapatan yang diperoleh pekerja di kota. Sedangkan kenyataan secara regional di Asia Tenggara menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan orang yang pindah ke kota dua-kali lipat dari tingkat pertumbuhan penduduknya, dan sesampainya di kota kebanyakan dari mereka hidup dalam keadaan kemiskinan dan kesengsaraan; sekalipun demikian terus berlangsung proses perpindahan.

Pendapat yang demikian ini juga ditunjang oleh beberapa penelitian lokal, di antaranya Mantra (1981: 163) yang mengungkapkan bahwa; pengambilan keputusan untuk migrasi sering berbentuk serial yang terkait dengan situasi yang memungkinkan, terutama untuk

Akomodatif (*accommodation*) adalah suatu aktivitas dua orang atau lebih yang saling berusaha mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi situasi yang kurang kondusif, seperti; sikap toleransi, sikap kompromi, arbitrase (perwasiatan), mediasi (penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga), dan lain sebagainya. Assimilasi (*assimilation*) adalah suatu hubungan dua kebudayaan/unsur kebudayaan yang berlainan kemudian menjadi saling mempengaruhi sehingga lahir kebudayaan baru hasil asimilasi tersebut, seperti tradisi selamatan kematian, aslinya tradisi tersebut tidak ada bacaan Al-Quran dan Tahlil sekarang tradisi tersebut ada bacaan Al-Quran dan Tahlil.

Untuk mempelajari lebih mendalam interaksi sosial digunakan pendekatan tertentu, yang dikenal dengan nama *interactionist perspective* (Douglas 1973). Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari interaksi sosial dijumpai pendekatan yang dikenal dengan nama *symbolic interactionism*. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran George Herbert Mead (seorang warga Amerika Serikat) awal abad ke sembilan belas yang sering dianggap sebagai sesepuh paling berpengaruh dari pendekatan interaksi simbolis ini. Mead setuju dan mengembangkan suatu kerangka yang menekankan arti penting perilaku terbuka (*overt*) atau objektif, dan tertutup (*covert*) atau subjektif di dalam aliran sosiologis (Margaret M. Poloma, 1992: 258). Psikologi-sosial Mead didominasi oleh pandangan yang melihat realitas sosial sebagai proses ketimbang sebagai sesuatu yang statis. Manusia maupun aturan sosial berada dalam proses akan jadi, bukan sebagai fakta yang sudah lengkap. Mead berkecimpung dengan masalah yang rumit yaitu bagaimana proses individu menjadi anggota organisasi yang kita sebut masyarakat. Dilihat dari istilahnya saja jelas bahwa dari kata *interaksionisme* sasarannya adalah interaksi sosial, sedangkan kata simbolis mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi.

Menurut Blumer (1969: 2) dalam Margaret M. Poloma, (1992: 261-269) menjelaskan bahwa interaksi simbolis bertumpu pada tiga premis;

a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.

- b. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain
- c. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Interaksi simbolik mengandung sejumlah ide-ide dasar antara lain;

- 1) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial
- 2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi non simbolik mencakup stimulus-respon yang sederhana. Interaksi simbolik mencakup “penafsiran tindakan”.
- 3) Objek-objek tidak mempunyai makna intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Objek-objek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu; objek fisik seperti meja, tanaman, bangunan; objek sosial seperti hubungan antara manusia; objek nilai seperti nilai, hak, peraturan.
- 4) Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai objek.
- 5) Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri.
- 6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota kelompok, hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai “organisasi sosial dari pelaku tindakan-tindakan berbagai manusia”

Konsep lain yang juga penting dipertimbangkan dalam interaksi sosial adalah konsep definisi situasi. Menurut W I Thomas (1968) seseorang tidak segera memberikan reaksi manakala ia mendapatkan rangsangan dari luar. Hal ini berbeda dengan pandangan yang mengatakan bahwa interaksi manusia merupakan pemberian tanggapan (*response*) terhadap rangsangan (*stimulus*). Artinya, tindakan seseorang selalu didahului dengan suatu tahap penilaian dan pertimbangan; rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang dinamakan definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini orang memberikan makna pada

terpencil. Hal ini akan terus berlangsung hingga daya tarik salah satu dari kota-kota yang bertumbuh cepat itu tahap demi tahap terasa pengaruhnya di pelosok-pelosok yang sangat terpencil, (c) proses penyebaran adalah kebalikan penyerapan dan memperlihatkan gejala-gejala yang sama.

- 3) Migrasi arus dan Migrasi arus balik. Setiap arus migran utama menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Dalam terminologi modern digunakan alir dan alir balik sebagai pengganti istilah Ravenstein arus dan arus balik.
- 4) Terdapat perbedaan antara desa dan kota mengenai kecenderungan melakukan migrasi. Penduduk kota kurang minatnya untuk migrasi jika dibandingkan dengan penduduk daerah-daerah pedesaan di suatu negara.
- 5) Wanita lebih suka migrasi ke daerah-daerah yang dekat. Para wanita yang pindah ke daerah yang dekat rupanya lebih besar jumlahnya daripada kaum laki-laki.
- 6) Mengikat teknologi dengan migrasi. Adakah migrasi meningkat? Saya yakin demikian. Dengan meningkatnya sarana perhubungan, perkembangan industri dan perdagangan, menyebabkan meningkatnya migrasi.
- 7) Motif ekonomi merupakan dorongan utama orang migrasi.

Undang-undang yang tidak baik atau menindas, pajak yang tinggi, iklim yang tidak menarik, lingkungan masyarakat yang tidak menyenangkan dan juga paksaan-paksaan (perdagangan budak, transportasi) semuanya itu dari dahulu sampai sekarang selalu menimbulkan arus migrasi, tetapi tak satupun dari arus-arus itu volumenya dapat dibandingkan dengan volume arus migran yang didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kehidupannya dalam bidang material.

2. Kritik Teori Migrasi Lee

Hasil penelitian Lee, pada satu sisi penelitian ini melihat migrasi hanya sebatas data angka-angka yang kebanyakan diambil dari data-data sensus, yang sifatnya kuantitatif, meskipun bagi aliran kuantitatif data-data sensus sudah dianggap valid, dan tidak diperlukan pengecekan data di lapangan. Padahal bagi aliran kualitatif melihat

keseimbangan (Mantra, 1987:140). Maslow, mengelompokkan kebutuhan dasar manusia dalam lima tingkatan (*live hierarchy of needs*) yang pemenuhannya secara bertahap, yakni: (1) Kebutuhan fisik atau biologis (*physiological needs*), (2) kebutuhan rasa tenang atau aman (*safety needs*), (3) kebutuhan rasa saling memiliki dan kasih sayang (*belongingness and love needs*), (4) kebutuhan harga diri (*esteem needs*). (5) kebutuhan untuk mengaktualisasi diri (*needs for self-actualization*).

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa yang mendorong untuk migrasi itu bukan faktor-faktor nyata yang terdapat di tempat asal dan tempat tujuan, tetapi persepsi seseorang terhadap faktor-faktor itu. Kepekaan pribadi, kecerdasan, kesadaran tentang kondisi di lain tempat mempengaruhi evaluasinya tentang keadaan di tempat asal; pengetahuan tentang keadaan di tempat tujuan tergantung pada hubungan-hubungan seseorang atau berbagai sumber informasi yang tidak tersedia secara umum. Lagi pula ada orang yang gigih menolak perubahan-perubahan, perubahan tempat tinggal maupun perubahan lainnya, ada pula orang yang menyambut dengan gembira perubahan itu. Untuk beberapa orang, harus ada alasan yang benar-benar memaksa untuk migrasi, sedang untuk orang lain dorongan sedikit saja atau janji sudah cukup.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian migrasi Lee ini adalah:

- 1) Migrasi berkait erat dengan jarak. (a) banyak migrasi hanya menempuh jarak dekat dan jumlah migran di suatu pusat yang dapat menampung migran-migran itu makin menurun karena makin jauhnya jarak yang ditempuh, (b) migran yang menempuh jarak yang jauh umumnya lebih suka menuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting.
- 2) Migrasi bertahap; (a) arena itu pada umumnya terjadi suatu perpindahan penduduk berupa arus migran terarah ke pusat-pusat industri dan perdagangan yang penting yang dapat menyerap para migran itu, (b) penduduk daerah pedesaan yang langsung berbatasan dengan kota yang bertumbuh cepat itu berbondong-bondong pindah ke sana. Turunnya jumlah penduduk di pedesaan sebagai akibat migrasi itu akan diganti oleh migran dari daerah-daerah yang jauh

rangsangan yang diterimanya. Sebagai contoh, seorang gadis menerima ucapan salam, selamat pagi, dari orang yang belum dikenal, maka ia tidak langsung membalas dengan selamat pagi pula, apalagi ada indikasi iktikat tidak baik, sehingga ia cenderung memberikan reaksi berupa tindakan yang sesuai dengan penafsirannya.

2. Perubahan Sosial

Setiap masyarakat di manapun mereka berada pasti mengalami perubahan, perubahan itu terjadi akibat adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok, akibatnya diantara mereka terjadi proses saling mempengaruhi yang mengakibatkan perubahan terjadi. Perubahan sosial tidak bisa kita elakkan, berkat kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa berbagai perubahan yang berupa antara lain perubahan norma, nilai, tingkah laku dan pola-pola tingkah laku individu maupun kelompok (organisasi), susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, kekuasaan, dan lain sebagainya.

William F. Ogburn dalam Idianto M. (2004: 86) mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik material maupun yang immaterial. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. Hans Garth & C. Wright Mills menjelaskan perubahan sosial adalah apapun yang terjadi (kemunculan perkembangannya, dan kemunduran), dalam kurun waktu tertentu terhadap peran, lembaga, atau tatanan yang meliputi struktur sosial.

Ada satu sisi pembahasan tentang arti perubahan sosial dalam arti luas dikemukakan oleh Wilbert Moore (1967: 3) dalam Robert H. Lauer (1993: 4) bahwa perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari struktur sosial” dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore memasukkan ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Perubahan sosial juga didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola

antar hubungan yang mapan dan standar perilaku. Perubahan sosial dipandang sebagai sebuah konsep yang serba mencakup, yang menunjuk kepada perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia. Berbagai tingkat perubahan yang mewakili kawasan analisis, dan satuan (unit) analisis yang mewakili setiap tingkat perubahan dikemukakan dalam gambar di bawah ini.

Pada sisi yang lain perubahan sosial menurut Jabal Tarik Ibrahim (2003: 123) menyangkut dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi kultural. Perubahan dimensi struktural menyangkut hubungan antar individu dan pola hubungan termasuk di dalamnya mengenai status dan peranan, kekuasaan, otoritas, hubungan antara status, integrasi, dan sebagainya. Perubahan dimensi kultural menyangkut nilai-nilai dan norma-norma sosial. Perubahan sosial dapat dilihat dalam kurun waktu tertentu, namun perubahan itu ada yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat dan lama.

Dalam teori sosiologi kita kenal teori evolusioner. Teori ini melihat bahwa perubahan sosial merupakan suatu proses dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perubahan yang sifatnya evolusi disebabkan oleh tambahan gradual dari ilmu baru. Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow juga dianggap merupakan bagian dari perubahan sosial yang bersifat evolusioner.

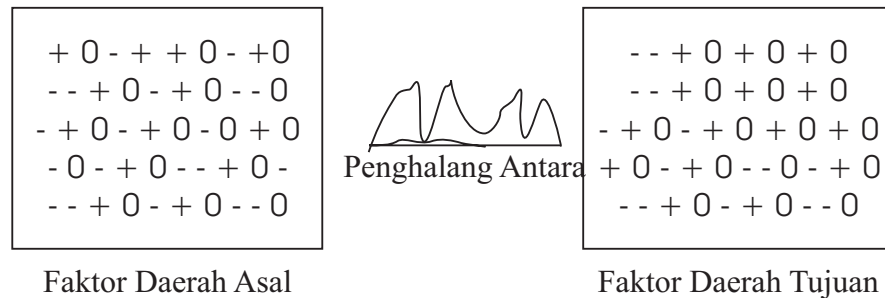
Dalam bingkai teori konflik, perubahan sosial merupakan wujud dari kehidupan masyarakat yang merupakan suatu arena perjuangan atau pergumulan untuk mendapatkan sesuatu. Perubahan dipandang sebagai proses intrinsik dalam masyarakat. Diferensiasi struktural dirasakan sebagai sumber konflik dan perubahan sosial terjadi hanya dengan melalui terjadinya konflik. Dalam teori konflik yang disampaikan Karl Marx dinyatakan bahwa konflik merupakan kondisi normal dalam kehidupan sosial yang sifatnya internal, dan antara konflik dengan perubahan dianggap tidak dapat dipisahkan. Konflik mempunyai efek positif dan negatif, bahkan konflik merupakan bagian dari proses sosialisasi, ia tak dapat dipungkiri sebab individu-individu memiliki kecenderungan mencintai dan membenci. Konflik tidak harus merusak atau disfungsi terhadap suatu sistem, karena itu konflik

Pengambilan keputusan apakah seseorang pindah ke daerah lain atau tetap tinggal di daerah tersebut bukan hanya tergantung pada perbedaan nilai faedah daerah-daerah tersebut melainkan juga tergantung pada seberapa besar faktor penghalang (*intervening obstacles*) ikut berpengaruh dalam merintangai seseorang untuk berhubungan dari daerah asal dengan daerah tujuan. Salah satu contoh faktor penghalang yang selalu ada dalam proses migrasi adalah faktor jarak. Seperti tanggapan pada faktor-faktor yang menentukan nilai kefaedahan suatu daerah di atas, tanggapan terhadap faktor penghalang antara inipun bervariasi berkaitan dengan tingkat sosial-ekonomi, karakteristik pribadi seseorang, dan lingkungan hidup (*life cycle*) (Sutomo, 1993: 30).

Akhirnya masih ada sebuah faktor lagi yang berpengaruh kepada seseorang yang akan melintasi ambang pintu untuk pindah, yaitu faktor pribadi. Faktor-faktor ini dapat mempermudah atau memperlambat proses migrasi. Kepekaan pribadi, kecerdasan, dan kesadaran tentang kondisi di lain daerah sangat berpengaruh hasil evaluasinya terhadap keadaan di daerah asalnya. Beberapa faktor pribadi ada yang agak tetap sepanjang hidup seseorang, sedangkan beberapa faktor lainnya sangat berhubungan dengan masa-masa perkembangan dalam lingkungan hidupnya. Suwarno (1986: 39) mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan migrasi faktor-faktor pribadi seperti sikap yang tertutup dan terpaku pada lokal tempat hidupnya (*localism attitude*) dan sikap yang menyenangi terhadap adanya perubahan-perubahan (*attitude toward change*) merupakan ubahan antara dalam proses migrasi.

Penjelasan mekanisme migrasi terkait dalam konsep pengambilan keputusan seseorang untuk pindah atau tetap tinggal di daerahnya dijelaskan oleh Mantra bahwa; para pakar demografi Mabogunje, 1970; Hugo, 1975; telah sependapat bahwa keputusan seseorang melakukan perpindahan dapat dilihat sebagai reaksi dari stres karena kebutuhan atau aspirasinya yang tidak terpenuhi di daerah asal. Lebih jauh dikemukakan bahwa stres merupakan aktivitas kejiwaan yang datang dari faktor luar atau faktor dalam yang mempengaruhi keputusan terhadap kebutuhan dasar atau yang mengganggu stabilitas

Teori Dorong-Tarik (*Push-Pull Theory*) Lee



Faktor-faktor itu terlihat dalam diagram sebagai tanda + (positif) dan - (negatif), faktor lain yang ditunjukkan dengan tanda 0 (netral) ialah faktor yang pada dasarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali pada penduduk. Beberapa faktor itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap beberapa orang, sedangkan ada faktor yang mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap seseorang. Pada gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa orang akan membuat kalkulasi kualifikasi faktor-faktor (+) dan faktor-faktor (-) untuk menentukan sesuatu daerah memuaskan atau tidak sehingga diperoleh nilai kefaedahan (*place utility*) daerah tersebut. Proses mobilitas akan terjadi apabila neraca perbandingan faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada keinginan berpindah lebih banyak dari pada faktor-faktor yang berpengaruh pada penghambat. Kedua faktor tersebut mempunyai peran yang berbeda dalam proses mobilitas. Faktor-faktor (+) di daerah asal berpengaruh sebagai penahan agar seseorang tetap tinggal di daerahnya, faktor-faktor (-) di daerah asal berpengaruh sebagai pendorong (*push factors*) agar seseorang pindah ke daerah lain, sebaliknya faktor-faktor (+) di daerah tujuan berpengaruh sebagai penarik (*pull factors*) agar seseorang melakukan pindah ke daerah tersebut, faktor-faktor (-) di daerah tujuan berpengaruh agar seseorang tidak datang di daerah tersebut, faktor-faktor (0) baik di daerah asal maupun di daerah tujuan merupakan faktor netral (*neutral factors*) yang berarti tidak berpengaruh dalam proses mobilitas.

dapat disebut sebagai sesuatu yang mengandung makna peningkatan perubahan sosial.

Teori struktural fungsional menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk atas substruktur-substruktur yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling bergantung sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam fungsi yang lain. Lebih lanjut, teori struktural fungsional menyatakan bahwa setiap substruktur yang telah mantap akan menjadi penopang aktivitas-aktivitas atau substruktur-substruktur lainnya dalam suatu sistem sosial.

Sosiologi juga mempelajari statika sosial dan dinamika sosial (Auguste Comte), termasuk perubahan sosial juga menjadi bahasan sosiologi. Ada beberapa teori perubahan sosial; (1) Teori Marx tentang perubahan sistem feodal, berubah menjadi kapitalis dan kemudian berubah menjadi sosialis, (2) Teori Weber mengenai munculnya kapitalisme dalam masyarakat feodal. (3) Teori Durkheim mengenai perubahan solidaritas mekanis menjadi organis. Namun demikian perhatian kita terpusat pada dinamika masyarakat atau perubahan sosial. Menurut para tokoh sosiologi klasik, seperti yang disampaikan Etzioni Halevy dan Etzioni (1973), perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola, yakni; (a) pola linier, (b) pola siklus dan (c) penggabungan kedua pola itu.

a. Pola Linier

Pola perkembangan linier menurut Comte adalah kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama dan tak terelakkan. Dalam teorinya yang terkenal dengan nama Hukum Tiga Tahap, artinya adanya tiga tahap yang dilalui peradaban, yakni; (1) Tahap Teologis dan Militer, (2) Tahap Metafisik dan Yuridis, (3) Tahap Ilmu Pengetahuan dan Industri.

Tahap teologis dan militer, semua hubungan sosial bersifat militer, sehingga masyarakat senantiasa bertujuan menundukkan masyarakat lain. Semua konsepsi teoritis dilandasi kekuatan adhiokrasi. Pengamatan dituntun oleh imajinasi; penelitian tidak dibenarkan. Tahap metafisik dan yuridis merupakan tahap penjembutan, pengamatan masih dikuasai imajinasi, tetapi lambat laun bisa menjadi dasar bagi penelitian. Sedangkan pada tahap

terakhir, yakni tahap ilmu pengetahuan dan industri sudah mendominasi hubungan sosial dan industri, yang menjadi tujuan utama masyarakat. Imajinasi telah tergeser oleh pengamatan dan konsepsi-konsepsi teoritis.

Dari apa yang dikemukakan Comte tersebut dapat kita lihat bahwa pandangannya mengenai perubahan sosial bersifat *unilinear*. Pemikiran *unilinear* juga kita jumpai dalam karya Spencer. Dia mengemukakan bahwa struktur sosial berkembang secara *evolusioner* dari struktur yang homogen menjadi heterogen. Suku yang sederhana bergerak maju secara *evolusioner* ke arah yang lebih maju sehingga tercipta suatu bangsa yang beradab.

b. Pola Siklus

Menurut pola siklus, masyarakat berkembang laksana suatu roda, kadang kala naik ke atas, kadang kala turun ke bawah. Kebudayaan berkembang dan pudar laksana perjalanan gelombang, yang muncul mendadak berkembang dan kemudian lenyap; ataupun laksana tahap perkembangan manusia - melewati masa muda, masa dewasa, masa tua, dan akhirnya punah.

c. Pola Gabungan

Salah satu contoh teori penggabungan antara kedua pola tersebut adalah teori konflik Karl Mark. Pandangan Mark bahwa sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan terus menerus antara kelas-kelas dalam masyarakat. Menurutnya perkembangan pesat kapitalisme akan memicu konflik antara kaum buruh dengan kaum borjuis yang akan dimenangkan oleh kaum buruh yang kemudian membentuk masyarakat komunis.

Menurut Weber yang mengandung pemikiran siklus, ada tiga perbedaan jenis wewenang: (a) kharismatik rasional, (b) rasional legal, dan (c) tradisional. Menurutnya wewenang yang ada di masyarakat ini akan beralih-alih. Wewenang kharismatik akan mengalami rutinisasi sehingga beralih menjadi wewenang tradisional atau rasional-legal, kemudian akan muncul lagi wewenang kharismatik yang diikuti dengan rutinitas, demikian seterusnya. Di lain pihak, Weber pun melihat adanya perkembangan linear dalam masyarakat, yakni semakin meningkatnya rasionalitas.

dirasa akan lebih menimbulkan keuntungan. Untuk menjelaskan mekanisme migrasi perlu dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Konsep yang paling membantu untuk memahami mekanisme tersebut adalah teori dorong-tarik (*push-pull theory*).

1. Teori Dorong-Tarik (*Push-Pull Theory*)

Teori dorong-tarik (*push-pull theory*) mengasumsikan bahwa setiap fenomena migrasi selalu berkaitan dengan daerah asal, daerah tujuan, dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Menurut Lee ada empat faktor yang berpengaruh orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu; (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) faktor-faktor di daerah tujuan, (3) faktor rintangan, dan (4) faktor pribadi.

Faktor-faktor di daerah asal dan daerah tujuan dapat bersifat positif, negatif atau bersifat netral. Faktor-faktor di daerah asal dikatakan positif kalau sifatnya mendorong migran, negatif kalau menghambat migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran. Sedangkan faktor-faktor di daerah tujuan dikatakan positif jika menarik calon migran, negatif kalau menghambat masuknya calon migran, dan netral kalau tidak berpengaruh terhadap migran (Lee, 1966, diterjemahkan oleh Daeng, ditinjau kembali oleh Mantra, 1987: 5). Dari keempat kelompok faktor tersebut yang terutama adalah faktor pribadi, karena pada akhirnya keputusan bermigrasi atau tidak bermigrasi tergantung kepada yang bersangkutan. Apakah sesuatu faktor bersifat positif, negatif, atau netral dan seberapa jauh mendorong, menghambat, atau menarik calon migran bergantung kepada pribadi yang mempersepsikannya.

Lee menjelaskan bahwa tiga hal yang pertama dari faktor-faktor tersebut secara skematis terlihat pada gambar di bawah ini. Dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang menetap di situ atau menarik orang untuk pindah ke situ ada pula faktor-faktor lain yang memaksa mereka meninggalkan daerah itu.

Ada banyak hal yang menarik seputar fenomena *boro*, misalnya penelitian Tjipto Subadi (2004) yang berjudul; “*Boro: Mobilitas Penduduk Masyarakat Tegalombo Sragen*” menjelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2002 di desa tersebut terdapat sebanyak 122 orang pelaku *boro* dengan tujuan Batam sebanyak 3 orang, Kalimantan 3 orang, Sumatra 111 orang, sisanya ke Malaysia 2 orang dan ke Taiwan 3 orang.
2. Jumlah pelaku *boro* dari tahun ke tahun cenderung meningkat, pada tahun 1990 terdapat 47 orang melakukan *boro* dan pada tahun 2002 jumlah tersebut menjadi 122 orang, yang berarti ada kenaikan 200% lebih, padahal pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan industrialisasi di Kabupaten Sragen cukup menjanjikan sebagai upaya pemerintah mengatasi permasalahan pengangguran dan ketenaga kerjaan (di bidang tenaga kerja).
3. *Boro* diikuti dengan perpindahan pekerjaan dari buruh tani ke “pedagang”, padahal berdagang membutuhkan modal, sedangkan pelaku *boro* adalah masyarakat desa “kuli setengah kenceng” yang tidak mampu.
4. Secara paedagogis fenomena *boro* adalah untuk mencari pengalaman, *boro* demi anak-anak, *boro* ingin meningkatkan status pendidikan.
5. Secara sosiologis *boro* untuk meningkatkan status sosial.

B. Teori Migrasi Everett S. Lee

Mobilitas penduduk dari desa ke kota baik yang permanen (migrasi) maupun yang non-permanen (sirkulasi), pada hakikatnya memiliki kesamaan terutama tentang daya dorong dan dalam hal proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobilitas (Mantra, 1987: 140-144;). Ketetapan menjadi migran permanen atau non-permanen tersebut sangat tergantung pada kemampuan kota dalam mengembangkan industrialisasi (Mc.Gee, 1977: dalam Abu-Lughod dan Hay, eds., 1977: 209-211; dalam Sutomo 1993: 22) termasuk di dalamnya kesempatan kerja sektor perdagangan, dan sektor-sektor yang lain. Suatu mobilitas akan terjadi apabila individu memutuskan lebih baik pindah dari pada menetap tinggal karena kepindahan tersebut

3. Stratifikasi Sosial

Mosca (1939) mengatakan yang terkait dengan stratifikasi sosial, “*In all societies from societies that are meagerly developed and have barely attained the dawning of civilization, down to the most advanced and powerful societies-two classes of people appear-a class that rules and a class that is ruled*”. Dalam kutipan ini Mosca melihat bahwa dalam masyarakat dijumpai di bidang kekuasaan; sebagian masyarakat menguasai, sedangkan sisanya dikuasai, itu sebabnya adanya ketidaksamaan (*inequality*) di antara status individu dan kelompok di dalam masyarakat, demikian juga persamaan manusia di dalamnya.

Persamaan ini dapat kita lihat, di bidang hukum, bahwa di hadapan hukum semua orang adalah sama. Pernyataan serupa dapat kita jumpai pula di bidang agama. Namun dalam kenyataan sehari-hari kita jumpai banyak ketidaksamaan. Kita semua tahu bahwa anggota masyarakat dibeda-bedakan berdasarkan kriteria lain, misalnya berdasarkan kekayaan, penghasilan atau berdasarkan *prestige* dalam masyarakat. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya dalam sosiologi disebut stratifikasi sosial (*social stratification*). Adapun bentuk stratifikasi sosial antara lain:

- a. Stratifikasi berdasarkan perolehan, ialah stratifikasi usia (*age stratification*). Dalam sistem ini anggota masyarakat yang lebih muda mempunyai hak dan kewajiban yang tidak sama dengan yang lebih tua. Dalam hukum adat masyarakat tertentu, misalnya; anak sulung memperoleh prioritas dalam pewarisan harta atau kekuasaan, seperti yang terjadi di Kerajaan Inggris, Kekaisaran Jepang, Negeri Belanda, putra atau putri sulung mereka berhak mewarisi kekuasaan.
- b. Stratifikasi berdasarkan usia, stratifikasi ini dijumpai di bidang pekerjaan. Namun sistem yang dianut di kalangan pegawai negeri kita merupakan perpaduan antara *merit system* (sistem penghargaan terhadap prestasi) dan sistem senioritas.
- c. Stratifikasi berdasarkan faktor perolehan, ialah stratifikasi jenis kelamin (*sex stratification*). Sejak lahir pria wanita memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, dan perbedaan ini sering mengarah ke suatu hirarki. Dalam banyak masyarakat status pria lebih tinggi dari pada

wanita. Partisipasi wanita dalam suatu pekerjaan relatif lebih terbatas. Pekerja wanita juga relatif lebih banyak terdapat di strata yang rendah.

- d. Stratifikasi didasarkan atas hubungan kekerabatan. Perbedaan hak dan kewajiban antara anak, ayah, ibu, paman, kakek sering mengarah ke suatu hirarki.
- e. Stratifikasi didasarkan atas keanggotaan dalam kelompok tertentu, seperti *religious stratification*, *ethnic stratification* or *racial stratification*.

Perbedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan warna kulit atau kebudayaan dapat kita jumpai di Israel di mana orang Palestina dan Arab tidak mempunyai hak yang sama dengan orang Yahudi. Di Jepang kita jumpai perbedaan hak dan kewajiban orang Jepang asli dan orang-orang keturunan Korea. Di Afrika selatan kita jumpai perbedaan hak dan kewajiban antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Di samping perbedaan yang diperoleh berdasarkan status yang diperoleh anggota masyarakat dibedakan pula berdasarkan status yang diraihinya sehingga menghasilkan berbagai jenis stratifikasi. Salah satu di antaranya adalah;

- a. Stratifikasi pendidikan (*educational stratification*), hak dan kewajiban warga masyarakat sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang diraihinya.
- b. Stratifikasi pekerjaan (*occupational stratification*). Misalnya, antara manajer, tenaga eksekutif dan tenaga administratif, antara dosen dan asisten, antara bintang dan perwira, dll
- c. Stratifikasi ekonomi (*economic stratification*): perbedaan masyarakat berdasarkan kepemilikan materi. Perbedaan warga masyarakat berdasarkan penghasilan dan kekayaan.

4. Struktur Sosial

Pengertian struktur sosial menurut Peter Hagul (1992) dalam Jabal Tarik Ibrahim (2002: 37) struktur sosial terdiri atas seperangkat unsur yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan seperangkat hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Menurut Douglas (1973) sosiologi mikro mempelajari situasi sosial, sedangkan sosiologi makro mempelajari

B A B VIII KAJIAN SOSIOLOGI BORO

A. Pengertian *Boro*

Boro dalam tulisan ini identik dengan migrasi sirkuler, teori yang digunakan untuk penelitian *boro* sebagai mobiltas penduduk adalah teori migrasi yaitu teori dorong-tarik (*push-pull theory*). Penjelasan dari teori ini akan diuraikan setelah penulis menjelaskan pengertian *boro*.

Boro berasal dari bahasa jawa, dari kata “*ngemboro*” atau “*mboro*” yang berartikan meninggalkan desa tempat tinggalnya pindah ke daerah lain (waktunya sementara) dengan tujuan mencari penghasilan, meningkatkan status sosial ekonomi, dan pada saat-saat tertentu ia kembali ke desanya dengan membawa uang (remitan) dan kemudian kembali lagi ke tempat tujuan. Dengan kata lain, *boro* merupakan usaha seseorang untuk meningkatkan status sosial ekonomi di desanya dengan cara meninggalkan tempat tinggal (sementara) untuk bekerja di tempat tujuan, pada saat-saat tertentu ia kembali ke desanya dengan membawa hasil (remitan) dan kembali lagi ke daerah yang di tuju itu. Adapun lamanya waktu *boro* yang dilakukan oleh masyarakat desa, beragam dengan rentan waktu minimal 3 (tiga) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan di tempat tujuan, setelah beberapa hari di rumah (kira-kira 1-2 minggu) ia kembali lagi ke tempat tujuan.

Fenomena *boro* yang dilakukan oleh sebagian penduduk di desa tidak dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, jika pelaku *boro* suami maka istri dan anak-anak tinggal di rumah (desa), jika yang *boro* istri maka suami dan anak-anak tinggal di rumah (desa), begitu juga jika yang *boro* anak, ayah dan ibu tinggal di rumah (desa). Pelaku *boro* ini pada saat tertentu kembali ke desa dan melakukan aktivitas sosial sebagaimana anggota masyarakat lainnya, kemudian setelah kurun waktu tertentu (1-2 minggu) mereka kembali ke daerah *boro* lagi. Begitu seterusnya *boro* dilakukan oleh masyarakat desa.

mengutamakan pengkayaan materi, sudah harus ditinggalkan untuk menuju paradigma baru pendidikan. Faisal Ismail, menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran dalam Islam bukanlah sekedar kegiatan untuk mewariskan harta kebudayaan dari generasi terdahulu kepada generasi penggantinya yang hanya memungkinkan bersifat reseptif, pasif, menerima begitu saja. Akan tetapi pendidikan Islam harus berusaha mengembangkan dan melatih peserta didik untuk lebih bersifat memungkinkan bersifat reseptif, pasif, menerima begitu saja. Akan tetapi pendidikan Islam harus berusaha mengembangkan dan melatih peserta didik untuk lebih bersifat direktif, mendorong agar selalu berupaya maju, kreatif dan berjiwa membangun. Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembangunan dan pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasi dengan “keluhuran moral” dan “kepribadian”, sehingga pendidikan Islam akan mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma sekarang ini, sehingga pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang belajar terus (*long life education*), mandiri, disiplin, terbuka, inovatif, mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan (Faisal Ismail, 1998: 97-98), serta berdayaguna bagi kehidupan dirinya dan masyarakat.

Paradigma baru pendidikan Islam harus diorientasikan kepada pembangunan, pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualisme, keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, disiplin dan taat hukum, terbuka dalam masyarakat plural, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan persoalan pada era globalisasi dengan dilandasi keanggunan moral dan akhlak dalam usaha membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas bagi kehidupan dalam masyarakat madani Indonesia.

struktur sosial. Manakala berbicara masalah struktur sosial, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang berhubungan. Menurutnya struktur sosial adalah sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian masyarakat yang saling tergantung dan membentuk satu pola tertentu. Bagian dari sesuatu itu dapat terdiri atas pola perilaku individu, pola perilaku kelompok, pola perilaku institusi, maupun pola perilaku masyarakat luas (misalnya pola perilaku masyarakat solo). Dalam membahas struktur sosial, dikenal dua konsep penting, yakni (1) status dan (2) peranan. Menurut Ralph Linton, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban (*a collection of rights and duties*), sedangkan peranan adalah aspek dinamis dari sebuah status (*the dynamic aspect of a status*).

Lebih lanjut Douglas mengatakan seseorang menjalankan peranan jika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Suatu contoh untuk membedakan antara status dan peranan guru. Status guru terdiri atas sekumpulan kewajiban tertentu seperti mendidik, mengajar, membimbing dan melatih siswa. Dan sekumpulan hak, seperti menempati jabatan fungsional dan menerima imbalan jasa. Peranan seorang guru mengacu pada bagaimana seseorang yang berstatus sebagai guru menjalankan hak dan kewajibannya, antara lain bagaimana ia mengajar, membimbing dan mengevaluasi siswanya.

Status yang diraih (status seseorang karena perjuangannya) adalah sebagai status yang *requiring special qualities* - status yang memerlukan kualitas tertentu. Status ini tidak diberikan kepada individu sejak lahir melainkan harus diraih melalui usaha dan persaingan. Robert K. Merton (1965) mempunyai pandangan yang berbeda dengan Linton. Menurut Merton, ciri dasar dari struktur sosial adalah bahwa suatu status tidak hanya melibatkan satu peranan terkait melainkan sejumlah peranan terkait. Konsepnya adalah konsep perangkat peranan (*role-set*), yang didefinisikan sebagai pelengkap hubungan peranan yang dimiliki seseorang karena menduduki suatu status sosial tertentu (*complement of role relationships which persons have by virtue of occupying a particular status*) Satu misal, status yang dimiliki individu sebagai seorang guru, juga seorang istri, seorang ibu, penganut agama yang taat

dan lain-lain. Hal yang demikian itu lebih tepat disebut perangkat status (*status-set*)

5. Institusi Sosial

Para ahli menunjukkan keberagaman mereka dalam menterjemahkan institusi. Misalnya, Selo Soemarjan dan Soelaiman (1964) menggunakan istilah institusi dengan istilah lembaga, kemasyarakatan (*social Institution*), sedangkan Koentjaraningrat dan Harsja Bachtar menggunakan istilah pranata. Komblum (1980: 60) membuat definisi sebagai berikut: ...” *institution is more or less stable structure of statuses and roles devoting to meeting the basic needs of people in society*”. Artinya,...suatu struktur status dan peranan yang diarahkan ke pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat.

Menurut Harry M. Johnson (1960) institusi adalah seperangkat aturan yang terinstitusionalisasi, yaitu: (1) telah diterima sejumlah besar anggota masyarakat; (2) ditanggapi secara sungguh-sungguh (*internalized*); (3) diwajibkan, dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi tertentu. Yang dimaksud Johnson dalam definisinya adalah bahwa pernikahan, misalnya, suatu institusi yang oleh sejumlah besar anggota masyarakat diterima sebagai cara yang benar untuk melangsungkan hubungan antara pria dan wanita. Institusi perkawinan ini telah mereka internalisasikan, artinya, mereka merasa berdosa manakala melakukan hubungan tersebut di luar nikah. Aturan-aturan nikah ini bersifat wajib, bagi yang melanggarnya akan terkena sanksi yang amat berat, (coba cari contoh yang lain).

Definisi pertama tersebut di atas (Komblun) menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meraih pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu. Misalnya, institusi di bidang pendidikan, institusi itu melibatkan struktur yang mencakup berbagai kedudukan dan peranan; (1) pendidik, (2) peserta didik, dan (3) administrator. Pendidik (guru, dosen, pelatih, pembimbing, tutor, widyaiswara), Peserta didik (murid, siswa, mahasiswa, peserta penataran), dan Administrator (kepala sekolah, rektor, direktur, dekan).

Koentjaraningrat dalam Jabal Tarik Ibrahim (2002: 87) menjelaskan pranata sosial adalah suatu sistem norma khusus yang

kemampuan inovatif serta meningkatkan kualitas manusia. (7) Pendidikan Islam lebih menekankan dan diorientasikan pada proses pembelajaran, diorganisir dalam struktur yang lebih bersifat fleksibel, menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. (8) Pendidikan Islam harus di arahkan pada dua dimensi, yaitu “Pertama, dimensi dialektika [horizontal] yaitu pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya dan manusia harus mampu mengatasi tantangan dunia sekitarnya melalui pengembangan iptek, dan Kedua, dimensi ketunduhan vertikal, yaitu pendidikan selain sarana untuk memantapkan, memelihara sumberdaya alam dan lingkungannya, juga memahami hubungannya dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Swt”.(Hujair AH. Sanaky,1999: 11). (9) Pendidikan Islam lebih diorientasikan pada upaya “pendidikan sebagai proses pembebasan, pendidikan sebagai proses pencerdasan, pendidikan menjunjung tinggi hak-hak anak, pendidikan menghasilkan tindakan perdamaian, pendidikan sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif, pendidikan sebagai wahana membangun watak persatuan, pendidikan menghasilkan manusia demokratis, pendidikan menghasilkan manusia peduli terhadap lingkungan”, dan harus dibangun suatu pandangan bahwa “sekolah bukan satu-satunya instrumen pendidikan” (Djohar, “Soal Reformasi Pendidikan Omong Kosong, Tanpa Mengubah UU No.2/89”, Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999, Yogyakarta), karena pada era informasi sekarang ini, informasi ilmu pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai media elektronik dan media massa, seperti : internet dengan peran web, homepage, cd-rom, diskusi di internet, dan televisi, radio, surat kabar, majalah yang merupakan alat bantu yang akan sangat mempercepat proses *distributed knowledge*.

Mencermati fenomena perubahan paradigma baru tersebut, maka paradigma lama pendidikan Islam yang telah terbangun sejak abad pertengahan (periode Islam), dengan mengkaji dan mempelajari teks-teks keagamaan dengan metode hafalan, bersifat mekanis,

pendidikan Islam secara utuh”. Pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan paradigma yang berorientasi pada: (1) Paradigma baru pendidikan Islam harus didasarkan pada filsafat teocentris dan antroposentris sekaligus. Pendidikan Islam yang ingin dikembangkan adalah pendidikan yang menghilangkan atau tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama, serta ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas dinilai. Selain itu, mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan juga sisi rasional” (Mastuhu, 1999: 15). (2) Pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spritual, moral dan material bagi kehidupan manusia. (3) Pendidikan Islam mampu membangun kompetisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik berupa manusia demokratis, kompetitif, inovatif berdasarkan nilai-nilai Islam. (4) Pendidikan Islam harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun kondisi pada masa akan datang, karena perubahan kondisi lingkungan merupakan tantangan dan peluang yang harus diproses secara cepat dan tepat. Pendidikan Islam yang dikembangkan selalu diorientasikan pada perubahan lingkungan, karena pendekatan masa lalu hanya cocok untuk situasi masa lalu dan sering tidak tepat jika diterapkan pada kondisi berbeda, bahkan sering kali menimbulkan problem yang dapat memundurkan dunia pendidikan. (5) Pembaruan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat madani. Sistem pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratisasi, memiliki kemampuan partisipasi sosial, mentaati dan menghargai supermasi hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan [pluralisme], memiliki kemampuan kompetitif dan kemampuan inovatif. (6) Penyelenggaraan pendidikan Islam harus diubah berdasarkan pendidikan demokratis dan pendidikan yang bersifat sentralistik baik dalam manajemen maupun dalam penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan tuntutan pendidikan demokratis dan desentralistik.

Pendidikan Islam harus mampu mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi di dalam dunia kerja, mengembangkan sikap dan

menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Dari definisi Koentjaraningrat ini ada tiga hal penting dalam lembaga sosial/pranata sosial, yaitu; (1) adanya sistem norma, (2) sistem norma itu mengatur tindakan berpola (3) tindakan berpola itu untuk memenuhi kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pranata sosial juga dijelaskan oleh Soejono Soekanto yakni sebagai himpunan dari norma-norma segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat. Definisi ini ada dua hal yang penting, yaitu adanya himpunan norma-norma dan norma-norma itu mengatur manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam institusi sosial/lembaga sosial/pranata sosial ada empat unsur penting yaitu; sistem norma, sejumlah norma, pelaksanaan norma, dan terpenuhinya kebutuhan manusia dalam kehidupan masyarakat

6. Kelompok Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, karena itu manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Bahkan hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Untuk melangsungkan kehidupannya manusia senantiasa hidup berkelompok. Walaupun kelompok sosial terdiri dari orang-orang namun tidak semua kumpulan manusia dapat dikatakan kelompok sosial.

Kelompok sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam satu kegiatan bersama. Menurut batasan ini kelompok sosial merupakan salah satu bentuk sistem sosial. Oleh karena itu untuk memahami kelompok dapat dianalisa dengan menggunakan konsep fungsi dan integrasi.

Berapa jumlah orang yang diperlukan untuk membentuk satu kelompok? Tentu paling sedikit adalah dua orang. Patokan yang paling penting untuk menentukan apakah sekumpulan orang-orang itu merupakan kelompok adalah kegiatan interaksinya. Bisa saja dua orang duduk berdekatan, tetapi tidak berinteraksi dalam satu kegiatan

bersama, tidak dapat disebut kelompok sosial.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik definisi tentang kelompok sosial, yaitu: sejumlah orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena mempunyai tujuan dan sikap bersama; hubungan-hubungan yang dilakukan diatur oleh norma-norma; tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) masing-masing; dan antara orang-orang itu terdapat rasa ketergantungan satu sama lain. Istilah tatap muka dalam pengertian kelompok sosial di atas tidak berarti semua anggota kelompok satu sama lain harus saling kenal.

1) Jenis-jenis Kelompok Sosial

Dari sudut individu, kelompok sosial dapat dibedakan menjadi

a. Kelompok-dalam (*in-group*) dan kelompok-luar (*out-group*).

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang sering menyebut dirinya kami atau kita. Kata-kata kami atau kita menunjukkan kelompok-dalam seseorang. Seseorang menyebut kami atau kita karena perasaan dekat melingkupi dirinya terhadap kelompok yang dimaksud. Kelompok dalam seseorang ditunjukkan oleh sikap identifikasi terhadap eksistensi kelompok yang dimaksud. Pengakuan "kami mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Pertanian; kami petani desa Taman, kami pedagang pasar besar; dan sebagainya" menunjukkan kelompok di mana ia beridentifikasi. Sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang ini disebut sikap-sikap *in-group*. Sikap-sikap *out-group* ditandai oleh sikap-sikap antagonisme atau antipati. Sikap-sikap *out-group* ditandai oleh sebutan "mereka". Semua orang di luar kelompok dalam disebut kelompok-luar (*out-group*). Seseorang yang mempunyai kelompok-dalam tertentu cenderung mencintai dan mengagung-agung segala hal yang dimiliki kelompoknya. Kecenderungan individu untuk menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang terbaik, jika dibandingkan dengan kelompok lain disebut *ethnocentrisme*.

Ethnocentrisme dalam batas-batas tertentu menimbulkan rasa cinta kelompok, rasa memiliki kelompok, dan solidaritas antar

perubahan tersebut, paling tidak harus memperhatikan beberapa ciri, sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam diupayakan lebih diorientasikan atau "lebih menekankan pada upaya proses pembelajaran (*learning*) daripada mengajar (*teaching*)".
2. Pendidikan Islam dapat "diorganisir dalam suatu struktur yang lebih bersifat fleksibel".
3. Pendidikan Islam dapat "memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri".
4. Pendidikan Islam, "merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan" (Zamroni, 2000: 9).

Keempat ciri ini, dapat disebut dengan paradigma pendidikan sistematis-organik yang "menuntut pendidikan bersifat *double tracks*, artinya pendidikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakat". Dalam "pelaksanaan pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Karena keterkaitan ini memiliki arti, bahwa peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya". Dengan kata lain pendidikan yang bersifat *double tracks*, menekankan pengembangan pengetahuan melalui kombinasi terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pelatihan, dan pendidikan formal persekolahan, sehingga "sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dengan cepat" (Zamroni, 2000: 9).

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa "paradigma baru pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang terus-menerus harus dikembangkan melalui pendidikan untuk "merebut kembali kepemimpinan Iptek", sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari; (1) konsep manusia menurut Islam, (2) pandangan Islam terhadap Iptek, dan setelah itu baru dirumuskan (3) konsep atau sistem

dengan adanya kemauan dan upaya untuk melakukan reformasi total diberbagai aspek kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat madani Indonesia, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, pergeseran paradigma pendidikan tersebut juga diakui sebagai akibat konsekuensi logis dari perubahan masyarakat, yaitu berupa keinginan untuk merubah kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, menghargai perbedaan dan terbuka menuju masyarakat madani Indonesia.

Selanjutnya, terjadi perubahan paradigma pendidikan juga sebagai akibat dari “percepatan aliran ilmu pengetahuan yang akan menantang sistem pendidikan konvensional yang antara lain sumber ilmu pengetahuan tidak lagi terpusat pada lembaga pendidikan formal (SD,SMP,SMU,PT) yang konvensional. Sumber ilmu pengetahuan akan tersebar di mana-mana dan setiap orang akan dengan mudah memperoleh pengetahuan tanpa kesulitan. Paradigma ini dikenal sebagai *distributed intelligence (distributed knowledge)*”. Kondisi ini akan berpengaruh pada fungsi tenaga pendidik (guru dan dosen) dan lembaga pendidikan, akhirnya beralih dari sebuah sumber ilmu pengetahuan menjadi “mediator” dari ilmu pengetahuan tersebut. Proses *long life learning* dalam dunia pendidikan informal yang sifatnya lebih *learning based* dari pada *teaching based* akan menjadi kunci perkembangan sumber daya manusia. Peranan *web, homepage, cd-rom* merupakan alat bantu yang akan sangat mempercepat proses *distributed knowledge* semakin berkembang. Hal ini, secara langsung akan menentang sistem kurikulum yang sifatnya terpusat yang kini lebih banyak dianut dan lebih difokuskan pada pengajaran (*teaching*) dan kurang pada pendidikan (*learning-based*)” (Onno W. Purbo, 2000).

Ilmu pengetahuan akan terbentuk secara kolektif dari banyak pemikiran yang sifatnya konsensus bersama dan tidak terikat pada dimensi birokrasi atau struktural. Dengan demikian, pendidikan Islam harus mulai berbenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat menyongsong dan dapat menjawab tantangan perubahan tersebut, apabila tidak maka pendidikan Islam akan tertinggal dalam persaingan global. Maka dalam menyusun strategi untuk menjawab tantangan agai

kelompok. Tetapi bila berlebihan akan menimbulkan *stereotype*, yaitu anggapan-anggapan yang bersifat mengejek terhadap objek tertentu. Misalnya, sikap orang-orang yang lama hidup di kota menganggap orang yang hidup di desa pasti terbelakang, bodoh konyol, dan sebagainya. Seorang *out-sider* atau orang luar yang mempunyai tugas mempelajari atau mengubah kelompok sosial tertentu harus menjadi *in-group* terlebih dahulu dengan kelompok sosial itu. Apabila ia tetap menjaga perilakunya sebagai *out-sider* maka ia tidak akan dapat memahami hubungan-hubungan sosial yang bersifat khusus di dalam kelompok yang dipelajarinya.

b. Kelompok primer dan kelompok sekunder.

Pembagian kelompok menjadi kelompok primer dan sekunder diajukan oleh Charles Horton Cooley seorang sosiolog dari Amerika Serikat. Menurut Cooley, kelompok primer adalah kelompok-kelompok di mana para anggotanya saling kenal mengenal satu sama lain dan mempunyai kerjasama yang erat secara pribadi. Kelompok primer ini umumnya mempunyai jumlah yang kecil, karena kelompok yang besar jelas tidak mungkin mempunyai kerja sama yang erat secara pribadi. Menurut Horton (1982), kelompok primer adalah kelompok kecil, jarang yang lebih dari sepuluh atau dua puluh orang, hubungan anggotanya bersifat informal, kekeluargaan (*intimate*), dan bersifat pribadi.

Kelompok-kelompok primer ini sekarang sedang menjadi primadona yang berfungsi sebagai forum media untuk membantu pengentasan kemiskinan dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Kelompok-kelompok primer bisa produktif kalau menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut: Suasana kerja dalam kelompok itu memberi kesan setaraf; Anggota kelompok bekerja dalam rasa aman tanpa rasa saling curiga; Ada distribusi kepemimpinan atau kepemimpinan bergilir; Tujuan sudah dirumuskan dengan jelas; Punya fleksibilitas dalam mencapai tujuan; Masing-masing anggota punya kesadaran berkelompok; dan selalu ada kegiatan evaluasi yang berkesinambungan (Gerungan, 1988).

Kelompok sekunder hubungannya bersifat formal, tidak bersifat pribadi, segmental dan instrumental. Contohnya tidak hanya

organisasi formal seperti Serikat Pekerja, tetapi juga kelompok yang lebih kecil seperti tenaga pemasaran dan para pelanggannya. Kontak yang terjadi antar anggota kelompok sekunder bersifat impersonal (tenaga pemasaran diharap memperlakukan semua pelanggan dengan ramah tanpa mempertimbangkan perasaannya terhadap mereka), segmental (tidak melibatkan semua orang tetapi hanya orang-orang yang relevan dengan tugas yang ditangani), dan instrumental (mempunyai tugas tertentu yang harus diselesaikan).

c. *Gemeinschaft* dan *Gesselschaft*

Pembagian kelompok ke dalam *gemeinschaft* dan *gesselschaft* dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies. Segala bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang kuat, alamiah, dan abadi, disebut *gemeinschaft*. Sebuah keluarga yang anggota-anggotanya saling mencintai, saling mengisi, dan merasa susah apabila salah satu dilanda kesulitan merupakan contoh keadaan *gemeinschaft*. Ajaran-ajaran Islam yang menyatakan bahwa semua orang Islam bersaudara, ibarat tubuh manusia, bila salah satu dari anggota tubuh manusia merasa sakit, maka sakit pulalah semua anggota badan lainnya, Sebenarnya merupakan ajaran bahwa orang Islam hendaknya mengutamakan hubungan yang bersifat *gemeinschaft*.

Gemeinschaft dapat terjadi karena didasari tiga hal, yaitu : karena ada hubungan darah (*gemeinschaft by blood*); tempat tinggalnya berdekatan (*gemeinschaft by place*); dan mempunyai jiwa, pemikiran atau ideologi yang sama (*gemeinschaft by mind*). *Gemeinschaft* merupakan ikatan lahir manusia yang bersifat sementara. Ikatan-ikatan perdagangan umumnya lebih bersifat *gesselschaft*. Hubungan antar manusia tercipta merupakan hubungan legal rasional saja.

d. *Formal Group* dan *Informal Group*,

Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tertulis, jelas, dan tegas. Peraturan-peraturan ini umumnya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART). Contoh *Formal group* adalah Koperasi Unit Desa (KUD), Himpunan Petani Pemakai Air

berwawasan global dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan strategis. Misalnya saja, bangsa Jepang tetap merupakan satu contoh bangsa yang mengglobal dengan tanpa kehilangan karakternya sebagai suatu bangsa yang maju dengan tetap kental dengan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai religius. Dengan contoh bangsa Jepang, maka pembinaan dan pembentukan nilai-nilai Islam tetap relevan, bahkan tetap dibutuhkan dan harus dilakukan sebagai “kapital speritual” untuk masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Dari pandangan ini, tergambar bahwa peran pendidikan sangatlah sentral dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami penggeseran, sementara “sistem sosial, politik, dan ekonomi bangsa selalu menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peran pendidikan (Fasli Jalal, 2001: 6).

Dengan paradigma baru tersebut, pendidikan Islam harus dapat megembangkan kemampuan dan tingkah laku manusia yang dapat menjawab tantangan internal maupun tantangan global menuju masyarakat madani Indonesia. Pendidikan harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratis. Sedangkan untuk menghadapi kehidupan global, proses pendidikan Islam yang diperlukan adalah mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi, kemampuan kerja sama, mengembangkan sikap inovatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan acuan ini, secara pasti yang akan terjadi adalah penggeseran paradigma pendidikan, sehingga kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan perlu diletakkan untuk menangkap dan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut, apabila tidak, maka pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang “termarginalkan” dan tertinggal di tengah-tengah kehidupan masyarakat global.

Pergeseran drastis paradigma pendidikan sedang terjadi, dengan terjadinya aliran informasi dan pengetahuan yang begitu cepat dengan efisiensi penggunaan jasa teknologi informasi internet yang memungkinkan tembusnya batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemampuan dan waktu. Penggeseran paradigma tersebut juga didukung

madani Indonesia. Maka, pendidikan selalu bersifat progresif tidak resisten terhadap perubahan, sehingga mampu mengendalikan dan mengantisipasi arah perubahan.

7. Prinsip rekonstruksionis, bahwa kondisi masyarakat selalu menghendaki perubahan mendasar. Maka pendidikan harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perubahan tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih berorientasi masa kini, sedangkan pendekatan rekonstruksionis lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang.
8. Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang umum maupun yang spesifik harus menjadi pertimbangan. Layanan pendidikan untuk kelompok usia anak berbeda dengan remaja dan dewasa, termasuk perbedaan pelayanan bagi kelompok anak-anak berkelainan fisik dan mental termasuk pendekatan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil tidak dapat disamakan dengan anak-anak di perkotaan.
9. Prinsip pendidikan multikultural. Sistem pendidikan harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, sehingga pluralisme harus menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan dan pendidikan dapat mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai sumber dinamika yang bersifat positif dan konstruktif.
10. Pendidikan dengan prinsip global, artinya pendidikan harus berperan dan harus menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global (Fasli Jalal, 2001: 16-17).

Upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global bukan persoalan mudah, karena pada waktu bersamaan pendidikan Islam harus memiliki kewajiban untuk melestarikan, menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dan di pihak lain berusaha untuk menanamkan karakter budaya nasional Indonesia dan budaya global yang tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi, upaya untuk membangun pendidikan Islam yang n tanpa

(HIPPA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekarang menjadi Asosiasi Kontak Tani/ Nelayan Andalan Indonesia (AKTI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dll.

Informal group tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Struktur kelompok itu tidak jelas karena tidak tertulis. Kelompok-kelompok seperti ini terbentuk dari frekuensi pertemuan yang cukup tinggi karena adanya kepentingan khusus. Contoh kelompok *informal* antara lain klik, gang, gerombolan, dan sebagian besar kelompok primer lainnya.

e. *Membership Group dan Reference Group*

Membership group adalah kelompok di mana seseorang secara resmi menjadi anggotanya. Ia secara fisik menjadi anggota kelompok terlepas dari sengaja atau tidak, terpaksa atau tidak. *Reference group* adalah kelompok sosial di mana seseorang melakukan imitasi dan identifikasi nilai-nilai untuk membentuk kepribadiannya. *Reference group* yang diikuti seseorang tidak selalu menjadi *membership group*-nya.

f. *Kelompok Sukarela (Voluntary Group) dan Kelompok Tidak Sukarela*

Dilihat dari sisi kesukarelaan mengikuti suatu kelompok maka ada kelompok yang diikuti secara sukarela ada pula yang terpaksa atau harus diikuti sebagai konsekuensi dari status atau peranan tertentu.

2) **Dinamika Kelompok**

Kelompok sosial bukan merupakan sesuatu yang statis tetapi setiap saat senantiasa mengalami perubahan (dinamika). Secara etimologis dinamika kelompok berasal dari kata "*dinamika*" yang mengandung makna "*gerak*", yaitu gerak dari sistem tindakan individu anggota kelompok yang mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; dan dari kata kelompok yang berarti kelompok manusia. *Dynamic* bisa juga diartikan sebagai semangat, dalam konteks ini adalah semangat untuk mencapai tujuan kelompok. Oleh karena itu Yunasaf (1997) mengatakan bahwa dinamika kelompok mencakup faktor-faktor

yang dapat menyebabkan suatu kelompok itu hidup, bergerak, aktif, efektif dalam mencapai tujuan.

Pengertian dinamika kelompok yang banyak dikutip yaitu kekuatan-kekuatan di dalam kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan segala perilaku anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan kelompok sangat ditentukan oleh tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Golberg dan Larson (1985) berpendapat bahwa dinamika kelompok merupakan suatu studi tentang berbagai aspek tingkah laku kelompok. Perbedaan definisi kelompok menurut Golberg dan Larson dengan definisi alinea sebelumnya adalah pada fokus perilaku. Pada alinea sebelumnya, perilaku anggota kelompok dilihat dalam konteks berkelompok, sedangkan Golberg dan Larson melihat perilaku kelompok dalam konteks individu. Oleh karena perbedaan beberapa sudut pandang seperti ini maka analisa dinamika kelompok dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: a). Pendekatan Psiko-sosial, yaitu analisis dinamika kelompok terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu sendiri, dan b). Pendekatan sosiologis, yaitu analisis dinamika kelompok melalui analisis terhadap bagian-bagian atau komponen kelompok (sistem sosial) dan analisis terhadap proses sistem sosial yang terjadi dalam kelompok.

a. Dinamika Kelompok dengan Pendekatan Psiko-sosial

Unsur-unsur dinamika kelompok dalam pendekatan psiko-sosial yaitu : tujuan (*group goals*), struktur (*group structure*), fungsi tugas (*task function*), pemeliharaan dan pengembangan kelompok (*group building and maintenance*), kesatuan kelompok (*group cohesiveness*), suasana kelompok (*group atmosphere*), tekanan dan tegangan yang dialami kelompok (*group pressure*), efektifitas kelompok (*group effectiveness*), dan maksud terselubung (*hidden agenda*). Pengertian dari unsur-unsur dinamika kelompok adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan kelompok adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok. Kegunaan tujuan dalam suatu kelompok adalah memberikan arah pada kegiatan kelompok sehingga tujuan kelompok dapat dijadikan kriteria pengukur kemajuan.

atau karakteristik perbedaan antara individu peserta didik (Fasli Jalal, 2001: 16), dalam kerangka interaksi proses belajar.

Dengan demikian, kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan sistem pendidikan Islam menuju masyarakat madani Indonesia, harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan secara selektif sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep, yaitu :

1. Pendidikan harus membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan dengan sektor-sektor lain. Sistem pendidikan harus senantiasa bersama-sama dengan sistem lain untuk mewujudkan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Pendidikan bukan merupakan sesuatu yang eksklusif dan terpisah dari masyarakat dan sistem sosialnya, tetapi pendidikan sebagai suatu sistem terbuka dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya.
2. Pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh, seperti keluarga, sekolah, media massa, dan dunia usaha.
3. Prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa. Seperti pesantren, keluarga, dan berbagai wadah organisasi pemuda, diberdayakan untuk dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan baik serta menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan.
4. Prinsip kemandirian dalam pendidikan dan prinsip pemerataan menurut warga negara secara individual maupun kolektif untuk memiliki kemampuan bersaing dan sekaligus kemampuan bekerja sama.
5. Dalam kondisi masyarakat pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsensus. Untuk itu, pendidikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber-sumber tersebut secara dinamik.
6. Prinsip perencanaan pendidikan. Pendidikan selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat

dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, religius, dan tangguh menghadapi lingkungan global. Maka dalam upaya pembaruan pendidikan Islam, perlu ada ikhtiar, yaitu strategi kebijakan perubahan diletakkan untuk menangkap kesempatan perubahan tersebut. Maka mau tidak mau, pendidikan Islam harus meninggalkan paradigma lama menuju paradigma baru, berorientasi pada masa depan, merintis kemajuan, berjiwa demokratis, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik, bersifat multikultural dan berorientasi pada perspektif global, sehingga terbentuk pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan global menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia. Sebab pada tataran konsep, pendidikan baik formal maupun non formal “pada dasarnya memiliki peran penting melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada dan sebaliknya pendidikan merupakan proses perubahan sosial. Tetapi, peran pendidikan terhadap sistem dan struktur sosial tersebut, sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya” (Mansour Fakhri, 2002: 18).

Berdasarkan pandangan di atas, maka peran pendidikan Islam mestinya bukan hanya “dipahami dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan), melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya” (Fasli Jalal, 2001:16-17), sehingga pendidikan Islam integratif antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat (*learning society*). Brubacher dalam bukunya, *Modern Philosophies of Education* (1978), menyatakan hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara, karena pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan secara simultan. Sedangkan, secara mikro pendidikan senantiasa memperhitungkan individualitas

- 2) Struktur merupakan komponen kelompok yang mengatur interaksi dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam struktur kelompok perlu dipertimbangkan : kewenangan (aturan bagaimana keputusan kelompok akan diambil), sistem komunikasi (bagaimana penyampaian pesan dalam dan keluar kelompok dilakukan), aktivitas (dengan aktivitas apa tujuan kelompok akan tercapai), hak dan kewajiban (aturan tentang segala apa yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota), besarnya kelompok, solidaritas kelompok, dan kesempurnaan pencapaian tujuan.
- 3) Fungsi tugas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha memfasilitasi dan mengkoordinasi usaha-usaha kelompok yang menyangkut masalah-masalah bersama dan dalam rangka memecahkan masalah itu. Dalam fungsi tugas harus dapat dipenuhi beberapa hal, yaitu: Kepuasan karena sudah mencapai tujuan, mencari gagasan untuk keperluan kelompok, koordinasi untuk mencapai kesepakatan bersama, inisiasi dengan memotivasi semua anggota agar kegiatan kelompok berhasil, diseminasi yakni menyebarkan informasi agar semua mengetahui dan terlibat, serta menjelaskan segala sesuatu bila semua orang bingung.
- 4) Pembinaan dan pengembangan kelompok adalah segala usaha menjaga kelompok agar tetap hidup (orientasi pembinaan dan pengembangan adalah agar kelompok dapat bertahan hidup). Usaha-usaha yang tergolong pembinaan dan pengembangan kelompok adalah : Partisipasi (diusahakan agar semua anggota kelompok berpartisipasi sehingga tumbuh perasaan bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok), fasilitas (input dan peralatan yang diperlukan kelompok harus disediakan agar kegiatan kelompok dapat mencapai tujuan), aktivitas (mengadakan aktivitas sebagai tanda kehidupan kelompok), koordinasi (menghindari konflik yang bisa membahayakan kelompok), komunikasi (kunci pembinaan kelompok adalah komunikasi vertikal dan horisontal berlangsung baik atau lancar), penentuan standar (ada standar perilaku atau norma yang menjadi

alat kontrol yang ampuh), sosialisasi (usaha pendidikan agar anggota baru atau lama bisa menjadi anggota yang baik sehingga terjaga kehidupan kelompok yang harmonis), dan mendapatkan anggota baru (mengganti anggota yang keluar atau menambah yang telah ada).

- 5) Kesatuan dan kekompakan kelompok adalah komitmen yang kuat dari seluruh anggota untuk mencapai tujuan. Kesatuan dan persatuan kelompok menjadi kekuatan bagi kelompok untuk mencapai tujuan dan mengatasi rintangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesatuan dan kekompakan kelompok adalah : Kepemimpinan (kepemimpinan yang baik dalam konteks ini adalah yang membina kesatuan dan persatuan), keanggotaan (rasa memiliki, afiliasi, dan identifikasi diri anggota terhadap kelompok), nilai tujuan kelompok (nilai sosial, spiritual, dan ekonomis), homogenitas (kesamaan anggota dalam beberapa karakteristik), integrasi (keterpaduan antar komponen kelompok), kerjasama (berat sama dipikul, ringan sama dijinjing), dan besarnya kelompok (kelompok kecil mudah bersatu, kelompok besar lebih sulit).
- 6) Suasana kelompok adalah sikap mental dan perasaan-perasaan yang secara umum ada dalam kelompok. Suasana kelompok (moral kelompok) yaitu suasana semangat dalam kelompok, apakah bersemangat, tidak bersemangat, atau apatis. Faktor-faktor yang mempengaruhi suasana kelompok adalah ketegangan (*tension*), keramahan, rasa persahabatan, kebebasan, lingkungan fisik, dan tingkat demokrasi dalam kelompok.
- 7) Ketegangan kelompok adalah suasana batin yang dirasakan dalam kelompok (apakah ada perasaan tertekan). Sumber tekanan kelompok ada dua macam, yaitu: *Internal pressure* (konflik, otoriter, persaingan, dan lain-lain) dan *external pressure* (tantangan, serangan, sanksi atau penghargaan. atau hukuman, keseragaman, dan conformitas).
- 8) Keefektifan kelompok pada dasarnya adalah kualitas kelompok dalam mencapai tujuan, bila dilihat dari sisi kuantitatif adalah jumlah tujuan yang sudah dicapai kelompok. Pada dasarnya

kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, LSM, pesantren, dunia usaha (Fasli Jalal, 2001: 5), lembaga-lembaga kerja, dan pelatihan, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan, yang diorientasikan kepada terbentuknya masyarakat madani Indonesia.

Berdasarkan pandangan ini, pendidikan Islam sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan. Mengalihkan paradigma dari yang berwatak feodal ke paradigma pendidikan yang berjiwa demokratis (Winarno Surakhmad, 2002). Mengalihkan paradigma dari pendidikan sentralisasi ke paradigma pendidikan desentralisasi, sehingga menjadi pendidikan Islam yang kaya dalam keberagaman, dengan titik berat pada peran masyarakat dan peserta didik. Dalam proses pendidikan, perlu dilakukan “kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain, pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial, pendidikan dalam rangka pemberdayaan umat dan bangsa, pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan Islam. Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan, penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan. Dari pandangan ini, berarti diperlukan perencanaan terpadu secara horizontal (antar sektor) dan vertikal (antar jenjang – *bottom-up* dan *top-down planning*), pendidikan harus berorientasi pada peserta didik dan pendidikan harus bersifat multikultural serta pendidikan dengan perspektif global” (Fasli Jalal, 2001: 5).

C. Perubahan Baru Paradigma Pendidikan

Dengan rumusan paradigma pendidikan tersebut, paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan, yang secara makro

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.(18). Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.(19).

Proses pendidikan tersebut di atas berakar dari ayat-ayat Al-Quran yang pada intinya mengandung prinsip-prinsip pendidikan Islam yang meliputi; Penanaman Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Muamalah. Paradigma baru pendidikan Islam tidak bisa mengabaikan prinsip-prinsip tersebut di atas yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip pendidikan Nasional dalam menghadapi globalisasi yang memiliki dua paradog (pengaruh positif dan negatif) dari globalisasi menuju cita-cita pendidikan Islam Indonesia terbentuknya masyarakat madani.

B. Arah Perubahan Paradigma Pendidikan

Proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan, berbeda dengan praksis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengalienasikan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia (H.A.R. Tilaar, 1999: 168), oleh karena itu, arah perubahan paradigma baru pendidikan Islam diarahkan untuk terbentuknya masyarakat madani Indonesia tersebut.

Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru, terdapat berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut, yaitu;

Pertama, paradigma lama terlihat upaya pendidikan lebih cenderung pada sentralistik, kebijakan lebih bersifat *top down*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, karena pendidikan didesain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi perakitan. Peran pemerintah sangat dominan dalam kebijakan pendidikan, dan lemahnya peran institusi pendidikan dan institusi non-sekolah. *Kedua*, paradigma baru, orientasi pendidikan pada desentralistik, kebijakan pendidikan bersifat *bottom up*, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat holistik; artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam

keefektifan adalah hasil dari dinamika, namun keefektifan /keberhasilan kelompok akan cenderung meningkatkan dinamika kelompok. Keefektifan kelompok dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu: Dari hasil atau produktifitasnya (jumlah pencapaian tujuan), dari moral kelompok (semangat dan kesungguhannya), dan dari tingkat kepuasan anggota-anggotanya.

- 9) Maksud tersembunyi adalah program, tugas, atau tujuan yang tidak diketahui/ disadari oleh para anggota kelompok, sifatnya berada di bawah permukaan. Maksud tersembunyi bersifat saling mempengaruhi dan sama pentingnya dengan maksud/tujuan yang terbuka. Maksud terselubung ini penting artinya bagi kehidupan kelompok dan harus dipecahkan bersama. Kelompok dapat bekerja untuk maksud-maksud terselubung dan terbuka pada saat yang sama. Sumber maksud terselubung bisa dari anggota kelompok, pimpinan kelompok, atau kelompok itu sendiri.
- b. Dinamika Kelompok Dengan Pendekatan Sosiologis.

Analisis dinamika kelompok dengan pendekatan sosiologis ini didasarkan pada kenyataan bahwa kelompok adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi, mempunyai pola perilaku yang teratur serta sistematis, sehingga kelompok tersebut sebenarnya bisa diidentifikasi bagian-bagiannya dan bisa dilihat sebagai suatu sistem sosial. Unsur-unsur pokok sistem sosial yang dapat diamati dalam analisis dinamika kelompok adalah:

- 1) Tujuan (segala sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok)
- 2) Keyakinan (*beliefs*) yaitu pengetahuan atau aspek kognitif yang dimiliki oleh sistem atau kelompok atau segala sesuatu yang dianggap benar oleh sistem atau kelompok.
- 3) Sentimen atau perasaan (*sentiments or feeling*) yaitu perasaan-perasaan dan emosi yang ada dalam kelompok.
- 4) Norma (*norms*) yaitu perilaku standar yang dapat diterima oleh sistem atau kelompok.
- 5) Sanksi (*sanctions*) yaitu sistem penghargaan dan hukuman terhadap perilaku kelompok atau anggota kelompok.
- 6) Peranan kedudukan (*status roles*) yaitu hirarki hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh komponen kelompok

- karena menempati posisi tertentu dalam kelompok.
- 7) Kewenangan/kekuasaan (*power/authority*) menyangkut kewenangan mengontrol orang lain dan kewenangan mengambil keputusan.
 - 8) Jenjang sosial, yakni segala sesuatu yang menyangkut kedudukan dalam kelompok serta prestise yang menyertai.
 - 9) Fasilitas menyangkut wahana ataupun alat yang perlu untuk mencapai tujuan kelompok.
 - 10) Tekanan dan ketegangan (*stress and strain*) adalah suasana tekanan mental dan ketegangan jiwa pada anggota.

D. Teori-Teori Sosiologi Makro

Untuk menelaah suatu realitas sosial dan memberi makna terhadap relitas sosial tersebut, kita harus mulai dengan membuat beberapa asumsi tentang sifat-sifat yang akan kita pelajari, misalnya menurut orang-orang Yunani kuno alam semesta beroperasi/berjalan sesuai dengan perilaku para dewa, sebaliknya para ilmuwan berasumsi bahwa alam semesta bersifat tertib dan berjalan menurut cara-cara yang teratur, sedang menurut pandangan Islam, alam semesta tunduk dan taat kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Karena itu Newton mengembangkan Hukum Gaya Berat setelah mengamati bahwa benda selalu jatuh ke bawah, tidak pernah ke atas. Seperangkat asumsi kerja itu disebut “suatu perspektif” atau “suatu pendekatan” atau “suatu paradigma paradigma”. Perspektif-perspektif yang dipakai dalam sosiologi makro antara lain; Perspektif Teori Struktural Fungsional, Perspektif Teori Konflik, Perspektif Teori Pertukaran.

1. Perspektif Teori Struktural Fungsional

Perspektif teori ini memiliki akar pemikiran dari Bapak Sosiologi Auguste Comte, tradisinya bisa dilihat lewat karya Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Sedangkan Malinowski dan Radcliffe Brown sebagai antropolog, sangat dipengaruhi teori Durkheim. Mereka kemudian mempengaruhi Sosiolog Amerika Talcott Parsons, yang kemudian memperkenalkannya kepada Robert K Merton. Perspektif teori struktural fungsional dipandang sebagai perspektif teori yang sangat

B A B VII

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendidikan Islam Masa Luqman

Keberhasilan Luqman dalam mendidik kepada anak-anaknya yang kemudian diabadikan nama Luqman di dalam salah satu nama Surat Al-Quran yaitu Surat Luqman. Ayat-ayat yang menjelaskan pendidikan orang tua kepada anak-anaknya terdapat dalam Q.S Luqman (31) ayat 13-19 yang artinya sebagai berikut; “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar. (13). Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.(14). Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(15). (Lukman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.(16). Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).(17). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya

pendidikan peran tersebut banyak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi saat fokus ke ekonomi peran tersebut tidak cukup sehingga masyarakat harus diberdayakan dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu pendidikan sangat membutuhkan kontribusi dari masyarakat dalam bentuk keuangan, evaluasi dan perencanaan. Agar peran serta masyarakat yang semakin esensial ini dapat mempunyai sumbangan yang besar dan memiliki akses langsung pada penyelenggaraan pendidikan, maka harus dibentuk lembaga sejenis dewan pendidikan mulai tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Sampai ke tingkat sekolah sehingga operasionalisasi menjadi lebih konkrit dan kontekstual.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa dengan pendidikan maka manusia akan lebih mampu mengadakan perubahan serta pembaharuan dalam kehidupan, baik secara mikro, maupun secara makro sehingga harapan ke depan : 1) dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan yang ditunjang oleh teknologi yang canggih sehingga dapat memperbaiki kehidupannya, 2) dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, sosial, budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 3) lebih memiliki rasa empati terhadap hasil perubahan yang ada di lingkungannya, 4) cepat tanggap terhadap kehidupan yang dialaminya, sehingga akan lebih mudah menyesuaikan, 5) mampu berpartisipasi dalam rangka ketahanan ideologi negara, 6) mampu berpartisipasi terhadap pembangunan politik, 7) mampu berpartisipasi dalam bidang ekonomi, 8) mampu mensukseskan sistem pendidikan terbuka, 9) mampu memberdayakan peran serta masyarakat.

dominan dalam perkembangan sosiologi dewasa ini. Seringkali, perspektif ini disamakan/dikenal dengan teori sistem, teori *equilibrium*, teori konsensus/teori regulasi.

Teori Struktural fungsional muncul dilatar-belakangi semangat *Renaissance*, pada masa Auguste Comte abad ke-17. Pada masa itu muncul kesadaran yang semula beranggapan manusia tidak punya otoritas untuk menjelaskan dan mengelola fenomena yang terjadi dalam masyarakat, semua sudah ditentukan oleh yang “di atas”, kemudian dipahami aturan dari yang “di atas” bukan selama-lamanya, artinya ada “celah” yang diberikan oleh yang “di atas” kepada manusia untuk mengelolanya. Pencerahan pada abad ke 17 ini, manusia bebas mencari dan menemukan “kebenaran” yang mendorong lahirnya ilmu pengetahuan (*positivistic*) dan teknologi, perkembangan ini membawa perubahan yang besar pada tatanan kehidupan di Eropa, khususnya Perancis.

Renaissance memunculkan revolusi politik dan perubahan Tataran Nilai. Menghadapi situasi tersebut mendorong agar pendidikan bisa melahirkan ilmuwan sosial yang sanggup membangun landasan baru dengan lebih berkonsentrasi untuk menciptakan tertib sosial, harmoni dan keseimbangan. Dengan demikian teori struktural fungsional mewarnai munculnya revolusi pengetahuan, terutama filsafat positivism yang melahirkan ilmu alam, oleh karena itu dalam perkembangannya, teori ini lebih mengambil inspirasi dari teori sistem organis.

Sistem organik ini menggambarkan masyarakat atau masyarakat diasumsikan seperti sistem tubuh manusia, sistem tubuh manusia ini terdiri dari sub-sub sistem menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan sub-sub sistem tersebut masing-masing mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri, begitu juga halnya dengan masyarakat, masyarakat yang terdiri dari individu-individu membentuk sistem sosial yang tidak bisa terpisahkan, masing-masing sub-sistem mempunyai fungsi dan peran sendiri-sendiri.

Studi tentang struktur dan fungsi merupakan masalah sosiologis yang telah menyita perhatian para pelopor ilmu Sosiologi. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah mempelajari tentang statika sosial

(struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi), ia mengemukakan landasan pemikiran bahwa "masyarakat adalah laksana organism hidup". Herbert Spencer, Sosiolog Inggris pada pertengahan abad ke-19, membahas tentang masyarakat sebagai suatu organism hidup, dapat diringkas dalam butir-butir sebagai berikut :

- 1) Masyarakat maupun organisme hidup sama-sama mengalami pertumbuhan.
- 2) Disebabkan oleh pertambahan dalam ukurannya, maka struktur tubuh sosial (*social body*) maupun tubuh organism hidup (*living body*) itu mengalami pertambahan pula; di mana semakin besar suatu struktur sosial maka semakin banyak pula bagian-bagiannya, seperti halnya dengan sistem biologis yang menjadi semakin kompleks sementara ia tumbuh menjadi semakin besar. Binatang yang lebih kecil, misalnya cacing tanah, hanya sedikit memiliki bagian-bagian yang dapat dibedakan bila dibanding dengan makhluk yang lebih sempurna, misalnya manusia.
- 3) Tiap bagian yang tumbuh di dalam tubuh organisme biologis maupun organisme sosial memiliki fungsi dan tujuan tertentu: "mereka tumbuh menjadi organ yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula". Pada Manusia, hati memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan paru-paru; demikian juga dengan keluarga sebagian struktur institusional memiliki tujuan yang berbeda dengan sistem politik atau ekonomi.
- 4) Baik di dalam sistem organisme maupun sistem sosial, perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya di dalam sistem secara keseluruhan. Perubahan sistem politik dari suatu pemerintahan demokratis ke suatu pemerintahan totaliter akan mempengaruhi keluarga, pendidikan, agama dan sebagainya. Bagian-bagian itu saling berkaitan satu sama lainnya.
- 5) Bagian-bagian tersebut, walau saling berkaitan, merupakan suatu struktur mikro yang dapat dipelajari secara terpisah. Demikian maka sistem peredaran atau sistem pembuangan merupakan pusat perhatian para spesialis biologi dan medis, seperti halnya system

makhluk dan anggota masyarakat.

- c. Proses perubahan pendidikan yang menumbuhkembangkan eksistensi manusia.
- d. Proses perubahan pendidikan yang membudaya.

Proses pendidikan harus dipandang sebagai proses penanaman, penghayatan nilai dari kemasyarakatan yang berbentuk pembudayaan. Status sekolah adalah sebagai wahana bagi perkembangan nilai-nilai yang nantinya diserap oleh anak didik untuk hidup berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, harapannya tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat dan Negara.

E. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan yang Terbuka.

Dalam era perkembangan ke arah yang lebih maju, pendidikan di Indonesia dibuka peluang bagi penyelenggaraan pendidikan yang memungkinkan pendidikan dilaksanakan secara sistem terbuka, yang sistemnya menjamin secara fleksibel bagi peserta didik (pelajar dan mahasiswa) untuk mengambil waktu penyelesaian program lintas lembaga pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan pada masa yang akan datang membuka kemungkinan adanya kerja sama antara pendidikan umum dan kejuruan, tentu saja memerlukan pengelolaan yang komprehensif serta manajemen yang sangat fleksibel dan sekaligus menggunakan berbagai sistem belajar yang didukung peralatan canggih. Dalam upaya ini diperlukan juga penyeimbang berupa pembaharuan dalam bidang sistem penyampaian materi, metode, evaluasi yang tepat serta paradigma baru pendidikan.

Dalam rangka menjalankan roda sistem pendidikan yang terbuka tersebut, dibutuhkan kesadaran baru dari masyarakat tentang hakekat pembelajaran sebagai pola transmisi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih kondusif sehingga pembaharuan sistem pendidikan pada implementasinya terdukung dengan kondisi kondusif masyarakat.

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Mutu pendidikan dan fungsi pendidikan dalam skala makro dapat ditingkatkan apabila melibatkan pemerintah sekaligus masyarakat. Dalam sentralisasi

Dalam hal ini Tilaar (2000: 76-80) menyebutkan perubahan pendidikan agar terjadi keseimbangan yang dilakukan oleh praktisi pendidikan (guru) adalah:

- a. Pendidik harus mampu menjadi motor / penggerak dan model bagi semua peserta didik untuk bias mengaktualisasikan nilai-nilai moral.
- b. Menjadikan masyarakat sekolah sebagai masyarakat bermoral.
- c. Mmengkondisikan praktik disiplin moral
- d. Menciptakan situasi demokrasi di kelas.
- e. Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum.
- f. Menciptakan budaya kerja sama (*cooperatif learning*).
- g. Menumbuhkan kesadaran karya.
- h. Mengembangkan refleksi moral.
- i. Mengajarkan resolusi konflik.

4. Peran Perubahan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi

Hingga memasuki abad XXI kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin tidak menguntungkan, walaupun apabila dilihat dari potensi alamnya. Indonesia termasuk negara yang menjanjikan dengan iklim dan sumber alam yang tersedia. Salah satu faktor penyebab terpuruknya perekonomian di Indonesia adalah mentalitas kualitas sumber daya manusianya yang masih melakukan praktik korupsi tersebut masih banyak menimpa di kalangan elite penguasa, bahkan sampai kepada nepotisme. Untuk menghilangkan adanya semua praktik yang merugikan rakyat dan Negara, maka Soekarwati (2000: 34) memiliki suatu pandangan bahwa perlu adanya suatu penanaman pendekatan pendidikan yang holistik (menyeluruh) kepada semua komponen baik sebagai pelajar dan mahasiswa, warga negara maupun sebagai elite penguasa. Pendekatan pendidikan itu antara lain:

- a. Pendidikan proses yang berkesinambungan, di mana proses perubahan pendidikan bukan berdiri sebagai kevakuman, akan tetapi selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik di lingkungan sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.
- b. Eksistensi manusia yang memasyarakat, artinya proses pendidikan harus diarahkan kepada manifestasi eksistensi manusia sebagai

politik atau sistem ekonomi merupakan sasaran pengkajian para ahli politik dan ekonomi. (Margaret M. Poloma, 1992: 24-25)

Konsep yang penting dalam perspektif ini adalah struktur dan fungsi, yang menunjuk pada dua atau lebih bagian atau komponen yang berbeda dan terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Struktur seringkali dianalogikan dengan organ atau bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan fungsi menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berhubungan dan bergerak. Misalnya perut adalah struktur, sedangkan pencernaan adalah fungsi. Contoh lain, organisasi angkatan bersenjata adalah struktur, sedangkan menjaga negara dari serangan musuh adalah fungsi. Struktur tersusun atas beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.

Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen dari masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/lokal dan sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status (posisi yang ditentukan secara sosial, yang diperoleh baik karena kelahiran (*ascribed status*) maupun karena usaha (*achieved status*) seseorang dalam masyarakat. Jaringan dari status sosial dalam masyarakat merupakan sistem sosial, misalnya jaringan status ayah-ibu-anak menghasilkan keluarga sebagai sistem sosial, jaringan pelajar-guru-kepala sekolah-pegawai-tata usaha, menghasilkan sekolah sebagai sistem sosial, dan sebagainya. Setiap status memiliki aspek dinamis yang disebut dengan peran (*role*) tertentu, misalnya seorang yang berstatus ayah memiliki peran yang berbeda dengan seseorang yang berstatus anak.

Sistem sosial mengembangkan suatu fungsi tertentu yang dengan fungsi itu memungkinkan masyarakat dan bagi orang-orang yang menjadi anggota masyarakat untuk eksis. Masing-masing menjalankan suatu fungsi yang berguna untuk memelihara dan menstabilkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Misalnya lembaga pendidikan berfungsi mengajarkan pengetahuan atau ketrampilan, lembaga agama berfungsi memenuhi kebutuhan rohaniah, keluarga berfungsi untuk sosialisasi anak dan sebagainya. Para penganut struktural fungsional mengasumsikan bahwa sistem senantiasa cenderung dalam keadaan keseimbangan atau *equilibrium*.

Suatu sistem yang gagal dari salah satu bagian dari sistem itu mempengaruhi dan membawa akibat bagi bagian-bagian lain yang saling berhubungan satu sama lain.

Setiap sistem sosial pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu : (1) apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu dan (2) konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem itu (fungsi lanjutan). Misalnya mata, fungsinya adalah melihat sesuatu dalam lingkungan. Fungsi lanjutan dari mata adalah dengan mata, orang dapat belajar, bekerja dan juga dapat melihat datangnya bahaya. Dalam masyarakat, lembaga pemerintahan memiliki fungsi utama menegakkan peraturan, sedangkan fungsi lanjutannya adalah menggerakkan roda perekonomian, menarik pajak, menyediakan berbagai fasilitas sosial dan sebagainya.

Menurut pandangan Robert Merton salah satu tokoh perspektif ini, suatu sistem sosial dapat memiliki dua fungsi yaitu fungsi manifest, yaitu fungsi yang diharapkan dan diakui, serta fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak diharapkan dan tidak diakui. Lembaga pendidikan sekolah taman kanak-kanak misalnya memiliki fungsi manifest untuk memberikan dasar-dasar pendidikan bagi anak sebelum ke jenjang sekolah dasar. Fungsi latennya, memberi pekerjaan bagi guru TK, membantu orang tua mengasuh anak selagi orang tuanya bekerja dan sebagainya.

Dalam pandangan Robert Merton, tidak semua hal dalam sistem selalu fungsional, artinya tidak semua hal selalu memelihara kelangsungan sistem. Beberapa hal telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam sistem, bahkan dapat saja menyebabkan rusaknya sistem. Ini oleh Merton disebut dengan disfungsi. Misalnya tingkat interaksi yang tinggi dan kaku dalam keluarga dapat menghasilkan disfungsi, antara lain dalam bentuk kekerasan dan perlakuan kasar atau penyiksaan pada anak.

Para penganut perspektif struktural fungsional ini berusaha untuk mengetahui bagian-bagian atau komponen-komponen dari suatu sistem dan berusaha memahami bagaimana bagian-bagian ini saling berhubungan satu sama lain suatu susunan dari bagian-bagian tersebut dengan melihat fungsi manifest maupun fungsi latennya. Kemudian

menangani kasus kejahatan dalam tataran birokrasi. Melihat realita perkembangan politik tersebut, maka pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang kemudian direfleksikan dalam kehidupan siswa (pelajar dan mahasiswa). Cara yang dilakukan dengan mendesain kurikulum dan bahkan mereformasi desain sistem pendidikan nasional yang memungkinkan berbagai kegiatan pendidikan yang dapat menuntut para siswa dan mahasiswa (masyarakat) untuk bisa memahami dan menerima nilai-nilai demokrasi.

Kegiatan pendidikan yang dimaksud menurut Buchori (2001 : 66) meliputi :

- a. Kegiatan membentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat.
- b. Latihan-latihan untuk mengembangkan kemampuan menyatakan pendapat secara jelas dan sopan.
- c. Latihan-latihan untuk membentuk kemampuan mengambil keputusan bersama mengenai masalah-masalah yang menyentuh kepentingan bersama.

Dalam alam demokrasi yang berke-Bhinnekaan, masalah penting lainnya yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan adalah masalah toleransi dan kebersamaan. Toleransi berarti kemampuan atau tindakan mengenali, menghargai kepercayaan dan adat istiadat yang diikuti oleh sekelompok orang. Dalam hal ini, manusia harus memahami bahwa proses kehidupannya harus diupayakan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin. Sikap tersebut perlu dikembangkan karena hidup merupakan proses perjalanan panjang yang harus dilalui dengan cara berinteraksi dan integrasi dengan lingkungan sekitarnya, dan berupaya untuk mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang.

Menurut Buchori (2001: 105) ada tiga jenis keseimbangan, yaitu:

- a. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani.
- b. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial budaya.
- c. Keseimbangan antara pengetahuan kehidupan di dunia, dan di akherat.

Walaupun ciri-ciri tersebut sebagai gambaran konstruk masyarakat masa depan, tetapi sudah mulai kita rasakan dampaknya pada kehidupan sekarang ini. Di antara gejala yang nampak adalah perubahan tata nilai dan toleransi, perubahan bidang politik, ekonomi, sosial, dan profesionalisme.

Sehubungan dengan kecenderungan masyarakat tersebut, maka pendidikan harus segera melakukan reorientasi program yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan mendatang yang sebagai acuannya adalah rumusan tujuan pendidikan nasional. UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas menggambarkan bahwa pendidikan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Bahkan boleh dikatakan pendidikan sebagai suatu proses untuk mempersiapkan aset-aset sumber daya manusia yang siap untuk mensukseskan program pembangunan di masa depan.

2. Peran Perubahan Terhadap Ketahanan Ideologi

Bangsa Indonesia merupakan sub sistem dari kehidupan masyarakat yang masing-masing akan melakukan proses interaksi, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan tatanan nilai lainnya. Apapun bentuk dan tatanan nilai, tersebut tidak bisa digoyahkan oleh pihak lain, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai ideologi bangsa dan sebagai Dasar Negara memuat nilai-nilai luhur bangsa, di mana nilai-nilai tersebut telah dirasakan oleh Warga Negara Indonesia, baik sebagai makhluk pribadi, sosial dan sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa.

3. Peran Perubahan Dalam Bidang Politik

Sejak kemerdekaan Indonesia hingga kehidupan politik telah mengalami berbagai macam sistem politik diantaranya sistem demokrasi Liberal, Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, hingga muncul Reformasi. Pada Orde Reformasi kebangkitan gerakan demokrasi tersebut telah nampak pada sektor eksekutif semakin menampakkan sikap keterbukaan dan kesediaan menerima kritik konstruktif. Pada sektor hukum menampakkan tanda-tanda transparansi dalam

mereka melakukan analisis mengenai manakah yang memberi sumbangan bagi terciptanya kelestarian sistem dan manakah yang justru menyebabkan kerusakan pada sistem. Dalam hal ini dapat saja suatu komponen menjadi fungsional dalam suatu sistem, tetapi menjadi tidak fungsional bagi sistem yang lain. Misalnya ketaatan pada suatu agama merupakan sesuatu yang fungsional dalam pembinaan umat beragama, tetapi tidak fungsional bagi pengembangan persatuan berbagai etnik yang beragama agamanya.

Teori struktural fungsional lebih menekankan pada perspektif harmoni dan keseimbangan. Asumsi yang mendasarinya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- 2) Setiap bagian dan sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas. Masyarakat secara keseluruhan; karena itu, eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- 3) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri; sekalipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna, namun sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah itu.
- 4) Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual, melalui proses penyesuaian, dan tidak terjadi secara revolusioner.
- 5) Faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu
- 6) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan *equilibrium* atau *homeostatic*. (Sanderson dalam Zainuddin, 1991: 119)

Selain itu, menurut Tjipto Subadi, Teori Struktural Fungsional mengacu pada asumsi bahwa:

- 1) Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi.
- 2) Hubungan yang ada dapat bersifat satu arah atau timbal-balik

- 3) Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada tidak perlu mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh
- 4) Integrasi yang sempurna dalam masyarakat tidak pernah ada, oleh karenanya di masyarakat senantiasa timbul ketegangan dan penyimpangan. Akan tetapi hal tersebut akan dinetralisir lewat kelembagaan.
- 5) Perubahan-perubahan yang terjadi akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian
- 6) Perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya inovasi dan deferensiasi, dan
- 7) Sistem diintegrasikan lewat nilai-nilai yang sama

Maka Anggapan dasar teori ini dapat disimpulkan sebagai berikut; Masyarakat adalah suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Hubungan dalam masyarakat bersifat ganda dan timbal-balik (saling mempengaruhi). Secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak kearah *equilibrium* dan bersifat dinamis. Disfungsi/ketegangan sosial/penyimpangan sosial/penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial bersifat gradual melalui penyesuaian dan bukan bersifat revolusioner. Faktor terpenting dalam integrasi adalah konsensus.

Karena asumsi dasar teori struktural fungsional seperti tersebut di atas maka sangat peduli terhadap kontrol efektifitas hukum keteraturan serta faktor-faktor yang mempersatukan masyarakat. Oleh karena itu teori ini lebih dikenal sebagai teori konsensus (*consensus theory*) atau teori regulasi (*regulation theory*). Pandangan-pandangannya di dasarkan pada filsafat *realism*, *positivism*, dan oleh karena itu cenderung *deterministic*, dimana struktur menentukan tindakan atau perilaku, dan oleh karena itu tradisi ini lebih memilih jenis pengetahuan *non ethic* dari pada normatif.

2. Perspektif Teori Konflik

Kata “konflik” bersal dari kata *conflict* yang berarti saling benturan, arti kata ini menunjuk pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidakserasian, ketidaksesuaian, pertentangan, perkelahian, interaksi

kebutuhan dan potensi daerah. Untuk melaksanakan itu semua, maka sekolah perlu mengundang berbagai pihak, antara lain keluarga, masyarakat, dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan (Jalal, 2001: 99). Perubahan-perubahan *setting social* budaya masyarakat sebagaimana tergambar pada uraian di atas, telah secara jelas berpengaruh terhadap perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional.

1. Pendidikan dan Paradigma Masyarakat Indonesia Masa Depan

Perkembangan dan perubahan masyarakat akan terasa pada abad XXI, secara internal, Indonesia berada pada tataran kehidupan yang kritis di berbagai bidang, baik ekonomi, politik maupun sosial budaya termasuk bidang pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, telah mengalami berbagai perubahan pendidikan masyarakat Indonesia tersebut didasarkan pada paradigma baru yang mempunyai pandangan terhadap pendidikan secara holistic (Zamroni, 2000 : 155-175).

Isu lain yang menjadi sebuah wacana adalah reformasi kehidupan masyarakat menuju masyarakat madani. Corak kehidupan masyarakat madani menurut Tilaar, (2000: 155) terletak pada hakekat manusia yang memiliki kesamaan kemanusiaan, dan bercirikan *human dignity* atau hak-hak dan tanggung jawab manusia dalam kebhinekaan. Sejalan dengan itu maka pembangunan harus menempatkan warga masyarakat pada titik sentral, menempatkan lingkungan sebagai suatu sistem di mana manusia sebagai pusatnya (Muhajir, 1987: 11). Secara menyeluruh akan dan sedang terjadi perubahan besar dalam system kehidupan bangsa Indonesia yang mulai menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebhinekaan. Menurut Tirtoharjo (1994: 135) mengatakan bahwa konstruk masyarakat masa depan digambarkan sebagai berikut;

1. Kecerdasan globalisasi,
2. Perkembangan IPTEK yang semakin cepat,
3. Perkembangan arus informasi yang semakin padat,.
4. Tuntutan layanan professional di berbagai sektor pendidikan.

berkurang, termasuk pula kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin nyata. Dengan semikian, pendidikan manusia seutuhnya dan seluruhnya belum dirasakan oleh masyarakat secara luas. Permasalahan yang timbul adalah “Bagaimanakah peranan pendidikan sebagai proses pembaharuan”.

Pendidikan merupakan sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada lainnya guna mencapai tujuan. Mastuhu (1994: 20) berpendapat bahwa dilihat dari prosesnya, pendidikan akan berlangsung secara terus menerus seiring dengan dinamika perubahan *setting social* budaya pada masyarakat dari jaman ke jaman, perubahan yang terjadi di masyarakat akan segera diikuti dengan reorientasi program pendidikan. Orientasi pendidikannya lebih diarahkan pada penguasaan nilai-nilai agama. Corak pendidikannya lebih diwarnai oleh pandangan hidup Nabi tentang konsep teologi, manusia, kehidupan, tugas dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan, pendidikan dan lain-lain.

Pada orde reformasi yang dimulai sejak tumbangnya orde baru, yang telah mengubah sistem kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Perubahan tersebut termasuk bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya, dari sistem otokrasi sentralistik, menuju otonomi daerah untuk lebih menekankan dan memandirikan daerah, memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri (Jalal, 2001: 33).

Perubahan kondisi politik yang memberikan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tersebut diikuti dengan program otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Dalam bidang pendidikan otonomi daerah bertujuan meningkatkan kinerja pendidikan di daerah melalui pemberdayaan kemampuan lokal, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, terjaminnya pemerataan pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, dan semakin meningkatkan mutu pendidikan bangsa (Jalal, 2001: 60).

Desentralisasi pendidikan sebenarnya lebih difokuskan pada penataan kewenangan antara pusat dan daerah, sehingga daerah perlu memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan

antagonis (Kartini Kartono, 1991: 213) konflik semacam ini konflik yang negatif. Konflik yang positif bisa diartikan; pemetisi, berlomba, *fastabiku khairot*/berlomba dalam kebaikan. Pada dasarnya teori konflik berasumsi bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berkompetisi, bersaing, berlomba, berbeda dengan orang lain.

Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai; (1) persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain (2) keadaan atau perilaku yang bertentangan (3) perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan, dan (4) perseteruan sementara (Said 1998: 153). Sebenarnya teori konflik tidak selalu berdimensi negatif, tetapi ada yang positif, misalnya seorang guru memberikan ujian mid semester, ujian semester, orang tua menjanjikan anak-anaknya jika lulus ujian dengan prestasi yang baik akan diberi hadiah. Margaret M. Poloma (1992: 108) menjelaskan bahwa konflik secara positif akan membantu struktur sosial dan jika terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat.

Berdasarkan manfaatnya konflik dapat dikelompokkan ke dalam konflik fungsional dan konflik disfungsional, Gibson (1996) menjelaskan; konflik fungsional adalah suatu konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kerja. Pertentangan antar kelompok yang fungsional dapat memberikan manfaat bagi peningkatan efektifitas dan prestasi organisasi. Konflik ini tidak hanya membantu tetapi juga merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk menumbuhkan kreativitas. Kelompok yang anggotanya heterogen menimbulkan adanya suatu perbedaan pendapat yang menghasilkan solusi lebih baik dan kreatif. Konflik fungsional padat mengarah pada penemuan cara yang lebih efektif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat hidup terus dan berkembang.

Adapun konflik disfungsional adalah konfrontasi atau pertentangan antar kelompok yang merusak, merugikan, dan menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Sehubungan dengan itu setiap organisasi harus mampu menangani dan mengelola serta mengurangi konflik agar memberikan dampak positif, dan meningkatkan prestasi, karena konflik yang tidak dikelola dengan baik

dapat menurunkan prestasi dan kinerja organisasi.

a. Ikatan Kelompok dan Pemeliharaan Fungsi Fungsi Konflik Sosial

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi konflik positif itu (keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur) dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out-group*. Konflik yang sedang berlangsung dengan *out-groups* dapat memperkuat identitas para anggotanya, misalnya terjadinya perang Timur Tengah yang bertahun-tahun telah memperkuat identifikasi *in-group* negara Arab dan Israel.

Pareto dalam Robert H. Lauer (1993: 280) bahwa sejarah sebagai perjuangan memperebutkan kekuasaan yang tak berkesudahan. Kelompok dominan berusaha memelihara dan mempertahankan kedudukannya, kekuatan adalah faktor terpenting dalam mempertahankan stabilitas. Kekerasan mungkin diperlukan untuk memulihkan keseimbangan sosial jika keseimbangan itu terganggu. Kekerasan tak memerlukan pembenaran moral, karena kekerasan mempunyai kualitas pembaharuan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tak rasional dari sifat bawaannya sendiri.

Menurut Dahrendorf, terdapat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan “seluruh kreativitas, inovasi, dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompoknya dan masyarakatnya, disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, serta antara emosi dengan emosi di dalam diri individu. Menurutnya konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antara kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada.

nasionalistis mengakibatkan kehidupan ekonomi bangsa terisolasi. Dalam kehidupan kebudayaan sangat ditonjolkan kehidupan nasionalisme yang mengarah pada nasionalisme yang sempit atau *chauvinisme*, demikian juga dalam bidang kebudayaan sangat ditonjolkan terbentuknya identitas yang cenderung berlebihan (Mulyasa, 2004: 39). Pendidikan lebih diarahkan pada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Dengan sendirinya, pendidikan tidak difungsikan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, akan tetapi lebih diorientasikan kepada kebutuhan politik.

Tilaar (2005: 74) berpendapat karena ekonomi lebih dijadikan panglima, maka akan melahirkan ekonomi yang tanpa perasaan, yang berakibat terjadinya kesenjangan di daerah, antar sektor dan masyarakat. Memperhatikan pandangan ini, menurut Suparlan (2003: 38) sepertinya kehidupan ekonomi akan mengalami kerapuhan, sehingga akibatnya dunia ekonomi Indonesia akan tergantung pada dunia luar. Akibat dunia ekonomi yang demikian, akan melahirkan suatu sistem pendidikan yang tidak peka untuk meningkatkan daya saing yang tidak produktif akibatnya terjadi ketergantungan bahan baku impor. Pendidikan juga tidak mempunyai akuntabilitas sosial, karena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya, Akibatnya akan lahir ekonomi biaya tinggi, penanganan kehidupan tidak profesional.

Kehidupan hukum yang merugikan masyarakat umum, akibatnya terjadi pemerintahan yang tidak bersih, dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Kesadaran politik masyarakat semakin lemah, masyarakat semakin menutup karena adanya pemimpin-pemimpin yang buta moral. Akibat dari itu semua kehidupan masyarakat sepertinya kurang memfungsikan kehidupan beragama. Kehidupan sosial dan budaya secara maksimal, lebih diarahkan kepada kepentingan politik.

Sejalan dengan itu, kualitas kehidupan beragama menjadi semu, bahkan agama belum dijadikan sebagai sumber nilai. Kehidupan beragama semakin luntur. Maka akan timbul budaya kekerasan dan premordialisme yang semakin kental. Keteladanan pemimpin semakin

muatan keilmuan dalam pendidikan. Transformasi keilmuan yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada target habisnya kurikulum pendidikan, yang lebih penting juga adalah penguasaan kemampuan metodologis yang terefleksi pada kemampuan berfikir secara mandiri dan kritis (*independent critical thinking*).

D. Penadidikan Proses Perubahan

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan kita membentuk Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenyataannya yang tidak bisa dibantah adalah bahwa bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat *survive* di dalam menghadapi berbagai tantangan atau bangsa yang sedang dilanda krisis dari berbagai dimensi. Kita pernah dilanda dan akan keluar dari berbagai krisis itu misalnya krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, krisis kebudayaan, dan krisis pendidikan. Memang pendidikan tidak bisa terlepas dari kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan suatu bangsa. Bukankah pendidikan merupakan proses pembudayaan, dan kebudayaan itu sendiri berkembang karena pendidikan?

Dengan demikian di dalam masa krisis dewasa ini, ada dua hal yang menonjol, yaitu:

1. Bahwa pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspek yaitu ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan.
2. Krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia dewasa ini merupakan pola refleksi dari krisis pendidikan nasional (Tilaar, 2005: 32).

Pendidikan tidak terlepas dari politik, sungguhpun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Kenyataannya adalah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, fungsi dan peranan pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum dan kebudayaan pada umumnya.

Masa Orde Baru, politik dijadikan sebagai panglima, di mana segala kegiatan diarahkan berbagai usaha untuk mencapai tujuan politik, misalnya membangkitkan nasionalisme, rasa persatuan bangsa, penggalangan kekuasaan bangsa. Kehidupan ekonomi yang terlalu

Pandangan Dahrendorf ini sebenarnya jauh lebih ruwet, namun inti pemikirannya terkandung dalam 4 proposisi sebagai berikut: (1) Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial terjadi di mana saja (2) setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik, konflik sosial terdapat di mana saja (3) setiap unsur dalam satu masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahan (4) setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota yang lain. (Dahrendorf, 1976: 162).

Ringkasnya, Dahrendorf menyatakan, konflik kelas (konflik mengenai hubungan kekuasaan atau yang muncul di luar hubungan kekuasaan) menyebabkan perubahan struktur (perubahan nilai-nilai atau pranata). Konflik seperti ini merembes karena hubungan kekuasaan merembes. Akibatnya perubahan terjadi di mana-mana.

b. Dampak Konflik

Konflik dapat berakibat positif atau menguntungkan dan bisa berdampak negatif atau merugikan. Dampak positif akibat konflik antara lain:

- 1) Menimbulkan kemampuan introspeksi diri. Konflik dapat dirasakan oleh pihak lain, dan mereka dapat mengambil keuntungan sehingga mampu melakukan introspeksi diri, karena mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik.
- 2) Meningkatkan kinerja. Konflik bisa menjadi cambuk sehingga menyebabkan peningkatan kinerja. Konflik dapat mendorong individu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia mampu meningkatkan kinerja dan mencapai sukses.
- 3) Pendekatan yang lebih baik. Konflik bisa menimbulkan kejutan (*surprise*) karena kehadirannya sering tidak diduga, sehingga setiap orang berusaha lebih hati-hati dalam berinteraksi, dan menyebabkan hubungan yang lebih baik.
- 4) Mengembangkan alternatif yang lebih. Konflik bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak tertentu jika terjadi antara atasan dengan bawahan, misalnya tidak memberi suatu jabatan atau

memberi hukuman yang berlebihan. Kondisi ini sering menjadi tantangan untuk mengembangkan solusi yang lebih baik.

Adapun dampak negatif dari konflik adalah;

- 1) Subjektif dan emosional. Pada umumnya pandangan pihak yang sedang konflik satu sama lain sudah tidak objektif dan bersifat emosional.
- 2) Apriori. Jika konflik sudah meningkat bukan hanya subjektivitas dan emosional yang muncul tetapi dapat menyebabkan apriori, sehingga pendapat pihak lain selalu dianggap salah dan dirinya selalu merasa benar.
- 3) Saling menjatuhkan. Konflik yang berkelanjutan bisa mengakibatkan saling benci yang memuncak dan mendorong individu untuk melakukan tindakan kurang terpuji untuk menjatuhkan lawan, misalnya menfitnah, menghambat, dan mengadu.
- 4) Stress Konflik yang berkepanjangan tidak saja dapat menurunkan kinerja, tetapi bisa menimbulkan stress. Stress terjadi karena konflik tersebut menimbulkan ketidakseimbangan fisik dan psikis sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan yang intensitasnya sudah terlalu tinggi.
- 5) Frustrasi, Konflik dapat memacu berbagai pihak yang terlibat untuk lebih berprestasi, tetapi jika konflik tersebut sudah pada tingkat yang cukup parah dan di antara pihak-pihak yang terlibat ada yang lemah mental bisa menimbulkan frustrasi.

c. Manajemen Konflik

Konflik akan terjadi di sekolah sejalan dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan dan tuntutan pekerjaan, sehingga Kepala Sekolah harus mampu mengendalikannya, karena dapat menurunkan prestasi dan kinerja. Kemampuan mengendalikan konflik yang terjadi di sekolah menuntut ketrampilan manajemen tertentu, yang disebut manajemen konflik.

Manajemen konflik setidaknya memiliki tiga tahapan. Pertama, perencanaan analisis konflik. Tahap ini merupakan tahap identifikasi masalah yang terjadi, untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-

masih bertahan dalam status quo-ortodoksi keberagamaan, tanpa diimbangi oleh semangat ortopraksi; suatu semangat keagamaan dengan terus menerus melakukan suatu refleksi kritis dalam mencari makna keberagamaan dalam konteks kehidupan sosiokultural (Wirosardjono, 1988). Dari kenyataan masalah ini, perlu dikembangkan apa yang oleh Simuh (1987) dengan pendekatan etis-filosofis. Pendekatan etis dibutuhkan untuk memahami nilai-nilai sakral (transendental) dari pada diktum-diktum ilahiyah dalam dalil nash, sedangkan pendekatan filosofis diorientasikan pada pengembangan daya kritis dalam memahami esensi ajaran agama.

Pada fungsi progresif-dinamis pendidikan. Pengembangan fungsi ini sebagai konsekuensi pendidikan sebagai suatu sistem yang terbuka (*open system*), yang harus bersikap terbuka dan bergumul dalam arus utama perubahan masyarakat. Dengan posisi tersebut, adalah mustahil jika pendidikan akan menutup dirinya kalau tidak ingin pendidikan mengalami alienansi sosial dan kultural. Seperti analisis Marx, alienansi sosial bisa saja terjadi bila individu dan kelompok sosial maupun lembaga sosial yang ada, tidak mempunyai akses langsung pada pemilikan sumber-sumber produksi. Jika institusi sosialnya sudah mengalami keterasingan dan marginalisasi, tidaklah mustahil jika individu-individunya mengalami kenyataan yang sama.

Dengan kecenderungan masyarakat yang mengarah pada proses kapitalisasi, keterasingan sosial dapat mewabah secara sistematis dan sistemik dalam masyarakat. Dalam fungsi yang kedua ini, pendidikan tidak lagi sebagai konservator budaya, tetapi diarahkan pada aktualisasi budaya dengan cakupan budaya yang lebih luas. Artinya, pendidikan tidak hanya mencerminkan sebagai keadaan kebudayaan, tetapi sebagai medium yang dapat mendinamisir pembaharuan dan memperkembangkan kebudayaan agar dicapai kemajuan (Fadjar, 1991).

Menyadari peran pendidikan dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial, maka kedua orientasi pendidikan di atas mengandung implikasi global pada penataan sistem pendidikan, lebih-lebih pada perangkat lunaknya seperti yang berkaitan dengan isi (kurikulum) dan metodologi pendidikan. Penataan isi pendidikan berkaitan dengan

nilai kemutlakan (absolut) sangat penting dijadikan orientasi utama bagi pendidikan, di samping pendidikan harus terus menerus bersikap terbuka dalam arus utama perubahan sosial. Dengan penekanan orientasi ini, akan menghasilkan makna ganda sekaligus; yaitu terjadinya kekokohan pribadi sebagai hasil dari akumulasi nilai dalam pendidikan, dan secara resultance, mendangkalkan makna berikutnya berupa adanya kemampuan untuk menginduksi tuntutan perubahan sosial dengan tetap berpijak pada kerangka nilai (*value judgement*) yang ada.

Bertolak dari kepentingan di atas, ada dua fungsi pendidikan yang harus dilakukan. (1) fungsi normatif, (2) fungsi progresif-dinamis. Pada normatif, pendidikan terbatas pada proses alih nilai (transferensi) sesuai dengan preferensi nilai sebelumnya. Fungsi ini lebih menekankan pada fungsi pendidikan yang bersifat tradisional sebagai konservator budaya (Tilaar, 1992). Penanaman nilai ini diarahkan dan ditunjukkan pada terbentuknya nilai-nilai dasar umum, yang selanjutnya secara otomatis akan dapat mengembangkan nilai-nilai lainnya yang relevan. Dengan menggunakan terminologi yang di buat Kuhn, Sumantri (1986) menyebut nilai-nilai dasar ini dengan paradigma; suatu konsep dasar yang dianut oleh masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, maka kegiatan pendidikan secara sadar harus mengandung muatan nilai baru yang selanjutnya dikembangkan secara terarah dan sistematis melalui pendekatan yang relevan. Oleh karena itu, dalam rangka penanaman nilai ini perlu dihindari cara-cara yang bersifat non-edukatif seperti yang dilakukan melalui upaya indoktrinasi yang dogmatis. Karena pendidikan merupakan upaya humanisasi, maka pendekatan yang digunakan harus mencakup aspek rasionalitas (kognitif) dan apresiasi (afektif) yang mungkin bertumbuhnya pengetahuan menjadi sikap yang selanjutnya tercermin dalam perbuatan.

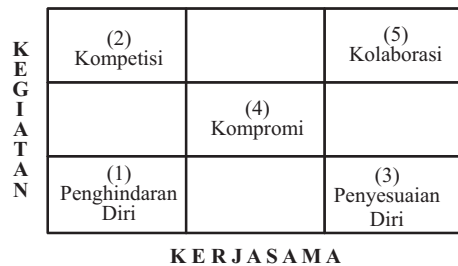
Dalam beberapa kasus, justru dalam pendidikan agama masih banyak dijumpai ketimpangan pada segi metodologinya, yakni masih didominasi oleh pendekatan indoktrinasi yang menjurus pada berkembangnya sikap dokmatis yang eksklusif dan ekstrim. Kenyataan ini tidak bisa dilepaskan dari *performance* keagamaan yang ada, yang

pihak yang terlibat. Konflik yang sudah dalam tahap terbuka mudah diketahui, tetapi jika masih dalam tahap potensi memerlukan stimulus agar menjadi terbuka dan dapat dikenali. Kedua, penilaian konflik. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi konflik dan pemecahannya. Apakah konflik sudah mendekati titik rawan, dan perlu direndam agar tidak menimbulkan dampak negatif, apakah masih pada titik kritis yang dapat menimbulkan dampak positif, atau baru dalam tahap tersembunyi, sehingga diberi stimulus agar mendekati titik kritis dan memberikan dampak positif. Ketiga, pecahan konflik. Tahap ini merupakan tindakan untuk memecahkan konflik, termasuk memberi stimulus jika masih dalam tahap tersembunyi dan perlu dibuka.

Pemimpin dapat menjadi pihak utama dalam konflik-konflik yang terjadi di suatu organisasi, yakni melibatkan diri secara aktif dalam situasi konflik yang berkembang, pada kasus apapun pemimpin harus menjadi partisipan yang terampil dalam dinamika konflik, sehingga dapat meningkatkan prestasi seluruh tenaga bawahnya.

Meskipun konflik sudah meruncing dan mengganggu serta membahayakan pencapaian tujuan organisasi, pemimpin tetap harus dapat mengatasinya. Untuk dapat mengatasi konflik perlu memahami sebab dan sumbernya, berdasarkan pemahaman akan sebab dan sumber konflik dapat dicarikan jalan pemecahan yang paling baik.

Thomas (1989) mengembangkan lima kecenderungan proses alamiah dalam penyelesaian konflik, yaitu penghindaran diri, kompetisi, penyesuaian diri, kompromi dan kolaborasi. Kecenderungan ini disusun berdasarkan derajat kemampuan untuk memuaskan kepentingan orang lain dan kepentingan diri sendiri. Kecenderungan tersebut bukan satu-satunya pendekatan atau cara untuk menyelesaikan dan mengelola konflik, jika konflik sudah benar-benar meluas maka usaha penyelesaian masalah perlu dilakukan melalui pertemuan tatap muka dengan pihak yang bertentangan untuk mengadakan negosiasi, menjalin kerjasama, menghindarkan konflik dengan meningkatkan kualitas personil yang menjadi sumber pertentangan sehingga dapat mengubah sikap dan perilakunya.



Lima kecenderungan penyelesaian konflik secara alamiah yang diungkapkan Thomas tersebut merupakan interaksi antara dimensi kerjasama dan kegigihan pihak terkait seperti tampak pada gambar di atas. Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jika kegigihan dan kerjasama pihak terkait rendah maka mereka akan berusaha menghindari diri, sehingga konflik tidak tampak (1). Jika pihak terkait sangat gigih gigih dan sulit untuk kerjasama, maka akan terjadi kompetisi dan pihak yang lebih kuat akan menang serta memaksakan kehendaknya kepada yang lemah (2) Jika dorongan untuk kerjasama di antara pihak terkait sangat baik, tetapi kegigihannya rendah, maka akan terjadi penyesuaian diri, dan mementingkan terjaganya hubungan, sedangkan prinsipnya dikesampingkan (3). Jika kegigihan dan kemauan kerjasama antar pihak terkait sama-sama sedang, maka akan terjadi kompromi (4). Jika kegigihan dan kemauan kerjasama antar pihak terkait sama-sama tinggi, maka akan terjadi kolaborasi untuk mencari pemecahan masalah yang paling efektif (5), pola inilah yang biasanya memberikan penyelesaian yang terbaik.

Lahirnya teori konflik merupakan suatu reaksi atau sebagai bagian dari perkembangan fungsional struktural atau teori konflik lebih berada pada puncak perkembangan fungsional-struktural dari pada sebagai teori kritik sosial yang sebenarnya, bahkan dikatakan teori konflik merupakan kumulasi kritik terhadap fungsional struktural atau sebagai pandangan alternatif tentang masyarakat dan perubahannya (Ritzer, 1996: 127). Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa suatu masyarakat akan dapat menjadi lebih jelas bila kita memandang berdasarkan kedua teori tersebut.

Akar dari semua kesenjangan di atas, bisa jadi karena adanya kelambanan pendidikan untuk beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja, atau bahkan kurang mampu memahami apa yang sekarang terjadi ditinjau secara ekonomis, politis dan teknologis.

Kedua, kesenjangan akademik. Yang dimaksud dengan kesenjangan ini adalah seberapa jauh akumulasi pengetahuan yang diberikan secara transmittif melalui proses pendidikan dapat dijadikan wacana konseptual dalam mengantisipasi permasalahan global. Dilihat dari kepentingan ini, tampaknya pendidikan masih berada dalam tataran yang sangat kritis, karena proses transmisi pengetahuan masih belum beranjak dari kecenderungan pendekatan *formalisme*, dengan tanpa mengaitkan sama sekali dengan perkembangan informasi global.

Ketiga, kesenjangan di bidang kultural. Kesenjangan ini sering terjadi pada jenis sekolah atau lembaga pendidikan yang menekankan pengetahuan klasik (tradisional), dan terlampau banyak menekankan pada humaniora serta mengabaikan kenyataan bahwa telah terjadi modernisasi yang bersumber pada kemajuan sains dan teknologi. Program pendidikan seperti itu akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kultural.

Sedangkan kesenjangan keempat, adalah kesenjangan yang bersifat temporal yang erat kaitannya dengan proses perjalanan waktu 10-25 tahun yang akan datang. Sementara perkembangan sudah berjalan begitu cepatnya. Namun, di pihak lain masih adanya kelambanan dunia pendidikan dalam mengantisipasi arus perubahan global tersebut dengan menyiapkan subyek didik baik yang ada hubungannya dengan kualitas pengetahuan, skill, dan integrasi moral.

Menghadapi sejumlah permasalahan di atas, suatu keharusan bagi pendidikan melakukan rekonstruksi pada kerangka orientasi budayanya. Rekonstruksi yang dilakukan tidak harus berakibat pada terpolanya pendidikan pada suatu visi yang ekstrim seperti yang telah dibahas di atas. Pemikiran semacam ini sudah barang tentu tidak akan memberikan kerangka pendekatan yang dapat menjembatani kepentingan pendidikan dalam memberikan acuan nilai di tengah-tengah perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi imperatif untuk memperkokoh jati diri kemanusiaan dengan mengacu pada nilai-

kritis. Dalam posisi yang pertama pendidikan menyimpan suatu kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup, dan dapat memberi informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup masa depan, serta membantu anak didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan (Fajar, 1984). Seorang sosiolog kenamaan, Emile Durkheim, seperti dikutip Saefuddin (1987) mengatakan, bahwa pendidikan memegang kendali penting dalam mempertahankan kelanggengan kehidupan sosial masyarakat, yaitu mampu hidup konsisten mengatakan segala ancaman dan tantangan masa depan.

Sedangkan pada posisi kedua dikatakan pendidikan menempati posisi kritis, karena dengan kedudukannya sebagai bagian dari institusi sosial, maka pendidikan harus melakukan langkah adoptif dan adaptif. Jika kedua langkah ini tidak dilakukan, maka yang terjadi kemudian adalah adanya kekhawatiran munculnya *krisitisme* di bidang pendidikan, yang ditandai dengan berkembangnya beberapa bentuk kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kehidupan. Kekhawatiran inilah yang sedang menggejala sekarang ini seperti yang telah disinyalir Buchori (1990) dalam tulisannya dalam analisis pendidikan bahwa dalam dunia pendidikan telah terjadi beberapa bentuk kesenjangan yang sangat mendasar.

Pertama, kesenjangan *occupational*, diakuinya perkembangan dari segi kuantitatif pendidikan, yang tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan semakin memperparah kondisi pengangguran intelektual (*skilled employment*), khususnya dari masyarakat dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Masalah ini merupakan masalah yang cukup serius mengingat implikasi globalnya terhadap pendidikan sendiri, maupun pada sektor lainnya seperti yang tampak pada: (i) terbuangnya secara percuma investasi di bidang pendidikan, (ii) pembangunan nasional terpaksa tidak bisa memanfaatkan sumber daya manusia (*human resources*) yang sebenarnya sangat potensial, (iii) timbulnya akibat-akibat negatif di dalam masyarakat terutama pada lulusan PT, mengingat status sarjana dalam stratifikasi sosial bisa menjadi kelompok penekan berpengaruh (*pressure group*) Firmansyah, Suara Indonesia, Jum'at, 3 Juni 1988).

Pergeseran pandangan dari teori fungsional struktural ke teori konflik terjadi pada awal dasa warsa 1960-an yakni dari orde dan peranan sosial ke konflik. Perlu dicatat bahwa teori konflik mempunyai akar yang bervariasi seperti teori Marxian, karya-karya Simmel tentang konflik sosial. Veeger (1990: 210) misalnya, menyatakan bahwa sebenarnya konflik sosial ini telah terungkap dalam sosiologi abad 19, seperti Darwinisme sosial telah melukiskan kehidupan bersama dengan menggunakan istilah *struggle* dan *survival of the fittest*. Vilfredo Pareto, melukiskan pertentangan dua tipe individu dalam mekanisme pergolakan dunia politik yakni antara *the lions* dan *the foxes*, yang secara bergilir menunggu kesempatan untuk berkuasa. W.G. Sumner telah menciptakan konsep kerjasama yang antagonistik yang diandalkan sebagai inti masyarakat.

Teori konflik yang berasal dari ide-ide Marx, memang tidak diberi nama teori konflik, tetapi pengaruhnya sangat besar, banyak dibicarakan dan dipelajari bahkan ditafsirkan dan dikritik terutama dalam kajian sosiologi. Dalam uraian tentang teori konflik misalnya Ramlan Surbakti (1997) memilih tiga kelompok kajian konflik yaitu Kelompok Marxian dengan tokoh Karl Marx, Aliran Neo Marxian dengan tokoh-tokohnya Robert Michels, Charles Wright Mill, Randall Collins, Wallerstein, Habermas, dan Gramsci. Kelompok Non-Marxian diwakili oleh Dahrendorf, Ceser dan Robert Park serta Ernest Burgess.

3. Marxianisme Karl Marx

Latar belakang pribadi Marx, ia lahir dari suatu keluarga Rabbi Yahudi di kampung Trier, Rhineland pada tahun 1918, yang kemudian beralih ke Kristen untuk menghindari hukum-hukum yang diskriminatif. Sebagai mahasiswa hukum dan filsafat di Berlin. Jurnalistik politiknya sering menyerang hukum penyensoran dan karenanya dibuang ke Paris dan bergabung dengan para Sosialis dan buruh industri di London. Hidup miskin bersama aktivis, mengorganisir gerakan-gerakan sosialis dan mengartikulasikan gagasan-gagasannya dan lahirlah kemudian *Communist Manifesto* (1948).

a. Kontek Sosial

Konteks sosial tempat lahirnya Marxisme. Marxisme lahir sebagai suatu produk masyarakat abad 19 di berbagai negara Eropa (Inggris, Perancis dan Jerman) suatu jaman perkembangan industri yang sangat pesat, masa pergolakan politik dan perubahan sosial yang besar-besaran. Marxisme muncul di tengah-tengah situasi sosial tempat buruh industri di kota-kota yang sengsara dan tercabut hak-haknya (*deprivation*), kemiskinan yang tidak manusiawi oleh pemilik pabrik. Marx sendiri pernah hidup sengsara sebagai orang buangan di Paris, Brussel dan London (Campbell: 1981: 135).

b. Asumsi-Asumsinya

Marxian modern telah memformat dan mengelaborasi gagasan-gagasan Marx dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau pertentangan di antara dan di dalam kelompok yang bertentangan.
- 2) Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuatan-kekuatan politik merupakan hal yang penting yang berbagai kelompok berusaha merebutnya.
- 3) Akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok determinan dan kelompok yang ter subordinasi.
- 4) Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok determinan.
- 5) Konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial.
- 6) Karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi (Sanderson, 1995: 12).

Marx dengan asumsi-asumsi tradisionalnya menggambarkan masyarakat dalam konsep *materialism histories* dengan menyatakan bahwa sejarah manusia dipengaruhi oleh kebutuhan material yang harus dipenuhi dan ini melahirkan pertentangan kelas (konflik), revolusi, lalu muncul masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis yang bebas konflik, kreatif.

ditandai dengan adanya (i) tata aturan yang semakin rasional, (ii) hubungan yang semakin dinamis, (iii) hilangnya pertimbangan yang bersifat pribadi (personal), digantikan dengan hubungan yang lebih bersifat tak pribadi (Efendy, 1989).

Perubahan masyarakat dengan corak kultural tersebut di atas, merupakan fenomena sosio-historis yang pasti terjadi sebagai proses kontinum dari perkembangan kehidupan global yang tidak mengenal proses berhenti. Ibnu Kaldun mengatakan dalam Muqodimah-nya: "tidak ada masyarakat manusia yang tidak berubah", karena seperti yang dikatakan Lawer (1989), perubahan merupakan kehendak sejarah. Dengan demikian, menghentikan jalannya perubahan merupakan pekerjaan yang mustahil; *change is a never ending process* (Soeryono, 1991). Perubahan di atas, menuntut adanya suatu keharusan untuk melihat ulang terhadap keberadaan elemen-elemen kelembagaan masyarakat, yang mempunyai keterikatan sistemik dengan realitas struktural yang lebih luas. Dengan menafikan hal tersebut, paling tidak, akan dijumpai dua permasalahan fundamental, berupa adanya krisis relevansi, yang akan mendatangkan akibat berikutnya, berupa ketidakmampuan lembaga sosial yang ada dalam melakukan dialog kultural dengan perkembangan global yang terjadi dalam masyarakat.

C. Realitas Pendidikan dan Orientasi Masa Depan

Menjadi harapan semua pihak bahwa pendidikan di Indonesia bisa bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk mendapatkan dan menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru di masa pembangunan sekarang dan masa depan. Sebab, kenyataan menunjukkan terdapat kesenjangan antara keinginan anak didik di sekolah dengan realitas di tengah-tengah masyarakat khususnya dengan kebutuhan lapangan kerja, maka muncul asumsi bahwa pendidikan sekarang ini kurang relevan dengan kebutuhan para pemakai pendidikan. Kurang relevan, artinya kurang penting, kurang berarti, tidak besar peranannya, khususnya untuk dipakai memecahkan kesulitan-kesulitan hidup di tengah-tengah masyarakat sekarang ini.

Hal ini mengingatkan kedudukan pendidikan dalam konteks sosio-kultural masyarakat mempunyai kedudukan ganda yaitu strategis dan

kikat manusia dalam hubungan dengan manusia lain (Kuntjaraningrat, 1987). Dengan menggunakan pendekatan ini, maka pada dasarnya perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah, perubahan pada acuan nilai yang digunakan dalam memandang hakikat dirinya dalam konteks kedirian, masyarakat dan sejarahnya.

Dalam hubungannya dengan perubahan nilai ini, Pratiknyo (1991) membuat suatu deskripsi perubahan kehidupan masyarakat akibat adanya terpaan perubahan, dengan karakteristik sebagai berikut: pertama, teknologisasi kehidupan, masyarakat teknologis adalah masyarakat yang semua urusan dan kegiatannya harus dikerjakan menurut tekniknya masing-masing yang sudah baku (*standardized*). Kehidupan dengan ciri semacam ini, ditandai pula dengan adanya perubahan yang cukup drastis pada aspek nilai-nilai dasar (*fundamental values*) yang telah dianggap mapan oleh masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud adalah semakin mendominasinya nilai efisiensi, produktivitas, berkembangnya nilai materialisme.

Kedua, adanya kecenderungan masyarakat yang semakin fungsional. Yang dimaksud dengan pola hidup masyarakat seperti ini adalah, masyarakat yang makin-makin warganya sekedar menjalankan fungsinya dalam semua aspek kehidupan. Hubungan sosial hanya terdiri karena adanya kegunaan atau fungsi tersebut. Artinya, hubungan antar manusia lebih diwarnai oleh motif-motif kepentingan fungsional. Keberadaan seseorang ditentukan oleh sejauh mana ia fungsional bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat seperti ini dibutuhkan kemampuan individual yang tinggi.

Ketiga, masyarakat padat informasi. Karakteristik dasar masyarakat seperti ini, tidak terlepas dari adanya revolusi informasi, sebagaimana sering dikatakan Alvin Tofler. Kedudukan informasi semakin memegang kendali yang sangat strategis. Mereka yang menguasai informasi, sebagai kelompok sosial yang dapat mendominasi kehidupan global.

Keempat, kehidupan yang semakin sistematis dan terbuka. Salah satu ciri masyarakat modern ialah masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem yang mempunyai tata aturan formal dan begitu birokratis. Maka, kecenderungan hubungan sosial yang muncul

Marx berasumsi bahwa konflik harus diselesaikan dengan konflik. Sejarah perang, kekerasan, revolusi akan melahirkan kedamaian, harmoni. (Campbell, 1994: 134). Revolusi penting untuk menghancurkan tatanan sosial yang tidak rasional, serta mengentaskan kaum tertindas. (Lauer, 1993: 297).

Teori konflik Marxian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang; bagaimana hubungan antara; *being* (keberadaan), *spiritual*, *thought* (pikiran) dan materi? Mana yang lebih dulu mempengaruhi; *matter* (material) mempengaruhi kesadaran atau kesadaran mempengaruhi material? Apakah dunia ini dapat diketahui: apakah penalaran (*reason*) mampu menebus rahasia-rahasia alam (*realities*) dan mengungkapkannya. (Avanasyet, 1965: dalam Praja, 1987: 63). Mengapa masyarakat melewati berbagai tahap, dengan proses tiap tahap menghancurkan, kemudian membangun di atas tahap sebelumnya, dengan kecenderungan hukum besi dan hasil yang tidak terelakkan. (Campbell, 1994: 138), atau dalam kondisi apa terjadi pergantian satu bentuk masyarakat dengan bentuk lainnya (Worsley, 1992: 265).

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu, maka teori konflik marxian menjelaskan tentang adanya perbedaan (kelas), pertentangan antara kaum borjuis dan proletar, penindasan-penindasan. Titik berat teori konflik Marxian ada pada konflik kepentingan ekonomi, sehingga lebih berada pada tatanan yang disorder dalam bentuk interaksi yang menghasilkan perubahan sosial.

c. Konsep Pokok Marxian

Karl Marx adalah seorang materialistik, sebab dia berpendapat bahwa hukum-hukum ekonomi berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu proses atau lahirnya kecenderungan-kecenderungan yang menggambarkan berbagai fenomena dan pada tahap tertentu memprediksi. Kekuatan-kekuatan yang bertentangan atau bersintesis dalam masyarakat adalah kekuatan-kekuatan ekonomi atau material. Konsep-konsep lain diantaranya tentang:

- 1) Materialisme Dialektika
- 2) Materialisme Historis
- 3) Perjuangan Kelas

- 4) Teori Nilai (nilai suatu barang terletak dalam jumlah tenaga yang diperlukan untuk membuat.
- 5) Teori Nilai Lebih (ada nilai yang tak diberikan pabrik kepada buruh)
- 6) Alinasi, yaitu terlepasnya manusia dari benda hasil kreasinya, bahkan dari masyarakat dan negaranya.

d. Pembentukan Masyarakat

Menurut Marx, terbentuknya suatu masyarakat (*social formation*) berbasis pada kekuatan-kekuatan produksi sebagai suatu proses sebab-akibat yang mencakup; apa yang dihasilkan? bagaimana sesuatu dihasilkan? Di dalamnya termasuk bahan mentah, hasil pikir, metode proses produksi, peralatan dan keahlian-keahlian para pekerjanya. Semuanya membentuk hubungan-hubungan kerja antara suprastruktur dan infrastruktur ekonomi, atau antara pemilik, penguasa sarana-sarana produksi dan yang bukan. Suprastruktur menciptakan ideologi, negara, kebudayaan, menggunakan agama, dan moralitas sebagai suatu kepentingan yang berlaku bagi semua kelas dalam mempertahankan kedudukannya, yang oleh Marx disebut sebagai “kesadaran palsu” karena semua kelas secara keliru yakin akan objektifitas dan universalitas peraturan-peraturan, yang pada hakekatnya untuk kepentingan kelas yang berkuasa.

Sejarah manusia melukiskan bahwa yang berkuasa, kelas-ekonomi selalu berperilaku keras dalam mempertahankan kondisi ekonominya. Dalam hal ini Marx menggambarkan skema sejarah manusia berawal dari masyarakat (komunisme) primitif, berkembang menjadi masyarakat perbudakan, kemudian menjadi masyarakat feodalisme, lalu lahir masyarakat kapitalisme dan berakhir dengan datangnya masyarakat komunisme. Kecuali dalam masyarakat komunisme, masyarakat selalu dalam keadaan konflik antara budak dan pemilik budak, pemilik tanah dan petani penggarap, buruh dan pabrik. Menurut Marx proses perkembangan masyarakat yang demikian itu terutama perkembangan feodalisme menjadi kapitalisme diwarnai pertentangan kelas (konflik). Suprastruktur menciptakan kesadaran palsu, sedangkan infrastruktur oleh Marx agar bersatu melawan, melakukan revolusi.

Dari keseluruhan konstalasi perubahan di atas yang perlu mendapat perhatian kritis adalah, sampai seberapa jauh implikasi perubahan dalam tingkat makro struktur tersebut merambah pada konfigurasi kehidupan masyarakat. Hal ini karena, seperti dijelaskan dalam kajian-kajian sosiologis, perubahan yang terjadi seringkali mengisyaratkan adanya kemauan ideologi, bukan semata-mata sebagai suatu fenomena natural dan kultural yang berjalan apa adanya (*das sein*). Oleh karena itu, terjadinya perubahan, sering kali merupakan rekayasa (*engineering*). Seperti yang terlihat pada beberapa teori perubahan sosial yang berkembang, penggunaannya bukan hanya sebagai instrumen epistemologis dalam menafsirkan realitas. Tapi dalam kepentingan lebih jauh, teori juga digunakan sebagai alat rekayasa sosial agar perubahan sosial sesuai dengan kemauan ideologis dari teori yang digunakan.

Dari kerangka pandang tersebut, kita dapat mempertanyakan mengapa aliran struktural, dibandingkan dengan teori kultural yang juga dikenal sebagai teori modernisasi (Budiman, 1989) tidak populer di negara kita. Sehingga wajar apabila teori-teori sosial tersebut digunakan untuk melestarikan status quo yang dikehendaki oleh pengendali kekuasaan. Dan, dalam tradisi keilmuan kita, teori-teori dominan tersebut menjadi wacana akademik di beberapa perguruan tinggi.

Esensi dari perubahan ini, sebagaimana disebutkan Robertson (1990), adalah terjadinya pergeseran paradigma (*paradigm shift*); terjadinya perubahan keyakinan, atau asumsi dasar dalam me-maknai segala aspek kehidupan. Pada dasarnya, perubahan masyarakat yang terjadi secara kontinue, merupakan pergeseran paradigma ini. Pergeseran ini dapat dilihat pada orientasi kehidupan masyarakat, sebagai sebuah refleksi tingkat makro struktur.

Dalam khasanah pemikiran bidang antropologis, perubahan masyarakat melibatkan perubahan pada level sistem nilai budaya (*cultural value system*). Konsep antropologis yang dibuat oleh Kluckhohn, lebih menitikberatkan pada perubahan yang bersifat esensial, yang berkaitan dengan pandangan hakekat masyarakat dalam memaknai realitas, seperti; hakikat kehidupan, hakekat pekerjaan manusia, hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, dan ha-

Karena setiap komunitas hidup dalam lingkungannya secara mandiri, organisasi formal hampir tidak diperlukan. Keluarga sebagai lingkungan sosial masyarakat, mempunyai cakupan pengertian keluarga besar (*extended family*), yang berarti sanak keluarga yang jauh sekali pun jauh dianggap sebagai keluarga. Proses komunikasi juga dalam bentuk yang sangat sederhana, dalam bentuk obrolan dan melalui desas desus (*orally*). Karena sangat sederhananya ini, ciri-ciri perkembangan dalam gelombang I dikiaskan dengan pepatah *Small is Beautiful*.

Gelombang ke II membawa suasana baru dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai mengembangkan bentuk energi baru yang ditandai dengan penggunaan minyak dan gas yang tidak dapat diperbaharui. Keluarga lebih dipentingkan keluarga inti. Dalam hal informasi, masyarakat sudah melakukan komunikasi dengan media. Peradaban dalam gelombang ini membawa pengaruh juga pada psikologi masyarakat; masyarakat lebih berorientasi pada masa kini, berpola pikir pragmatis positivis dan empirik.

Gelombang ke III sebagai puncak peradaban dari gelombang I dan II, menandai suatu perkembangan baru masyarakat, yang ditandai dengan adanya terpaan yang begitu dahsyat dalam bidang teknologi informasi. Sehingga, dikatakan informasi merupakan asset yang sangat penting dalam gelombang ini.

Sementara itu, Rostow, yang dianggap mewakili tradisi liberal dari ilmu-ilmu sosial (Hadimulyo, 1989) melalui pendekatan lain dalam menjelaskan perkembangan masyarakat. Rostow dengan bertolak pada kerangka teori yang terkenal dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (*the Stages of economic Growth*), menjelaskan tentang terjadinya lima tahapan perkembangan masyarakat; masyarakat tradisional (*traditional society*) yang ditandai dengan cakupan produksi terbatas, *Preconditions take off* sebagai tahapan transisional menuju tahap berikutnya, tahap tinggal landas (*the take off*), dan selanjutnya masyarakat berkembang ke arah masyarakat dengan tingkat kematangan (*the drive to maturity*) serta masyarakat dengan ciri komsumeristik yang tinggi (*the age high mass consumption*), atau masyarakat makmur sejahtera (Ali, 1986).

e. Proposisi Teorinya.

Secara garis besar masyarakat kapitalis mempunyai dua kelas yaitu kelas borjuis, sebagai pemilik, penguasa, alat dan pola produksi Kelas proletar, hanya sebagai pemilik tenaga kerja, dianggap sebagai *commodity* yang nilainya tergantung hukum permintaan-perlawanan. Persaingan antar proletar menjadikan upah tenaga buruh rendah dan kelas borjuis semakin melimpah kekayaannya, sebab memperoleh nilai-nilai (*surplus value*). Fenomena ini melahirkan:

- 1) Hukum Penimbunan Modal (*Law of Capitalist Accumulation*)
- 2) Hukum Konsentrasi Modal (*Law of Concentration of Capital*)
- 3) Hukum Meningkatnya Kemelaratan (*Law of Increasing of Mesery*)

Konsekuensi logisnya kata Marx lalu muncul *Class Struggle*, yakni bersatunya kaum proletar di tingkat serikat buruh nasional bahkan seluruh dunia untuk menghancurkan supremasi kaum borjuis dengan revolusi, untuk menuju masyarakat sosialis, kemudian komunis.

f. Metode dan Jenis Hubungan Konsepnya

Metode mengkaji perkembangan masyarakat didasarkan pada *materialisme dialektika*. Perkembangan manusia tunduk pada materialisme dialektika dan karena itu pada kajian sejarah manusia, sampailah Marx pada konsep materialisme historis, sebagai puncak prestasi ilmiahnya. Dengan demikian metodenya positivistik. Hubungan konsepnya adalah hubungan pengaruh atau deterministik (sebab-akibat) yakni materi menentukan ide (kesadaran).

Pandangan materialisme yang menyatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari materi, berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses material (K. Bertens, 1983: 77). Namun demikian Marx nampak ada dualistik; ia menganggap alam ini terdiri dari dua kenyataan; materi dan ide. Materi diartikan sebagai segala sesuatu yang berupa objek atau fenomena. Pendeknya segala kenyataan objektif, yaitu segala sesuatu yang ada di luar kesadaran manusia. Adapun ide diartikan sebagai “kesadaran” manusia atau kegiatan rohaniah manusia yang meliputi: pikiran, perasaan, kemauan, watak, sensasi, cita-cita, dan sebagainya (Avanasyev, 1965: 71).

Atas dasar pandangan di atas, timbul persoalan mengenai hubungan antar materi (*matter*) dan ide (*copiousness*). Manakah yang terlebih dahulu ada (primer) dan manakah yang datang kemudian (sekunder) atau diciptakan? Menurut Marx materilah yang primer sedangkan ide atau “kesadaran” sekunder. Dengan demikian pandangan Marx disebut materialisme dialektik. Dikatakan dialektik, karena Marx menilai bahwa dunia material ini konstan, baik dalam gerak, perkembangan dan regenerasinya.

Kajian Marx tentang masyarakat menfokuskan pada struktur, sistem, institusi, karena itu level paradigmanya adalah mikro-objektif, yaitu tentang fungsi struktur-struktur yang ada dalam masyarakat baik yang fungsional maupun yang mal-fungsional, sedangkan paradigma sosiologisnya adalah fakta sosial.

g. Pemikiran Filsafat yang Mempengaruhi

- 1) Positivisme, sebab yang dikaji adalah realitas sosial, observasi atas kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat.
- 2) Rasionalisme, sebab tindakan-tindakan tertentu yang diajukan sebagai pemecahan penuh dengan pernyataan-pernyataan yang beralasan.
- 3) Reformisme Sosial dan Evolucionisme, karena Marx menghendaki adanya suatu masyarakat menjadi komunisme dan untuk menuju ke arah itu melalui perjuangan kelas menuju sosialisme, jadi bertahap, tetapi pada saat suatu tatanan penindasan berubah menjadi detator proletariat Marx adalah seorang revolusioner.
- 4) Humanisme, pada masyarakat komunis Marx menghendaki adanya kebebasan dan kreatifitas manusia, kehidupan sejati yang bebas, bahagia, penuh persaudaraan.
- 5) Materialisme, materi menentukan berbagai aspek kehidupan dan ini oleh Marx hendak digeneralisasikan secara mondial seperti fenomena alam fisik.

4. Perspektif Teori Pertukaran

Teori-teori pertukaran sosial menurut analisis Margaret M. Poloma (1992: 52) dilandaskan pada prinsip-prinsip transaksi ekonomi

Sebagaimana telah menjadi *commen sense* dalam alam pemikiran filsafat, manusia dipandang sebagai *homo sapien*; manusia arif yang memiliki akal budi yang mengungguli makhluk lainnya, *homo veber*; manusia tukang yang memproduksi alat-alat (Bertens, 1987). Dengan kemampuan yang dipunyai manusia tersebut, manusia tidak menjadi realitas yang pasif di tengah-tengah peristiwa budaya, ia berperan sebagai aktor untuk terus menerus melakukan perubahan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan eksistensi kemanusiaannya.

Manusia kata Peursen (1985), akan terus berada dalam ketegangan kreatif antara keadaan imanensi dan transendensi; bahwa manusia tidak hanya pasif dalam dialektika kehidupan, tetapi juga selalu muncul dari proses dialektis tersebut untuk menilai, mengubah bahkan membuat *platform* sendiri tentang modus kehidupan yang diidealkan.

Dengan tidak terlalu melibatkan diri pada persoalan epistemologis, untuk mengetahui sampai seberapa jauh masing-masing struktur di atas memberikan pengaruh dominan terjadinya perubahan pada lingkup global kehidupan masyarakat, adanya akumulasi kekuatan struktural tersebut telah menjadi pemicu terhadap terjadinya akselerasi perkembangan masyarakat dari corak perkembangan yang masih konvensional ke corak yang lebih kompleks (*sophisticaled*). Dalam coraknya yang kontemporer seperti sekarang ini, masyarakat ditandai dengan adanya perubahan yang nyaris berjalan secara revolutif.

Tofler, melihat adanya arus besar (*megatrend*) perkembangan masyarakat yang kini memulai memasuki rentangan sejarah peradaban gelombang III yang ditandai perkembangan di bidang teknologi informasi, setelah sebelumnya diterpa oleh dua gelombang peradaban *agrikultural* dan *industrial*. Menurut Tofler, bergesernya peradaban masyarakat dari peradaban agrikultural, industrial ke informasi ditandai dengan adanya perubahan pada lingkungan hidup manusia; teknosfer, inforfer, soiosfer, psikosfer dan ekonosfer (Rakhmat, 1989; Alisjahbana, 1988).

Pada gelombang I, teknologi masyarakat masih menggunakan cara-cara yang tradisional dengan memanfaatkan energi alam (*living batteries*) seperti tenaga manusia, binatang, matahari, angin dan air.

Dalam kajian sosiologis selanjutnya, upaya untuk menganalisis lebih jauh fenomena perubahan sosial ini tidak dipahami dalam perspektif yang sama. Untuk mengungkap adanya teoritisasi yang beragam ini, Robert H. Lauer, harus menjelaskan dengan menghabiskan banyak halaman. Buku yang ditulis sekitar tahun 1970-an dengan judul *Perspective on Social Change* lebih banyak menyoroti keragaman perspektif dalam teori perubahan sosial. Kuntowijoyo (1991) dengan mengacu pada kerangka paradigmatis perubahan sosial dari Marx, Weber, dan Durkheim membuat suatu deskripsi tentang ikhwal perubahan sosial. Antara ketiganya terdapat anggapan yang sama, bahwa perubahan masyarakat bergerak dalam hubungan kausalitas antara struktur budaya, struktur sosial, dan struktur teknik. Namun di antara ketiganya, mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat struktur yang memberikan pengaruh besar terhadap adanya perubahan.

Paradigma marxian yang terkenal dengan perspektif materialisme-historis dan determinisme-ekonominya, meletakkan struktur sosial sebagai variabel penting yang berpengaruh besar terhadap terjadinya perubahan. Sedangkan, struktur teknik dan struktur budaya berada dalam *main stream* (arus utama) perubahan pada level struktur sosial. *Paradigma Weberian* meletakkan struktur teknik sebagai faktor determinan timbulnya perubahan. Menurut teori ini, perubahan dimulai dari adanya perubahan dalam struktur teknik yang kemudian berpengaruh pada struktur budaya, dan pada gilirannya akan berpengaruh pada struktur sosial. Sedangkan *Paradigma Durkheimian*, urutan kausalitas perubahan berasal dari struktur budaya, yang kemudian diikuti oleh perubahan pada tingkat struktur sosial dan akhirnya kestruktur teknik.

Sebenarnya, kalau dilihat dari sudut pandang *antropososiologis* (Tobroni, Arifin, 1994) mengatakan; adanya perubahan sosial merupakan hal yang wajar dalam kehidupan manusia dan merupakan fenomena yang alami (*naturalistik*). Artinya, perubahan merupakan *refleksi empirik* dari *historisitas* manusia. Ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks pergumulan sejarah, manusia tidak hanya menjadi objek sejarah, tetapi pemilikan kemampuan yang ada dalam dirinya telah menjadikan sebagai pelaku sejarah yang dinamis.

yang elementer; orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori pertukaran mempunyai asumsi sederhana bahwa interaksi sosial itu mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak selalu dapat diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga hal-hal yang nyata dan tidak nyata. Dalam sebuah pabrik, misalnya, seorang pekerja yang berinteraksi dengan pembantunya dapat menjalin kerjasama yang baik dengan harapan memperoleh ganjaran nyata berupa sejumlah besar bonus tahunan, tetapi ganjaran dari persahabatan dan *goodwill* yang tidak nyata juga dapat melahirkan perilaku yang sama, bahkan di saat-saat dunia usaha mengalami masa sulit di mana bonus demikian itu merupakan hal yang mustahil. Model timbal balik tetap ada sejauh orang memberi dan berharap memperoleh imbalan barang atau jasa.

Perkembangan yang utuh dari teori sosiologi tentang pertukaran sosial pertama kali berada di tangan George C. Homans, sedang penyempurnaan selanjutnya dilakukan oleh Peter M. Blau

Teori Pertukaran Homans. Teori pertukaran ini mendasarkan pada proposisi yang fundamental. Proposisi ini berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Menurut Homans bahwa manusia adalah makhluk sosial dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan manusia lain. Ia mencoba menerangkan perilaku sosial dengan prinsip-prinsip psikologi. Pendorongannya adalah bahwa proposisi umum psikologi terhadap perilaku manusia tidak berubah, karena akibat interaksi lebih berasal dari manusia lain ketimbang dari lingkungan fisik.

Teori pertukaran sosial Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Pertukaran perilaku untuk memperoleh ganjaran adalah prinsip dasar dalam transaksi ekonomi sederhana. Seseorang dapat mempertukarkan pelayanannya untuk memperoleh upah mingguan. Dengan uang ini dia mungkin membeli kebutuhan dapur, membayar sewa rumah, dan lain-lain. Setiap pengeluaran dapat dianggap sebagai contoh pertukaran ekonomis. Homans melihat semua

perilaku sosial bisa karena pertukaran ekonomi tetapi juga bisa karena pertukaran persahabatan, karena itu untuk menjelaskannya diperlukan psikologi. Penjelasannya, ilmu ekonomi dapat menggambarkan hubungan pertukaran dan sosiologi dapat menggambarkan struktur sosial di mana pertukaran itu terjadi, tetapi yang memegang kunci penjelasan adalah psikologi. Menurut Homans teori khusus dalam psikologi yang dianggap cocok untuk menjelaskan struktur sosial ialah salah satunya dari psikologi perilaku sosial.

Homans tidak menolak pendirian Durkheim yang menyatakan interaksi menimbulkan sesuatu yang baru. Ia justru menyatakan bahwa ciri-ciri yang baru muncul itu dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip psikologi. Homans mengembangkan beberapa proposisi yaitu: (1) Proposisi Sukses (*The Success Proposition*) (2) Proposisi Pendorong (*The Stimulus Proposition*) (3) Proposisi Nilai (*The Value Proposition*) (4) Proposisi Deprivasi Kejemuhan (*The Deprivation Satiation Proposition*) (5) Proposisi Persetujuan Agresi (*The Aggression Approval Proposition*) (6) Proposisi Rasionalitas (*The Rationality Proposition*).

1) Proposisi Sukses (*The Success Proposition*). (Homans, 1974: 16-43)

Untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu. Umumnya perilaku seseorang yang sesuai dengan proposisi sukses meliputi tiga tahap, yaitu: tindakan orang, hadiah yang dihasilkan, dan perulangan tindakan asli atau sekurangnya tindakan yang serupa dalam hal tertentu.

Ada beberapa hal yang ditetapkan Homans mengenai proposisi sukses; (1) meski umumnya benar bahwa makin sering hadiah diterima menyebabkan makin sering tindakan dilakukan, namun pembahasan ini tidak dapat berlangsung tanpa batas. Di saat tertentu individu benar-benar tidak dapat bertindak seperti itu sesering mungkin (2) Makin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah makin besar kemungkinan orang mengulangi perilaku. Sebaliknya, makin lama jarak waktu antara perilaku dan hadiah,

Kemerdekaan memberi semangat baru bangsa Indonesia merancang berbagai program pembangunan tanpa intervensi penjajah. Walaupun lima tahun setelah Proklamasi Indonesia masih dililit dengan persoalan rumit yang difokuskan pada upaya mempertahankan negara, namun semangat telah membara dalam setiap kalbu masyarakat Indonesia, menebarkan harapan baru kehidupan yang lebih mandiri.

Barang kali tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa dalam kajian sosiologis masalah perubahan sosial mendapat perhatian yang sangat besar. Besarnya perhatian ini karena titik tolak pembahasan (*unit of analysis*) kajian dari sosiologi adalah masyarakat (*community*), di mana masyarakat itu sendiri merupakan suatu intensitas sosial yang secara terus menerus memperlihatkan gejala perubahan. Dengan besarnya proporsi kajian ini, berkembang pula berbagai macam teori yang mencoba membuat frame (bingkai) dan membuat suatu abstraksi tentang ikhwal perubahan sosial.

Menurut Sunyoto Usman (1994), istilah perubahan sosial dipakai silih berganti dengan istilah; evolusi (*evolution*), perkembangan (*development*) atau kemajuan (*progress*); yang kesemuanya sama-sama memperlihatkan suatu perjalanan dari satu keadaan tertentu yang relatif sederhana, seragam, dan homogen, menuju ke keadaan tertentu lainnya yang lebih kompleks, beragam, dan heterogen. Dalam perspektif sosiologi, perubahan sosial lazim dikonsepsikan sebagai suatu perubahan struktural, yang di dalamnya terdapat pola hubungan antar orang (*patterns of social action and interaction*).

Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kultural. Perubahan kultural lebih menunjukkan pada perubahan berbagai fenomena yang berkaitan dengan pengetahuan, ide-ide, seni, pemahaman doktrin keagamaan. Meskipun demikian, kedua bentuk perubahan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Bukti empirik memperlihatkan bahwa di satu sisi kaitan antara perubahan sosial dan perubahan kultural sangat erat, misalnya; perkembangan ilmu pengetahuan modern, ternyata telah mempengaruhi perubahan tata perekonomian. Tetapi, di sisi lain hubungan keduanya bisa nampak kurang begitu harmonis.

memasyarakatkan (sosialisasi) nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berkembang dalam masyarakat.

Uraian selanjutnya penulis akan mencoba membahas masalah pendidikan dalam suatu diskursus kebudayaan dengan penekanan pada persoalan perubahan sosial (*social change*). Bahasan demikian di dasarkan pada pemikiran bahwa perubahan sosial pada hakikatnya merupakan fenomena kebudayaan. Dengan melakukan penelaahan terhadap gejala perubahan sosial diharapkan diperoleh tempat pendidikan yang lebih kontekstual, strategis, dan fungsional, yang dapat dikembangkan sebagai paradigma kebudayaan. Konsep ini lebih bercorak progresif-dinamik, karena pendidikan tidak hanya dipandang sebagai pewarisan dan sosialisasi nilai yang lebih mengutamakan kemampuan budaya, tanpa secara produktif dan dinamik melakukan proses daur kultural dalam suatu modus historis yang baru. Dengan konsep ini, jika pada esensinya perubahan masyarakat merupakan perubahan nilai dan norma-norma dalam masyarakat (Astrid S. Susanto, 1985) bagaimana pendidikan, dapat memberikan nilai yang dibutuhkan dalam perubahan sosial ?

B. Perubahan Sosial dan Implikasinya

Kajian dan pembahasan terhadap perubahan sosial, telah dilakukan sejak pertengahan abad ke-18an bersamaan dengan kegelisahan mereka terhadap dampak dari proses industrialisasi yang dianggap mengkoyak hampir semua tatanan kehidupan sosial. Selo Soemartjan (1993) menjelaskan bahwa; segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Breazeale, dalam analisis tentang perubahan sosial dalam buku *Cultural Change in Rural Indonesia, Impact of Village Development* (1993). Perubahan sosial di Indonesia secara umum ditandai dengan dua peristiwa besar yaitu;(1) revolusi fisik merebut kemerdekaan yang memuncak pada hari Proklamasi 17 Agustus 1945 dan (2) revolusi pembangunan yang bergulir sejak Orde Baru berkuasa.

maka makin kecil kemungkinan orang mengulangi perilaku (3) pemberian hadiah secara intermiten lebih besar kemungkinannya menimbulkan perulangan perilaku ketimbang menimbulkan hadiah yang teratur. Hadiah yang teratur menimbulkan kebosanan dan kejenuhan, sedangkan hadiah yang diterima dalam jarak waktu yang teratur sangat mungkin menimbulkan perulangan perilaku.

2) Proposisi Pendorong (*The Stimulus Proposition*)

Bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu, makin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa.

3) Proposisi Nilai (*The Value Proposition*)

Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. Misalnya, jika hadiah yang diberikan kepada orang lain amat bernilai maka makin besar kemungkinan aktor melakukan tindakan yang diinginkan ketimbang, jika hadiahnya tidak bernilai. Di sini Homans memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Makin tinggi nilai hadiah, makin besar kemungkinan mendatangkan perilaku yang diinginkan, sedangkan makin tinggi nilai hukuman, maka makin kecil kemungkinan aktor mewujudkan perilaku yang tidak diinginkan. Homans menemukan bahwa hukuman merupakan alat yang tidak efektif membujuk orang mengubah perilaku mereka karena orang dapat bereaksi terhadap hukuman menurut cara yang tidak diinginkan.

4) Proposisi Deprivasi Kejenuhan (*The Deprivation Satiation Proposition*)

Makin sering orang menerima hadiah khusus di masa lalu yang dekat, makin kurang bernilai baginya setiap unit hadiah berikutnya. Dalam hal ini Homans mendefinisikan dua konsep penting yaitu biaya dan keuntungan. Biaya tiap perilaku didefinisikan sebagai hadiah yang hilang karena tak jadi melakukan sederetan tindakan yang direncanakan. Keuntungan dalam

pertukaran sosial dilihat sebagai sejumlah hadiah yang lebih besar yang diperoleh atas biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir ini menyebabkan Omens menyusun kembali proposisi kerugian-kerugian sebagai berikut; makin besar keuntungan yang diterima sebagai hasil tindakannya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu.

5) **Proposisi Persetujuan Agresi (*The Aggression Approval Proposition*)**

Bila tindakan orang tidak mendapat hadiah yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, ia akan marah, besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan yang agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai baginya. Proposisi ini hanya mengacu pada emosi negatif.

Bila tindakan seseorang menerima hadiah yang diharapkan, terutama hadiah yang lebih besar dari pada yang diharapkan, atau tidak menerima hukuman yang dibayangkan, maka ia akan puas, ia makin besar kemungkinannya melaksanakan tindakan yang disetujui dan akibat tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya. Proposisi ini menerangkan emosi yang lebih positif.

6) **Proposisi Rasionalitas (*The Rationality Proposition*)**

Dalam memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu di antara yang dianggap saat itu memiliki nilai atau *value* (V), sebagai hasil dikalikan dengan probabilitas (P) untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Teori Pertukaran Peter Blau. Teori pertukaran Blau ini bertujuan untuk memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antara individu dengan kelompok. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara kehidupan sosial tersusun menjadi struktur sosial yang makin kompleks melebihi Homans, yang memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk kehidupan sosial mendasar. Homans sudah puas di tingkat perilaku, tetapi menurut Blau pekerjaan seperti itu hanya sebagai alat saja untuk mencapai tujuan lebih besar. Tujuan utama

menyelamatkan manusia di masa depan yang makin kompleks dan menantang. Paradigma ini berbeda dengan *paradigma esensialisme*, aliran ini berpendapat, pendidikan berperan sebagai pemelihara kebudayaan (*educational as cultural concervadon*), Dengan pandangan ini, esensialisme lebih percaya kepada masa lampau sebagai kerangka nilai yang diwariskan melalui pendidikan. Bagi aliran ini, lembaga-lembaga dan praktek-praktek kebudayaan pada kenyataannya telah gagal dalam memenuhi harapan masa modern. Oleh karena itu, pendidikan harus berdasar pada nilai-nilai yang mutlak (absolut) yang tidak mudah aus dalam perkembangan sejarah. Pandangan ini juga berbeda dengan *paradigma* perenialisme yang menjelaskan bahwa pendidikan perlu dikembalikan pada produk masa lalu yang nyata-nyata telah dapat diuji oleh sejarah (*regressive road culture*).

Pendidikan sebagai usaha kemanusiaan yang dilakukan secara sadar dan rasional pencapaian cita-cita kemanusiaan tersebut di atas, menurut Tobroni, Arifin (1994) harus dipandang sebagai fenomena individual di satu sisi dan fenomena sosial budaya di sisi yang lain. *Pandangan pertama*, bertolak dari suatu pandangan antropologis dengan pemahaman terhadap manusia sebagai realitas mikrokosmos dengan pemilikan potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Dalam aliran psikologi *behaviorism*, potensi dasar tersebut disebut *prepotence reflexs* atau kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang (Arifin, 1991) atau dalam perspektif Islam lebih dikenal dengan sebuah fitrah (Q.S. Arrum: 30). Pendidikan yang mengacu pada pandangan dasar di atas, difungsikan ke arah pengembangan potensi yang dimiliki oleh manusia (Langgulung, 1988). Jika pandangan pendidikan di atas, lebih memfokuskan pada orientasi internal, pandangan berikutnya, *Pandangan kedua*, diarahkan pada orientasi eksternal dalam kerangka perkembangan budaya masyarakat sebagai kondisi riil pendidikan. Dengan pandangan terakhir ini tolok ukur dari proses pendidikan, adalah bagaimana pendidikan memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan etos kultural manusia sehingga dalam kehidupan riil dapat melakukan dialog (interaksi) dengan lingkungan yang mengitarinya. Dengan tinjauan ini, pendidikan diartikan sebagai proses kulturasi (pembudayaan, yakni

yang sekarang terus bergumul dengan proses modernisasi dan perubahan sosial. Dalam kajian ini modernisasi dan perubahan sosial dipandang dalam kerangka kesatuan konsep, yaitu sebagai fenomena kebudayaan yang merefleksikan adanya gerak yang dinamis.

A. Sebuah Perspektif tentang Pendidikan

Ada beberapa paradigma aliran pendidikan yang menjelaskan peranan vital pendidikan misalnya; Nativisme, empirisme, konvergensi dan *Life Long Education*. Paradigma Nativisme (Arthur Schopenhauer 1788-1860) menjelaskan bahwa anak lahir mempunyai pembawaan sejak lahir. Faktor pembawaan/hereditas/pembawaan yang bersifat kodrati dari kelahiran, yang tidak dapat diubah oleh pengaruh alam sekitar, aliran ini berpendapat pendidikan tidak penting karena pendidikan tidak bisa mempengaruhi perkembangan anak. Anak berkembang sesuai dengan pembawaannya. Paradigma Empirisme (John Locke: 1632-1704) berasumsi dan menjelaskan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Teori ini terkenal dengan teori Tabula Rasa yang menjelaskan bayi lahir bagaikan kertas putih, yang bisa di gunakan, ditulisi, dihiasi sesuai keinginan yang mempunyai kertas tersebut. Paradigma Konvergensi (Willam Stern, 1871-1938) menjelaskan bahwa faktor hereditas yang baik saja tanpa pengaruh lingkungan yang positif tidak akan membina pribadi anak secara ideal (baik), sebaliknya meskipun lingkungan pendidikan positif/ideal juga tidak akan menghasilkan kepribadian ideal tanpa potensi hereditas yang baik. Paradigma *life long education*/pendidikan seumur hidup menjelaskan bahwa pendidikan ini berjalan sepanjang masa, berlangsung di dalam keluarga (in formal), di sekolah (formal), di masyarakat (non formal), dan di Masjid. Konsep pendidikan seumur hidup telah disabdakan oleh Rasulullah yang artinya; mencari ilmu itu wajib mulai lahir sampai ke liang lahat.

Paradigma pendidikan yang lain misalnya progresivisme, mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang menjadikan dirinya mampu menghadapi segala tantangan eksternal. Imam Barnadib (1987:16) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai *cultural transmittion*,

sosiologi yang mempelajari interaksi tatap muka adalah untuk meletakkan landasan guna memahami struktur sosial yang mengembangkan dan menimbulkan kekuatan sosial yang menandai perkembangannya itu.

Blau memusatkan perhatian pada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau membayangkan empat langkah berturutan, mulai dari pertukaran antara pribadi ke struktur sosial hingga ke perubahan sosial, yaitu;

- 1) Pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke....
- 2) Diferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke....
- 3) Legitimasi dan pengorganisasian yang menyebarkan bibit dari...
- 4) Oposisi dan perubahan.

B A B VI

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL

Pendidikan merupakan usaha kemanusiaan yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk mencapai cita-cita kemanusiaan yang tak pernah selesai dan tidak dapat dicapai oleh hanya satu generasi. Selanjutnya, ketika manusia kemudian menyadari bahwa cita-cita dan harapan manusia jauh melampaui batas-batas usia manusia sendiri, bahkan batas generasi dan zamannya, maka pendidikan dan rekayasa generasi masa depan mulai dikembangkan dan dikonseptkan sebagai usaha sadar yang tak pernah berakhir (A. Malik Fajar dkk, 1992). Karena itu, secara sistematis setiap usaha pendidikan merupakan bagian integral dari suatu rekayasa perubahan modernisasi dan perubahan sosial.

Sulit dicari batas pemisah yang jelas antara modernisasi dengan perubahan sosial, karena kedua proses tersebut sama-sama mengisyaratkan adanya suatu gerak dinamis atau proses evolusi yang mengarah pada suatu bentuk masyarakat yang khas yang berbeda dengan bentuk masyarakat sebelumnya. Baik proses modernisasi maupun perubahan sosial lebih memperlihatkan suatu hubungan yang dialektis dan simbiotik-mutualistik. Modernisasi terjadi karena adanya perubahan sosial atau sebaliknya, perubahan sosial selalu melahirkan proses modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses perombakan pola pikir dan tata kerja tradisional menuju pola pikir yang modern, yang prosesnya oleh Huntington digambarkan sebagai; revolusioner (pergeseran dramatis dari tradisional ke modern; kompleks (banyak permasalahan); sistematis dan global (mempengaruhi seluruh masyarakat); berfase (kemajuan melalui tahapan-tahapan); konvergensi (tidak dapat dihambat); dan progresif (bergerak maju).

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas peran pendidikan dalam konteks modernisasi dan perubahan sosial. Meskipun teoritik dan kurang memberikan gambaran yang bersifat empirik, diharapkan memiliki makna, relevansi dengan persoalan kependidikan di Indonesia

kesempatan. Disebabkan ketidaksetaraan dalam kesetaraan memperoleh pendidikan bagi minoritas politik dan legal sistem campur tangan. Banyak kasus pengadilan telah memerintahkan sekolah distrik untuk menghapus perbedaan melalui *busing children*.

3. Usaha Integrasi. Usaha untuk meralat ketidaksetaraan melalui program pengganti pendidikan dipaparkan dan dievaluasi.
4. Pengalaman Pendidikan Minoritas Terpilih di USA

Hispanic Students adalah yang paling cepat pertumbuhannya, dan merupakan kelompok yang paling segregatif (dibedakan) di sekolah, dan mereka juga dari berbagai latar belakang yang berbeda. Baik mengajar mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asli mereka (Spanyol) merupakan hal yang kontroversial. Yang manakah yang akan memberikan kesempatan lebih besar di masa yang akan datang? *Asian American student* adalah yang terbaik di antara berbagai kelompok minoritas, sementara American Asli barang kali adalah yang paling mengalami kesulitan. Kelompok lain seperti siswa pendidikan khusus dibahas secara singkat.

5. Memajukan Sekolah Bagi Siswa Minoritas.

Beberapa program yang mengusahakan perubahan situasi siswa minoritas dibahas. Pengubahan pola interaksi di sekolah, program pendidikan multikultural, iklim sekolah, dan keterlibatan masyarakat adalah contohnya.

B A B II SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata, sosiologi dan pendidikan. Keduanya secara etimologi tentu berbeda maksudnya, tetapi dalam sejarah kehidupan manusia yang selalu bersentuhan dengan proses pendidikan kedua istilah ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, artinya sosiologi dalam arti masyarakat membutuhkan pendidikan dan sebaliknya pendidikan juga membutuhkan masyarakat. Persoalan-persoalan pendidikan bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan sebaliknya persoalan-persoalan sosial juga bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pendidikan.

Kata sosiologi pendidikan merupakan dua kata yang integral dalam pengetahuan ilmiah ilmu pendidikan dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan usaha-usaha pencapaian tujuan pendidikan secara universal. Sosiologi pendidikan menurut *Dictionary of sociology* adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental (Ary H. Gunawan, 2000: 45).

George Payne, menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Bagi Payne sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat bertalian dengan proses belajar dan sosialisasi, akan tetapi juga segala sesuatu dalam pendidikan yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utamanya adalah memberikan guru-guru, para peneliti dan orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan. (George Payne dalam Nasution, 1994: 4) Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-car

mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.

Pengertian lain tentang sosiologi pendidikan disampaikan oleh F. G. Robins dan Brown bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang bertugas menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan.. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalamannya. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.

Charles A. Ellwood menjelaskan bahwa *Education Sociology is the science which aims to reveal the connections at all points between the educative process and social process*, Sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari/menjuu untuk melahirkan maksud hubungan-hubungan antar semua pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial. (Muhyi Batubara, 2005: 2)

Dari beberapa pengertian tentang sosiologi pendidikan tersebut di atas dapat saya simpulkan bahwa sosiologi pendidikan ialah suatu ilmu yang mengkaji masalah-masalah fundamental pendidikan dari perspektif sosiologis atau dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

B. Objek Sosiologi Pendidikan

Objek sosiologi pendidikan adalah masyarakat pendidikan (baik formal, in formal dan non formal) dan permasalahannya, objek sosiologi pendidikan tidak hanya terbatas pada studi di sekolah saja tetapi lebih luas lagi yaitu mencakup institusi-institusi sosial dengan wilayah kajiannya tidak terlepas dari berbagai persoalan pendidikan (yang memungkinkan institusi pendidikan merekam berbagai persoalan pendidikan dalam masyarakat tersebut). Menurut Nasution, pokok-pokok kajian (ruang lingkup) sosiologi pendidikan adalah;

1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat, meliputi
 - a. Hubungan pendidikan dengan sistem sosial atau struktur sosial
 - b. Hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem pendidikan

yang tinggi pada semua siswa, sekolah membutuhkan kepemimpinan pendidik yang kuat yang menekankan pada pencapaian akademik, dan orang tua perlu dilibatkan dalam pendidikan anak-anak mereka.(Brookover, Ericson, dan Mc Evoy,1996).

5. **Keterlibatan masyarakat:** Keterlibatan orang tua dan bisnis yang dibutuhkan untuk mengubah situasi. Contohnya Bussinesman New York City menjanjikan 6 grader dari dukungan finansial almamaternya untuk menghadiri perguruan tinggi jika mereka menyelesaikan SLTA. Yayasan “Aku Punya Mimpi” membantu 10.000 anak-anak meneruskan pendidikan yang lebih tinggi (Sommerfeld, 1992, p.1).

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mengenai proses stratifikasi dalam pendidikan dan masyarakat, memfokuskan diri pada ketidaksetaraan jenis kelamin di sekolah dan usaha meralat sexisme diikuti dengan masalah-maslah yang dihadapi kelompok minoritas di pendidikan Amerika, termasuk diskusi mengenai *African American, American Asli Hispanic* dan *Asian American*.

1. Gender dan Kesetaraan Kesempatan Mendapatkan Pendidikan.

Anak laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman sekolah berbeda, sebagian disebabkan perbedaan harapan, dorongan dan perlakuan. Proses sosialisasi peran jenis kelamin (sex) dimulai dari lahir mempengaruhi apa yang dirasa oleh anak adalah tepat untuk their sex. Pencapaian laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh harapan orang tua mereka, buku-buku bacaan, media elektronik, mainan, motifasi, model peran sex, stereotip, harapan guru, dan tekanan godaan kelompok sebaya. Alasan-alasan perbedaan dalam pencapaian matematis dibahas, termasuk bahwa menghilangkan efek negatif dari sexisme, seperti program Judul IX, juga dibahas.

2. Kelas sosial, Ras dan Usaha-Usaha untuk Meninjau Kembali Ketidaksetaraan dalam Peluang Mendapatkan Pendidikan.

Apakah sekolah membuat perbedaan? Menemukan dengan yang berkaitan dengan pertanyaan ini mengindikasikan interaksi kompleks antar keluarga dan sekolah yang mempengaruhi

diwajibkan sekolah negeri untuk mendidik anak cacat antara 3 sampai 21. Di bawah UU Federal, sekitar 13% anak dari lahir sampai usia 21 (kebanyakan usia 6-17) dapat dilayani di bawah program A atau Program B. Prosentase siswa yang didiagnosa mengalami hambatan belajar naik dari 22% menjadi 51,1%.

- b. Siswa Berbakat. Masyarakat perlu mengembangkan dan menggunakan bakat-bakat dari anggota yang paling berbakat. Tetapi dilema dan kontroversi ada di dalam demokrasi adalah memilih/mengkhususkan beberapa siswa untuk *special treatment or training* (penanganan atau pelatihan khusus) yang akan memberikan keuntungan bagi *elite intelgensia*. Kita tahu bahwa siswa berbakat akan lebih berkembang dan berkompetensi dalam homogenitas *elite intelgensia*. Walaupun kurang setuju pada satu strategi, beberapa merasa bahwa instruksi yang bersifat individu dikombinasikan dengan beberapa aktifitas kerjasama kelas dengan siswa lain mungkin memberi pelayanan terhadap kedua kelompok. Memisahkan siswa dari teman sebaya tidak terjadi saat siswa diikutkan, dikirim ke program khusus atau membuka sekolah untuk berbagai maksud yang banyak manfaat bagi siswa berbakat atau siswa yang adalah mendukung dengan bermacam-macam gaya belajar (Raywind,1989:44) dan menggunakan siswa dalam proses pembelajaran.

E. Meningkatkan Sekolah Bagi Siswa Minoritas

Untuk meningkatkan sekolah bagi siswa minoritas ditempuh dengan:

1. **Sekolah efektif:** Sekolah efektif membuat lingkungan pencapaian akademik yang positif seperti meningkatkan harga diri siswa, mengurangi keterasingan dan pelanggaran, memacu interaksi persahabatan dan mengintegrasikan pengajaran.
2. **Pemilihan Program, Voucher, dan Charter School (Piagam Sekolah)** Memilih jenis sekolah yang pas dengan kebutuhan siswa.
3. **Cooperative Learning:** melibatkan kelompok 4-6 dengan anggota yang heterogen yang bekerja bersama mencapai tujuan.
4. **Sikap sekolah dan guru:** Guru harus mengkomunikasikan harapan

- c. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan
 - d. Fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan *status quo*
 - e. Fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural dan sebagainya.
2. Hubungan antar manusia di dalam sekolah, meliputi
 - a. Hakeikat kebudayaan sekolah sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah
 - b. Pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial dan pola interaksi informal dan lain sebagainya.
 3. Pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di sekolah/ lembaga pendidikan, meliputi :
 - a. Peranan sosial guru-guru/tenaga pendidikan
 - b. Hakekat kepribadian guru/tenaga pendidikan
 - c. Pengaruh kepribadian guru/tenaga pendidikan terhadap kelakuan anak/peserta didik
 - d. Fungsi sekolah/ lembaga pendidikan dalam sosialisasi murid
 4. Sekolah dalam masyarakat, meliputi :
 - a. Pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah
 - b. Analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah
 - c. Hubungan antar sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan.
 - d. Faktor-faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat berkaitan dengan organisasi sekolah.

C. Sejarah Sosiologi Pendidikan

Perkembangan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai sejak awal abad ke 20 yang merupakan bagian dari sosiologi. Tetapi sebenarnya sosiologi pendidikan lahir bersamaan munculnya persoalan-persoalan pendidikan yang tidak teratasi dan kemudian persoalan-persoalan pendidikan tersebut diatasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Sebelum berakhirnya PD II sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sempat hilang dari peredaran dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diajarkan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Amerika Serikat. Setelah PD II, perkembangan masyarakat mengalami perubahan secara drastis. Dinamika masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan, dalam menyikapi perlunya dimensi pendidikan menjadi instrumen terpenting dalam memajukan masyarakat. Karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam tersebut dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu penting di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Lester Frank Word (1841-1913), salah seorang pelopor sosiologi di Amerika dianggap sebagai pencetus gagasan lahirnya sosiologi pendidikan di Amerika. Gagasan tersebut muncul dalam bukunya yang berjudul: *Applied Sociology* (Sosiologi Terapan), yang mengkaji perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Gagasan Word tadi kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Dewey (1859-1952). Sebagai bapak pendidikan dan sekaligus sebagai pelopor sosiologi pendidikan, dalam karyanya: *School and Society* (Sekolah dan Masyarakat), Dewey memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Pemikiran Dewey itu kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya: *Democracy and Education* (Demokrasi dan Pendidikan) pada 1916 yang mendorong berkembang sosiologi pendidikan.

Pada tahun 1887 dibuka kali pertama kuliah sosiologi pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1910 Henry Suzzalo memberi kuliah sosiologi pendidikan di Teachers Collage, University of Columbia. Tahun 1914 kuliah sosiologi telah disampaikan di 16 Lembaga Pendidikan Tinggi. Tahun 1917 Buku Teks Sosiologi Pendidikan pertama: *Introduction to Educational Sociology* diterbitkan oleh Walter R Smith. Tahun 1928 terbit *The Journal of Educational Sociology* sebagai wadah pemikiran sociology pendidikan di bawah pimpinan E. George Payne, dan tahun 1936 disusun munculnya majalah: *Social Education*.

dan bahasa Spanyol sebagai bahasa pengantar dalam pelajaran di sekolah (pendidikan dwi bahasa).

2. Pelajar Asia

Asia Amerika merupakan lebih dari 4% dari populasi Amerika Serikat. Jumlah penduduk Asia Amerika pada tahun 1999 sebanyak 11.022.000 jiwa (US Sensus Bureau, 1999). Dan diperkirakan akan mencapai 32-34 juta pada tahun 2050 (U.S. Departemen of Commerce,1996). Siswa Asia pada umumnya mengalami kendala dalam hal bahasa, dan mereka lebih banyak kursus bahasa asing, matematika, dan sains dibanding siswa dari kelompok minoritas lain. Siswa Asia Amerika juga terwakili dalam program persiapan perguruan tinggi dan program pemandu bakat di SLA. Studi-studi yang ada sekarang ini memperlihatkan bahwa dengan generasi yang terus menerus ada di Amerika Serikat, perbedaan pencapaian Asia Amerika menjadi semakin sejajar dengan pencapaian siswa kulit putih (e.g., Gooyette dan Xie,1999).

3. Pelajar Amerika Asli

Ketika kolonial pertama bercokol di Amerika Serikat penduduk asli Amerika memakai 2000 bahasa yang berbeda-beda, dan sekarang 300 diantaranya masih digunakan. Pada awal tahun 1990, lebih dari 80% dari kira-kira tiga ratus ribu siswa Asli Amerika ada di *publik school*, kebanyakan di kota-kota besar. Keterlibatan orang tua rendah di sekolah-sekolah yang pengontrolnya bukan asli Amerika, ketidakhadiran tinggi, angka drop out tinggi mendekati 50%. Dari 25% lulusan yang mengikuti perkuliahan 65% keluar tanpa gelar (Gipp dan Fox,1991:24). Namun gambaran tidak suram beberapa kelompok meningkat tingkat kelulusannya dan kehadirannya.

a. Siswa Pendidikan Khusus. Era siswa dengan pendidikan khusus dimulai tahun 1975, setelah Konggres mengesahkan pasal 94-145 Undang-Undang Pendidikan untuk anak yang mengalami keterbatasan, UU itu menyatakan bahwa “semua anak dengan keterbatasan harus dididik dalam lingkungan yang restriksi (aturan-aturannya seminimal mungkin). Aturan yang lebih baru pasal 99-457 (UU Pendidikan bagi penyandang cacat) telah

Tujuan Siswa, Aspirasi dan Prospek Masa Depan. Siswa Afrika Amerika mempunyai aspirasi tinggi, harapan positif yang tinggi dari guru-guru sebagaimana harapan orang tua dapat membantu aspirasi menjadi terwujud (Voelki, 1993). Dalam kenyataan aspirasi tinggi dari siswa Afrika Amerika mungkin bertanggung jawab untuk mempersempit jurang pendidikan di antara mereka dan kulit putih, dan aspirasi tersebut mungkin akan berguna bagi siswa Afrika Amerika dalam membuat kemajuan (Portes dan Wilson, 1976).

Usaha Integrasi. Dalam banyak kasus, sekolah distrik telah disegregasi, tetapi pemisahan eksisi di dalam sekolah. Kelas-kelas yang dipisahkan mengelompokkan minoritas dalam kelas, dibedakan kegiatan atletiknya dan ekstrakurikuler, dan perbedaan disiplin juga dalam praktek pensekoran. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru mungkin menghambat usaha mengintegrasikan sekolah dan kelas (Metz, 1994).

Bermacam-macam langkah telah diambil untuk mencapai kesetaraan inter dan antar sekolah. Langkah paling terkenal adalah program sponsor Federal untuk kompensasi pendidikan. Undang-Undang Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama diloloskan pada tahun 1965 dengan tujuan meningkatkan pendidikan anak-anak miskin dan minoritas. Pada awalnya disediakan dana \$ 1000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) dan jumlah itu selalu ditingkatkan. Program kompensasi pendidikan didanai terutama oleh perwakilan Pemerintah Federal yang dimulai pendidikan dari tingkat Pra Sekolah sampai yang lebih tinggi.

D. Pengalaman Pendidikan Minoritas Terpilih di Amerika Serikat

1. Hispanic Students (Pelajar Hispanic)

Sekarang hampir separuh pertumbuhan penduduk Amerika Serikat terdiri dari imigrasi, terutama dari Hispanic dan Asia (Macionis 2000). Hispanic merupakan kelompok etnik yang paling cepat pertumbuhannya di Amerika Serikat. Sekolah publik lipat dua dari dua dekade terakhir, dari 6% ditahun 1973 menjadi 15% ditahun 1997, dan diperkirakan akan mencapai 20% pada tahun 2030. Karena latar belakang kelompok Hispanic yang terbiasa menggunakan bahasa Spanyol dalam keluarga maka digunakanlah bahasa Inggris

Perlu dicatat bahwa nama-nama sosiologi pendidikan sebagaimana yang dipakai oleh Steward adalah *Sociological Approach to Education*, *Educational Sociology*, dan *Sociology of Education*. Meighan dan Siraj-Blatchford menggunakan istilah *Sociology of Education*.

W. Taylor menggunakan istilah *Educational Sociology* tekanannya terletak pada pernyataan pendidikan dan sosial, sedangkan *Sociology of Education* titik tekannya terletak pada permasalahan sosiologis. Dengan nada yang agak berbeda R. J. Stalcut mengatakan bahwa *Educational Sociology* merupakan aplikasi dari prinsip umum dan proses-proses sosiologi yang berlangsung dalam lembaga pendidikan. Menurut G.E. Jansen *Educational Sociology* membahas problema pendidikan, sedangkan *Sociology of Education* membahas problema sosiologi dalam pendidikan.

D. Teori-Teori Penelitian Pendidikan (Teori Mikro)

1. Perspektif Fenomenologi

Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”. Penyelidikan fenomenologis bermula dari diam. Keadaan “diam” merupakan upaya untuk menangkap apa yang dipelajari dengan menekankan pada aspek-aspek subyektif dari perilaku manusia. Fenomenologis berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunia konseptual subyek penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang disusun subyek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-harinya. Singkatnya, peneliti berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan membuat penafsiran, dengan membuat skema konseptual. Hal ini berarti bahwa peneliti menekankan pada hal-hal subyektif, tetapi tidak menolak realitas “di sana” yang ada pada manusia dan yang mampu menahan tindakan terhadapnya. Para peneliti kualitatif menekankan pemikiran subyektik karena menurut

pandangannya dunia itu dikuasai oleh angan-angan yang mengandung hal-hal yang lebih bersifat simbolis dari pada konkret (Mike S. Arifin, 1994: 46). Jika peneliti menggunakan perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial biasanya penelitian ini bergerak pada kajian mikro.

Perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian (informan penelitian) melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan makna yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, dalam hal demikian Berger menyebutnya dengan *first order understanding* dan *second order understanding*. Pendekatan fenomenologi mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akal budi di sini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar *true or false* (benar atau salah) (Muhadjir, 1996: 83).

a. Sejarah Fenomenologi dari (Hegel, Husserl, Sheller, Schutz dan Berger)

Dalam perkembangannya perspektif ini dikenal sebagai teori kefilosofan yang di gulirkan oleh Hegel, Husserl, Sheller, Schutz, dan kemudian Berger. Namun dengan pemikiran-pemikiran Weber dalam pengembangan teori sosial yang berorientasi pada paradigma definisi sosial, akhirnya pendekatan ini banyak digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial (Gordan, 1991: 438-491). Muhadjir memberikan komentar bahwa pendekatan fenomenologi mengakui adanya kebenaran “empirik etik” yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akal budi di sini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar *true or false* (benar atau salah) (Muhadjir, 1996: 83). Nilai moral yang digunakan pendekatan ini tidak terbatas pada nilai moral tunggal yaitu *true or false*. Tetapi nilai moral yang digunakan pada pendekatan ini mengacu pada nilai moral ganda yang hierarki yang berarti ada kebermaknaan tindakan.

integrasi situasi di mana siswa dari kelompok ras berbeda bukan hanya bersama-sama menghadiri sekolah, tetapi langkah efektif diambil untuk mengatasi kerugian siswa minoritas dan mengembangkan hubungan positif antar ras.

Pengaduan Pengadilan pada Desegregasi. Tahun 1954 Mahkamah Agung di Amerika Serikat mengeluarkan putusan “*separate is not equal*” (pemisahan itu tidak setara). Pada tahun 1964 *The Civil Right Act Ruler* (Undang-Undang yang Mengatur Hak Sipil) memutuskan tidak bisa ditolelir lagi menunda pelaksanaan desegregasi. Untuk memperoleh persamaan kesempatan, desegregasi diberlakukan berarti bahwa sekolah harus mempunyai 20-30 persen pendaftar dari masing-masing kelompok.

Dampak Dari Usaha Desegregasi Sekolah. Apa yang terjadi ketika minoritas dan kulit putih pergi ke sekolah bersama? Apakah siswa tersebut terbantu atau terlukai? *Self-esteem* (penghargaan diri), *self Concept* (konsep diri). Pencapaian *self esteem* penting untuk prestasi di sekolah. Anak-anak *African American* punya concern pada para psikolog selama beberapa tahun sebab pengukuran preferensi rasial telah memperlihatkan bahwa mereka kekurangan kepekaan positif mengenai identitas rasial dan penghargaan diri. Hasil kajian memperlihatkan bahwa siswa *African American* di *integrated setting* punya kepercayaan diri, penghargaan diri dan tingkat aspirasi lebih rendah dari siswa *African American* di sekolah yang kurang integrasi, walaupun mereka berbuat lebih baik, pergi kuliah lebih sering dan lebih sukses dalam menemukan pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Trent, 1997). Ringkasnya desegregasi jarang merendahkan prestasi dari minoritas dan lebih sering meningkatkannya.

Dampak dari desegregasi pada aspirasi dan prestasi ada area concern untuk peneliti khususnya disebabkan telah ada penurunan dalam masuknya mahasiswa siswa *African American* dibanding dengan kulit putih. Rencana melengkapi program perguruan tinggi empat tahun meningkat untuk mahasiswa *African American* dan kulit putih, tetapi aktualisasi perencanaan menurun untuk siswa *African American* (Hauser dan Anderson, 1991: 272).

Amerika 11 %, orang Hispanica 18 % dan orang-orang kulit putih 8 % (Zuniga, 1991, dalam Jeanne H. Ballantine: 2001:103).

Pelajar-Pelajar kelas bawah dan beresiko. Istilah kelas bawah (*under-class*) dikeluarkan oleh Gunnar Myrdal, seorang peneliti dari Swedia mengenai masyarakat Amerika Serikat dan digunakan sampai sekarang oleh William Julius Wilson. Istilah *under-class* artinya adalah melambangkan suatu sifat “rendah aspirasi” tidak terdidik, keluarga yang tidak mapan, tidak resmi, pengangguran, kriminalitas, kecanduan minuman keras, alkoholik, sakit-sakitan dan dekat dengan kematian” (Wilson, 1987: 4) itu juga bisa menggambarkan terutama pada kelompok minoritas. Satu penelitian terhadap orang-orang Hispanica mendapati bahwa selain kemiskinan dan perampokan, orang-orang Hispanica tidak memiliki ciri lain kecuali sebagai kelompok *under-class* seperti misalnya indikator kurang sehat dan keluarga yang berantakan (Moore dan Pinderhughes, 1993, dalam Jeanne H. Ballantine: 2001: 104).

Analisis Jenks sependapat bahwa sekolah penting untuk setiap orang, latar belakang keluarga dan sikap menentukan pengalaman bersekolah. Jenks beralasan bahwa karena sekolah tidak bisa menciptakan masyarakat egaliter dan kesetaraan ekonomi, maka kita harus mendistribusi ulang pendapatan dengan mengubah institusi ekonomi menjadi sistem yang lebih sosialistik. Dalam analisis berikutnya, Jenks melaporkan bahwa latar belakang keluarga menentukan sekitar 48% status pekerjaan, dan 15 sampai 35% perbedaan pendapatan antar individu, antara pendidikan dan status keluarga erat hubungannya. Kesimpulan test dan re-test dari kesimpulan Coleman dan Jenks memajukan hasil yang bervariasi, test tersebut membenarkan pentingnya keluarga, siswa dan latar belakang teman sebaya.

Perjuangan desegregasi. Sekolah sering menjadi *segregated institution* (institusi yang melakukan pemisahan) di banyak negara. Desegregasi (penghapusan perbedaan) di sekolah merujuk pada pola pendaftaran di mana siswa dari kelompok ras yang berbeda menghadiri sekolah, dan siswa tidak dipisahkan dalam sekolah atau kelas isolasi berdasar ras. Perbedaan desegregasi dengan integrasi adalah kalau

Perkembangan fenomenologi dari Hegel sampai dengan Berger, bahwa; Fenomenologi pada masa Hegel, telah dikedepankan konsep tese dan antitese yang dapat menghasilkan sintese. Konsep ini merupakan gerakan dari yang tidak ada menuju yang ada (Hadiwiyono, 1980: 101-102). Dalam perkembangannya fenomenologi sebagai suatu pendekatan filsafat Husserl menempatkan sebagai metode pengkajian untuk mengenali, menjelaskan dan menafsirkan pengalaman indrawi dan makna untuk mengenali apa yang dialami. Dalam posisi semacam ini Husserl menganjurkan peneliti melakukan observasi partisipan agar dapat mengetahui secara pasti apa yang dialami orang lain. Hal ini berarti fenomenologi Husserl terfokus pada logika yang merujuk pada “makna” untuk mengenali apa yang dialami. Oleh karena itu Husserl menganjurkan peneliti melakukan observasi partisipatif agar dapat mengetahui secara pasti apa yang dialami orang lain. Menurut Husserl bahwa suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Maka untuk bisa memahami makna haruslah mampu menerobos sesuatu di balik sesuatu yang nampak tersebut (Waters, 1994: 31). Oleh karena itu penggunaan fenomenologi menurut Husserl adalah harus kembali kepada “data” dan tidak kepada “pemikiran”. Sumbernya adalah apa yang ada pada halnya sendiri atau yang menampakkannya dirinya sendiri. Bagi Husserl hasil pengetahuan sejati bukan rekayasa pikiran untuk membentuk teori, melainkan kehadiran data dalam kesadaran budi.

Berbeda dengan fenomenologi Sheller yang memberikan penekanan pada hakekat. Dia mengajarkan agar peneliti melakukan “penilikan hakekat” dengan menggunakan pengertian nilai dan pribadi. Penekanan fenomenologi Sheller terletak pada perhatiannya kepada manusia, sehingga menjadikan “kasih” sebagai dasar ajarannya. Kasih itu bukan perasaan melainkan “pribadi”. Dengan demikian penelitian yang diarahkan pada manusia harus mampu melihat apa yang ada di balik nilai yang ada tersebut sebagai gambaran pribadi (Hadiwiyono, 1980: 146).

Perkembangan fenomenologi selanjutnya dikembangkan oleh Schutz yang tertarik pada pemikiran Weber tentang tindakan sosialnya

dan memadukan antara fenomenologi transendental milik Husserl dengan *verstehen* tindakan sosial milik Weber (Collin, 1997: 111). Aliran fenomenologi yang dikedepankan oleh Schutz mengajarkan bahwa setiap individu hadir dalam arus kesadaran yang diperoleh dari proses refleksi atas pengalaman sehari-hari (Campbell, 1994: 234). Pendekatan yang dikembangkan Schutz berusaha memasuki konsep para subjek penelitian sampai memahami apa dan bagaimana pengertian mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Konsep Schutz ini dipengaruhi teori aksi Weber yang menjelaskan bahwa sesuatu itu memiliki kebermaknaan secara subjektif (Collin, 1997: 110).

Berikutnya jika konsep fenomenologi Husserl bertitik tolak pada fenomena transendental, maka fenomenologi Schutz mencoba menyandingkannya dengan konsep *verstehen* dari Weber. Menurut Schutz dunia sosial merupakan sesuatu yang *intersubjektif* dan pengalaman yang penuh makna (*meaningful*). Konsep fenomenologi Schutz bertolak pada makna tindakan. Dalam hal ini makna tindakan identik dengan motif yang mendasari tindakan tersebut yang dikenal dengan istilah *in order to motive* (motif supaya). Konsep ini mengajarkan bahwa untuk bisa memahami makna tindakan seseorang peneliti harus melihat motif apa yang mendasari tindakan itu. Dengan demikian makna tindakan subjektif dapat dikaji dari motif pelakunya sendiri dengan melalui ungkapan subjeknya sendiri. Kemudian Schutz mengembangkannya dengan melengkapi suatu konteks yang disebut dengan *because motive* (motif karena). Di sini Schutz mengkaji makna subjektif dengan konsep hubungan sebab akibat sehingga benar-benar memenuhi motif asli yang mendasari tindakan individu (Waters, 1994: 33).

Berbeda dengan Berger, yang mencoba mengembangkan fenomenologi dengan terlebih dahulu mengkritisi konsep pendahulunya. Fenomenologi Berger banyak diwarnai oleh konsep “hakikat makna” dari Schutz. Namun Berger mengembangkan fenomenologi sebagai metodologi penelitian dengan melakukan sintesa dari berbagai konsep tentang manusia dan lingkungan sosial. Berger menilai karya pendahulu bersifat konduktif menuju pada ilmu empiris

dalam bidang matematika dan sains (*The Chronicle of Higher Education Almanac*, 1999-2000). Anak laki-laki nilai tes matematika lebih tinggi di seluruh dunia kecuali di Taiwan. Rata-rata secara *international* pada pelajaran matematika dan sains laki-laki mencapai 518 dan wanita 485 (*National Center for Education Statistic*, 1995: 64).]

5. Pemberantasan Perbedaan Gender

Dalam program *Title IX* memandatkan bahwa sekolah-sekolah di daerah agar menyiapkan lingkungan yang tidak bersifat diskriminatif bagi siswa-siswanya, aturan-aturan tidak didasari dengan perbedaan jenis kelamin termasuk dalam program-program atletik. Perubahan peraturan sekolah meliputi analisis program yang ada dan perlakuan yang sama terhadap semua siswa, ketersediaan keuangan, konseling, pelayanan dan pekerjaan. Pada kenyataannya perubahan pada program-program sekolah selalu ditujukan pada program *Title IX*. Bisa jadi program *Title IX* telah menempatkan kesempatan yang sama antara wanita dan pria dalam olah raga. Fasilitas-fasilitas, peralatan-peralatan pendidikan dan kursus-kursus harus memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan (Weistart, 1998, dalam Jeanne H. Ballantine: 2001: 101).

B. Kelas, Ras dalam Peluang Mendapatkan Pendidikan

Kecenderungan dalam Pendaftaran Sekolah Negeri. Pergeseran yang dramatis terjadi pada pendaftaran sekolah negeri di sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat, jumlah siswa kulit putih menyusut, di lain sisi jumlah siswa Afrika Amerika dan kelompok minoritas jumlahnya meningkat. Pada tahun 1996 kelompok minoritas 37%, Afrika Amerika 16,7% dan dari suku Hispanic 11,9% (*National center for education statistic*, 1999:126). Satu hal yang menjadi perhatian adalah rata-rata jumlah lulusan dari pertumbuhan kelompok tersebut tidak sama dengan apa yang terjadi pada kulit putih dan kadang-kadang tidak disiapkan sebagai tenaga kerja. Rata-rata *drop-out* pada orang-orang asli Amerika 27 %, pada orang Asia 2 %, orang Afrika

wanita, dan 56 % guru sekolah menengah atas adalah wanita (*National Center for Education Statistik, Digest, 1995, 1997*). Polanya adalah “semakin tinggi tingkatannya semakin rendah jumlahnya” yang berlanjut pada tingkat Universitas di mana jumlahnya adalah 32,5 % dari dosen adalah perempuan, terutama pada posisi yang rendah (*The chornicle of Higher Education Almanac, 1999-2000 : 36*).

3. Pengalaman-Pengalaman dan Aktifitas di Sekolah

Aktifitas anak-anak ditentukan oleh jenis kelaminnya, bahkan dalam hal disiplin dan dalam mengisi waktu senggang, guru menghabiskan waktunya dengan anak-anak yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan jenis kelamin, dalam beberapa penelitian mendapatkan bahwa anak laki-laki menerima perlakuan disiplin yang lebih banyak dan lebih kasar, namun juga mendapatkan waktu dan pujian dari kebanyakan guru. Harapan guru masuk ke dalam perlakuan yang berbeda terhadap para siswa berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana perbedaan terhadap kelas dan ras.

Aktifitas permainan anak-anak wanita sifatnya lebih kooperatif sedangkan permainan anak-anak laki-laki pada umumnya lebih fungsional dan lebih mempunyai tujuan yang jelas (Neppel dan Muray, 1997). Beberapa pengalaman godaan seksual wanita, biasanya datang dari teman sebaya di sekolah. Peneliti terkini mengenai pelajar yang berumur antara 8-11 tahun, menunjukkan bahwa 85 % pengalaman anak perempuan dan 76 % pengalaman anak laki-laki adalah karena godaan seksual karena gurauan seks, isyarat serta komentar-komentar yang bersifat umum yang diikuti dengan sentuhan atau perebutan yang bersifat seksual. Hasrat memegang peranan yang besar bagi anak perempuan yang menjadikannya kurang percaya diri dan menimbulkan ketakutan-ketakutan di sekolah.

4. Prestasi dan Motivasi dalam Kasus Matematika dan Sains

Dalam pengukuran standar mengenai prestasi, nilai dari prestasi laki-laki dan perempuan tergantung dari pada isi dari apa yang diteskan, anak perempuan mempunyai prestasi yang lebih baik dalam bidang membaca, menulis dan belajar literatur, sedangkan laki-laki lebih baik

belum mampu mendekati permasalahan dengan karakter apa adanya. Berger menyoroati konsep Husserl mengenai “fenomena murni” sebagai akar dari idealisme intelektual belaka yang pada dasarnya telah menghindari adanya realitas secara empiris yang dilakukan secara bersama. Dalam hal ini Berger menawarkan pendekatan *first order understanding* (meminta peneliti untuk menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar), dan kemudian dilanjutkan dengan *second order understanding* (dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai memperoleh suatu makna yang baru dan benar).

Hal ini tentu berbeda dengan paradigma fakta sosial yang bergerak pada kajian makro dan menempatkan peran pranata sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku manusia.

b. Alasan-Alasan dari Makna Tindakan

Dalam perkembangan teori ilmu sosial, perspektif fenomenologi sebagai pendekatan dikenal sebagai cikal bakal dari teori konstruksi sosial, menurut Collin (1997) bahwa; sejumlah alasan untuk status konstruksi sosial didasarkan pengamatan bahwa “aksi/tindakan diilhami dari makna subjektif”. Menurut Collin, bahwa; Aksi tidak hanya perilaku, tidak hanya sekedar gerakan tubuh, tetapi memiliki suatu *inside* “kedalaman” yang terdiri dari proses mental pelakunya. Kedalaman memberikan esensi individual pada setiap aksi tertentu. Dalam hal ini doktrin “*meaningfulness of action*” mengasumsikan karakter tesis seorang konstruktivis sosial. Jika peneliti menyamakan “*meaning*” dengan pikiran dan penilaian atau setidaknya-jaminan bahwa pikiran dan penilaian itu contoh dari “*meaning*” maka peneliti harus berkesimpulan bahwa pikiran manusia membawa realitas sosial ke dalam aksi manusia sebagai esensi yang sangat menentukan (Collin, 1997: 103).

Lebih lanjut Collin menjelaskan bahwa; seperti halnya pendapat Dilthey bahwa “Kami menjelaskan alam, tetapi kami memahami kehidupan mental”. Setelah Dilthey, Weber mengatakan bahwa; “kita bisa membedakan antara tindakan luar yang asli (*verhalten*) gerakan

tubuh, dengan tindakan bagian “dalam” dalam bentuk makna subjektif”. Schutz, juga menerima wawasan Weber, bahwa; “tindakan memiliki subjektivitas, sisi yang bernilai”. Dan Husserl menjelaskan bahwa, “fenomenologi tampaknya telah mengambil langkah yang penting dari seseorang subjektifis yang menggunakan metode penyelidikan filosofis”.

Analogi “kebermaknaan” tersebut di atas tak terkecuali dalam aksi *melihat gejala sosial* bukan hanya dilihat dari aspek materi tetapi juga dari aspek non materi, bukan dari aspek dampak tetapi dari aspek proses, bukan dari realitas objektif tetapi dari realitas subjektif, bukan dari perspektif positivistik tetapi dari perspektif fenomenologi. Aksi *sosial* juga diilhami makna subjektif, dan aksi *sosial ini* tidak sekedar gerakan fisik (mobilitas fisik) tetapi juga memiliki sesuatu *inside* (bagian dalam) yaitu sebuah makna. Fenomena yang akan dikaji dari aksi sosial adalah makna aksi sosial. Ada makna sosial yang membuat mereka *action*, Berikut juga akan dikaji aksi sosial dari segi proses. Proses mental aksi ini bukan hanya *epifenomena* yang tidak relevan dengan hakikat bertindak, namun lebih tepat merupakan sesuatu yang memberikan suatu hakikat pada tindakan sebagai aksi, di samping itu bagian “dalam” tadi membawa kepentingan pribadi pada masing-masing aksi tertentu, data tentang aksi ini adalah peristiwa, tindakan, serta ungkapan-ungkapannya.

c. **Meaningfulness of Action menurut Wilhelm Dilthey**

Ungkapan Collin bahwa “Perilaku manusia penuh makna karena dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman. Pengalaman adalah dasar dan sumber perilaku manusia. Pengalaman terdiri dari kehidupan mental manusia yang bersifat subjektif. Konsepsi ini melihat perilaku manusia yang muncul dari dua sumber mental yang terpisah yakni kepercayaan dan keinginan. Pengalaman juga disebut sebagai sumber perilaku yang berasal dari pikiran dan keinginan yang menyatu. Dan ini disebut Dilthey sebagai kesatuan holistik dari kehidupan” (Collin, 1997: 104).

Sedangkan pemahaman, dianggap Dilthey sebagai pengalaman kembali (*re-experiencing*), penciptaan kembali (*re-creating*) dan empati

terhadap aktifitas anak mereka di sekolah akan berdampak besar bagi pembentukan *stereotype* anak (Rothenberg, 1995: 8).

Pendidikan Tinggi menghadirkan sebuah gambaran mengenai wanita, meningkatnya jumlah wanita di Perguruan Tinggi adalah karena jumlah pendaftaran bukan karena pembedangan kerja. Oberlin sebagai Perguruan Tinggi di Amerika Serikat pada tahun 1833, membuka kesempatan untuk masuknya karyawan perempuan, tetapi pendidikan mereka terbatas pada urusan-urusan domestik. Dengan berkembangnya Perguruan-Perguruan Tinggi wanita pada abad 19 muncul Reformasi Wanita dan wanita profesional. Mulai saat itu terbuka wanita untuk mengikuti pendidikan lanjut juga terbuka bagi semua wanita untuk menempuh pendidikan dan masuknya mereka ke wilayah-wilayah profesional. Pada tahun-tahun sekarang ini, beberapa even yang membatasi diri untuk laki-laki telah menjadi sistem yang terbuka. Satu wilayah yang menjadi kontroversial adalah wanita memasuki olah raga atletik, dan berlanjut ke penuntutan perguruan tinggi yang memperlakukan perbedaan, Universitas memberikan dukungan yang sedikit pada atletik wanita dibandingkan atletik pria, dan wanita menginginkan persamaan perlakuan (Lederman, 1994: 51).

Sesudah lebih dari 20 tahun, perbedaan jumlah wanita dan laki-laki yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi telah dihilangkan. Merupakan suatu prediksi bahwa tahun 2007, terdapat 9,2 juta perempuan dan hanya 6,2 juta laki-laki yang akan masuk di Perguruan Tinggi di Amerika Serikat. Terdapat banyak bukti bahwa wanita unggul di sekolah dan para laki-laki banyak yang *drop-out* dalam jumlah yang besar dan masuk ke perguruan tinggi hanya beberapa saja. Beberapa statistik pendidikan mengenai partisipasi dan prestasi sekarang ini berpihak pada perempuan (Sommers, 2000, dalam Jeanne H. Ballantine: 2001: 93).

2. Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan di Sekolah Amerika

Perbandingan komposisi adalah pada struktur sistem pendidikan. Di Amerika Serikat tahun 1996 terdapat 74,4 % guru sekolah swasta adalah wanita, lebih dari 86 % guru sekolah dasar adalah

Seksualitas di dalam buku telah mendapat perhatian yang besar. Buku-buku merupakan sumber utama dari pesan-pesan mengenai aturan-aturan yang berhubungan dengan seksualitas. Di antara penemuan yang terbaik dari berbagai penelitian yang diadakan mengenai pembaca dan buku cerita adalah yang dilakukan oleh suatu kelompok yang berpusat di Princeton, New Jersey yang dinamakan dengan nama “*Women in Ward and Image (1988)*. Mereka mengevaluasi gambaran pembawaan gender pada pembaca. Analisis yang belakangan menunjukkan peningkatan peranan wanita tetapi tidak seimbang di mana laki-laki masih lebih dominan (Goodman, 1993; Purcell dan Steward 1990, dalam Jeanne H. Ballantine: 2001: 91).

Di lima puluh negara di dunia terdapat fenomena secara signifikan bahwa jumlah anak perempuan yang terdaftar di sekolah lebih sedikit dari pada anak laki-laki, kebanyakan mereka tersebar di negara-negara miskin seperti Asia Utara, Timur Tengah dan Afrika. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Population Action International (1994)*. Hanya 23 % wanita di negara-negara miskin yang melanjutkan sampai ke tingkat Sekolah Menengah (UNDP, 1993). Konferensi Dunia PBB yang diadakan di Beijing tahun 1995 menghasilkan Keputusan bahwa pada tahun 2000 lebih dari separo penduduk dunia berumur 20 tahun adalah wanita yang membutuhkan untuk dididik. Pertanyaannya adalah bagaimana jika negara mereka terlilit kemiskinan (Geewax, 1995: 16).

1. Perbedaan Jenis Kelamin dalam Sistem Pendidikan

Pada masyarakat Amerika Serikat kalangan Puritan (bangsa kulit hitam) menakut-nakuti wanita untuk menjadi terpelajar kecuali untuk menyelamatkan mereka dengan membaca Bibel. Setelah Revolusi Amerika Serikat kemudian menjadi semacam tanggung jawab wanita untuk mengasuh anak dan menyampaikan moralitas dengan demikian hanya sedikit pendidikan yang bisa didupakannya.

Sekolah-sekolah menyampaikan sistem-sistem sosial seperti keimanan dan nilai-nilai yang ada di sekitar mereka aturan-aturan yang berhubungan dengan jenis kelamin dan harapan-harapan. Perilaku dan harapan untuk masing-masing jenis kelamin, mulai dari harapan mereka

kembali (*empathizing*). Menurut Delthey, sebagaimana dikemukakan juga oleh pemikir fenomenologi yang dikutip oleh Santoso mengatakan bahwa peristiwa sejarah dapat dipahami dalam tiga proses, yaitu: (1) Memahami sudut pandang atau gagasan para pelaku asli (2) Memahami arti atau makna kegiatan-kegiatan mereka pada hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa sejarah (3) Menilai peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan gagasan yang berlaku pada saat sejarawan itu hidup. Proses (1) dan (2) merupakan *first order understanding* dan proses (3) merupakan *second order understanding*.

Mengikuti Dilthey, Weber menekankan bahwa ilmuwan boleh membedakan fenomena di luar perilaku manusia antara perilaku luar yang murni (gerakan badan), dan apa yang ada di dalam, dalam bentuk makna subyektif. Schutz (1972) menerima bahwa Weber berada pada jalur yang benar tetapi ada beberapa aspek problematika terhadap konsepsinya tentang aksi yang dianggap sebagai perilaku bermakna subjektif yang perlu disempurnakan sebagaimana diuraikan di muka. Uraian baru dari pendukung Schutz diberikan oleh Berger dan Lukman (1967). Dia memulai dari premis bahwa manusia mengkonstruksi realitas sosial di mana proses-proses subjektif dapat diobjektifkan. Dalam mengkonstruksi realitas sosial itu diperlukan legitimasi dan justifikasi, yakni bahwa dunia makna yang berbeda dan dilokalisasi ini perlu diciptakan dan diadakan bersama-sama (Collin, 1997: 105-106).

d. Perkembangan Argumen Fenomenologi

Argumen *fenomenologi* semata-mata menyatakan bahwa; manusia dan fakta (kenyataan) sosial terbentuk ketika perilaku manusia disatukan dengan makna (*meaning*) yang diperlihatkan oleh agen. Selain itu, makna tersebut membentuk fakta perilaku murni. Makna menciptakan tindakan dan berperan sebagai suatu komponen atau aspek. Makna adalah aspek tindakan “*inner*” (batin) yang bersatu dengan aspek tindakan “*eksternal*” untuk membentuk suatu kesatuan tindakan (Collin, 1997: 115). Makna ini hasil suatu fakta melebihi fakta tentang perilaku yang murni. Dengan cara ini, formula konstruktivisme dipenuhi. Formula itu menentukan konstruktivisme sebagai posisi bahwa pikiran, keyakinan, manusia menciptakan fakta sosial.

Terkait dengan argumen fenomenologi yang direkonstruksi. Menurut Collin (1997), pembahasan tentang psikologisme yang menyatakan bahwa argumen fenomenologi diwarisi dari Weber dan Schutz. Memuat dua ketakutan atau keraguan, yaitu; Keraguan yang berkaitan dengan teori *explanation* yang didukung oleh Weber dan Schutz, yang menegaskan bahwa eksplanasi dicapai oleh identifikasi atau ketetapan ulang yang bersifat subjektif. Keraguan lain berkaitan dengan implikasi ontologi argumen fenomenologi seperti yang dinyatakan oleh Schutz. Argumen ini nampak menyebabkan ilmuwan untuk memahami dualisme, karena argumen ini menggambarkan mental sebagai bidang yang terpisah.

e. Mungkinkah Fakta Sosial dibentuk oleh Makna?

Menurut Collin (1997: 121) “pandangan yang dibentuk oleh argumen *meaningfulness* kurang menarik daripada pandangan yang dirancang oleh *broad argument* walau tidak mendapat dukungan. Tidaklah cukup bila dikatakan bahwa makna adalah kondisi yang seharusnya bagi fakta-fakta sosial. Makna-makna manusia hanyalah satu aspek dari fakta sosial, oleh karena itu menghasilkan fakta sosial yang bersamaan dengan aspek-aspek lain. Adapun aspek-aspek yang diperlukan untuk mencakup sisi aksi perilaku eksternal murni, yang khas dan bersifat fisik serta item-item lain yang membentuk *setting* dan topangan bagi perilaku itu sendiri”.

f. Tesis Konstruksi yang Dimodifikasi

Finn Collin dalam bukunya “*Social Reality*” pada halaman 127-131 mencatat tentang; “modifikasi tesis konstruksi” bahwa kita telah mengadopsi versi pandangan konstruksi yang didasarkan pada argumen fenomenologi. Sekarang ada ancaman bahwa hasil ini mengakibatkan munculnya *proliferus* (pengembangbiakan) fakta-fakta yang telah diinginkan. Kita mengadopsi tesis bahwa makna-makna subjektif cukup untuk membentuk fakta-fakta sosial (sendiri atau bersama-sama dengan perilaku yang menyertai) selama fakta itu hanya mengembangkan implikasi internal dari suatu deskripsi aksi.

B A B V RAS GENDER DAN PENDIDIKAN (Kajian di Amerika)

Pengakuan terhadap persamaan hak semua umat manusia tanpa melihat perbedaan ras, warna kulit, kelas sosial, dan jenis kelamin baik secara nasional maupun internasional sudah banyak dirumuskan baik dalam konstitusi negara maupun piagam hak asasi manusia sedunia. Tetapi jaminan yuridis formal yang menjadi pedoman bagi setiap pemegang kebijakan dan seluruh umat manusia baik dalam kehidupan nasional sebagai suatu bangsa dan dalam kehidupan global dalam pergaulan antar bangsa sering kali belum bisa mengatasi secara tuntas permasalahan persamaan hak terhadap semua ras, kelas dan gender. Karena kompleksitas permasalahan yang menyangkut ras, kelas dan gender dalam tulisan ini akan di bahas secara khusus permasalahannya dalam pendidikan yang akan terbagi menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:

A. Gender dan Pendidikan

Pembahasan gender dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam buku ini adalah kasus di Amerika. Anak-anak di Amerika baik laki-laki maupun perempuan mempunyai pengalaman sekolah yang berbeda yang disebabkan oleh sosialisasi aturan-aturan yang berhubungan dengan gender. Sejak lahir anak laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman sosialisasi yang berbeda-beda, dan juga pada waktu mereka masuk sekolah, sebagian besar anak-anak telah mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai identitas jenis kelamin mereka dari orang tua, saudara kandung, TV, sekolah dan media-media sosialisasi yang lainnya. Dalam proses sosialisasi di sekolah guru-guru di sekolah menjadi sumber informasi yang penting dalam perilaku seksual yang sesuai. Mereka belajar perilaku seks orang yang sejenis kelamin yang sama dengan dirinya melalui sanksi-sanksi positif dan negatifnya dan juga melalui buku-buku pelajaran.

Apabila fakta-fakta sosial memerlukan kebenaran implikasi eksternal dari deskripsi aksi sebagai syarat, seperti klaim tentang materi riil atau makhluk spiritual, maka makna-makna agen tidak menjamin realitasnya. Dengan demikian makna-makna ini tidak menghasilkan fakta-fakta sosial. Schutz dan ilmuwan sosial yang berorientasi pada fenomenologi telah memperkenalkan sebuah terminologi yang mengaburkan perbedaan antara implikasi eksternal dan internal dari sebuah makna (Collin, 1997: 127-131).

g. Ruang Lingkup Argumen Fenomenologi

Banyak pakar mendukung versi argumen fenomenologi yang sudah direkonstruksi dan menyimpulkan bahwa; ”fakta-fakta sosial tertentu dimunculkan oleh makna-makna agen. Fakta bahwa konsep sosial mengandung arti eksistensi objektif dari suatu hal, dan kondisi-kondisi subjektif sebuah agen. Itu berarti konsep-konsep tersebut mempunyai implikasi-implikasi eksternal” (Collin, 1991: 131), dijelaskan; fakta sosial yang diwujudkan oleh makna itu sendiri menimbulkan keterbatasan, kebanyakan fenomena sosial terdiri dari berbagai sifat-sifat eksternal dan objektif. Makna mencakup pengakuan bahwa seseorang memiliki status khusus, dan hasil kajian menjelaskan bahwa kecenderungan di antara ilmuwan sosial mengabaikan implikasi eksternal itu.

Penjelasan ini, jika dikaitkan dengan aksi sosial yang hendak dikaji yang berkaitan dengan makna dan proses, yang dilihat sebagai realitas subjektif, maka memodifikasi perspektif fenomenologi sebagai suatu pendekatan metodologi, bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep sebagaimana telah disinggung di muka.

h. Kelebihan dan Kelemahan Fenomenologi

Kelebihan perspektif fenomenologi untuk menjelaskan aksi sosial dari realitas subyektif adalah pada satu sisi awalnya fenomenologi sebagai metode penelitian sosial termasuk teori kefilsafatan, teori ini dikembangkan oleh Hegel, Husserl, Scheller,

Schutz dan Berger. Pada sisi yang lain dengan kesungguhan Weber dalam mengembangkan teori sosial yang berada di dalam paradigma definisi sosial ini, akhirnya fenomenologi banyak digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial (Gordon, 1991: 438-492).

Dilihat dari sisi filsafat ilmu ada perbedaan mendasar antara pendekatan positivistik dan rasionalistik di satu pihak dengan pendekatan fenomenologi dan realisme metafisik di lain pihak. Menurut Muhadjir (1996) bahwa; Pendekatan positivistik dan rasionalistik, hanya mengakui kebenaran empirik sensual dan empirik logik, artinya hanya mengakui sesuatu sebagai kebenaran bila dapat dibuktikan secara empirik indrawi dan dalam konteks kausalitas dapat dilacak dan dijelaskan. Sedangkan pendekatan fenomenologi dan realisme metafisik mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Akal budi di sini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria lebih tinggi lagi dari sekedar *true or false* (benar atau salah) (Muhadjir, 1996: 83).

Nilai moral yang digunakan pada dua pendekatan yang pertama tegas Muhadjir, terbatas pada nilai moral tunggal yaitu benar atau salah. Sedangkan nilai moral yang digunakan pada pendekatan dua yang kedua mengacu pada nilai moral ganda yang hirarkik. Perspektif fenomenologi itu pada aplikasinya bahwa peneliti dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Perspektif fenomenologi ini juga bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat “makna etika” dalam berteori dan berkonsep.

Uraian ini menjelaskan bahwa kelebihan perspektif fenomenologi akan mampu mengkaji makna aksi sosial dan prosesnya sebagai realitas subjektif, perspektif fenomenologi menghendaki adanya sejumlah interpretasi dari individu sebagai subjek penelitian, dan selanjutnya menghendaki interpretasi terhadap interpretasi-interpretasi itu, sampai bisa masuk ke dalam dunia makna dan dunia konseptual subjek penelitian.

jumlah publik yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan masyarakat kelas menengah yang lebih besar. Menurut Edgar Faure dalam makalah yang berjudul “Pendidikan Dan Hari Depan Umat Manusia” (Sindhunata, 2001: 4) menegaskan bahwa kecepatan perkembangan pendidikan dan pengajaran selalu selaras dengan kecepatan langkah perkembangan ekonomi. Apabila ekonomi berjalan cepat, maka pendidikan pun cenderung mengembangkan pengetahuan guna menyiapkan tenaga-tenaga yang dibutuhkan pada bidang pembangunan ekonomi.

3. Masalah Pemerataan Pendidikan

Konsep “pendidikan untuk semua” mempunyai makna bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban untuk membangun pendidikan nasional yang bermutu. Konsekuensinya adalah pemerataan pendidikan. Kendala-kendala yang dapat menghambat pemerataan pendidikan adalah:

- a. Kendala geografis, artinya banyak pulau-pulau yang sulit dijangkau pendidikan karena faktor komunikasi.
- b. Sarana pendidikan yang terbatas akibat alokasi dana yang sangat minim.
- c. Pemerintah masih mengutamakan pembangunan, sementara pendidikan belum memperoleh porsi yang wajar.
- d. Tidak ada penghargaan terhadap profesi guru, terutama yang menyangkut kesejahteraan.
- e. Perencanaan pendidikan yang sentralistik yang mengabaikan kemampuan dan karakteristik daerah.

(pemuda) sangat terbatas, (2) jumlah pemuda putus sekolah meningkat, bahkan banyak yang tidak pernah sekolah, (3) jumlah pemuda yang bisa membaca sangat rendah, (4) mutu SDM generasi muda sangat buruk.

Permasalahan pokok sehubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan pemuda di pedesaan menurut Anshori (2000) dalam United Nations, adalah (1) pada usia muda mereka sudah menjadi tenaga kerja keluarga/bekerja pada orang lain, (2) waktu musim tanam mereka bekerja melebihi jam kerja normal, (3) umumnya mereka menganggur pada masa panen, (4) untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka wajib mencari upah, (5) mereka menikah pada usia muda, (6) mereka tidak mau berbaur dengan teman sebayanya yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, (7) merasa takut terhadap situasi belajar mengajar yang sifatnya formal, (8) mereka meninggalkan desa untuk menghindari lapangan kerja pertanian, (9) mereka dihadapkan dengan lahan pertanian sempit yang mereka anggap akan membuat mereka tetap miskin.

2. Keterpurukan Perekonomian Masyarakat

Krisis ekonomi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia pendidikan Indonesia. Jumlah masyarakat miskin dan yang hidup di garis kemiskinan meningkat. Akibat langsung terhadap pendidikan adalah jumlah anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan meningkat. Indikator sosialnya adalah meningkatnya anak jalanan dan keluarga jalanan di kota besar.

Apabila keluarga dan pemerintah tidak tanggap terhadap permasalahan ini, maka cepat atau lambat pengaruh lingkungan yang tidak kondusif akan membuat mereka terlibat pada kenakalan remaja, tawuran, narkoba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, terutama pembangunan ekonomi yang berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik.

Menurut Huntington (1995), bahwa tingkat perkembangan ekonomi yang lebih baik berpengaruh positif pada peningkatan

Di samping kelebihan-kelebihan teori fenomenologi tersebut di atas, tentu ada sisi kelemahannya. Waters dalam bukunya yang berjudul; *Modern Sociological Theory* menjelaskan bahwa, di samping dari Weber, asal mula pendekatan fenomenologi ini berasal dari filsafat fenomenologi Husserl, dikatakan bahwa: Fenomenologi Husserl menjauhkan diri dari perhatian pada struktur bahasa yang akrab di dalam filsafat analitis Anglo-Saxon, sebaliknya mengkonsentrasikan pada cara-cara bagaimana manusia menyadari dan menerima realitas. Di dalam fenomenologi, realitas hanya berupa penampilan dan pengalaman hanya dapat memahami realitas melalui indra-indra. Jadi realitas dapat eksis dalam data indera rabaan, oral, visual, audio dan tekstual (Waters, 1994: 31).

Ketika terlibat penelitian demikian, Schutz (1972: 19-24) berusaha menerapkan pandangan Husserl tentang fenomenologi dan pandangan sosiologi tentang Weber. Schutz menerima bahwa Weber berada pada jalur yang benar, tetapi ada beberapa aspek problematik terhadap konsepsinya tentang aksi yang dianggap sebagai perilaku bermakna subjektif yang perlu penyempurnaan:

Pertama, dia menanyakan ide Weber bahwa makna aksi identik dengan motif untuk aksi. Aksi oleh Weber dianggap bersifat habitual dan afektual dan aksi itu bermakna. Mereka bermakna karena mereka memahami rangkaian pengalaman kehidupan manusia, Jadi sebagian besar aksi dan tidak hanya aksi rasional, kenyataannya adalah bermakna.

Kedua, Schutz berargumen menyakinkan bahwa Weber hanya berkata sedikit tentang bagaimana cara-cara kita mengetahui makna yang didukung oleh orang lain. Tentu saja hal itu sangat mungkin disalahartikan oleh orang lain, tetapi fakta sederhana adalah bahwa di sepanjang waktu, orang lain itu tidak mencoba mengekspresikan motif-motif dan niat mereka kepada kita.

Kesimpulan bahwa sementara kita dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan orang lain adalah sangat tidak mungkin, kita akan mengetahui mengapa mereka melakukan hal itu. Makna aksi orang lain dalam pengertian motif tidak tersedia bagi kita (Waters, 1994: 32). Hal

inilah yang mendorong Schutz mengkritik konsep Weber tentang *Verstehen*.

Dan uraian baru tentang fenomenologi yang sedikit filosofis dan banyak aspek sosiologis dari pendukung Schutz diberikan oleh Berger dan Lukman (1967). Mereka memulai dari premis bahwa manusia mengkonstruksi realitas sosial dimana proses-proses subjektif dapat di objektifkan. Dalam klaim fungsionalis, mereka mengatakan bahwa dalam mengkonstruksi masyarakat sekarang ini diperlukan legitimasi dan justifikasi yakni bahwa semua dunia makna yang berbeda dan dilokalisasi ini perlu diciptakan dan diadakan bersama-sama.

Kelemahan lain teori fenomenologi itu telah digunakan untuk menandai suatu “metode filsafat” (Husserl), namun mereka yang telah merujuk diri mereka dengan menamakan kaum fenomenologis, atau yang dianggap oleh kaum lain seperti itu, tidak memiliki bentuk-bentuk prinsip yang utuh, karena itu maka fenomenologi pada awalnya “bukan suatu aliran dan bukan suatu pendekatan metodologis dalam penelitian sosial”. Hanya saja, ketidakjelasan label fenomenologi tidak menurunkan pamornya yang telah diperkenalkan sejak abad 19-an (Merleau Ponty, Zeitlin 1998: 208). Dalam hal ini Ponty masih menganggap perlu memulai lagi mempertanyakan karya utamanya dengan pertanyaan; “apa itu fenomenologi?” Dia menambahkan bahwa tampak aneh apabila pertanyaan ini masih diperdebatkan setelah memakan waktu setengah abad dari karya Husserl yang pertama. Faktanya pertanyaan itu masih belum terjawabkan.

Lebih tegas lagi “pembelaan ketidak-berpihakan” metodologis Scheler merupakan suatu kelemahan perspektif fenomenologi, karena “tidak jelas”, apakah ia tidak berkepentingan dan tidak berpihak atau memisahkan dari dirinya sendiri. Kelemahan yang lain agaknya sosiologi pengetahuannya untuk mengkaji dunia makna dirancang sebagai suatu “instrumen elit penguasa yang bersifat manipulasi”, padahal dunia makna tidak bisa dimanipulasi.

Dari kelemahan tersebut di atas diharapkan terjadi modifikasi perspektif fenomenologi yaitu yang semula fenomenologi lebih dikenal sebagai metode filsafat, teori dan metodologis. Modifikasi yang diharapkan adalah pendekatan fenomenologi yang diasumsikan bahwa

peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya menjadi lebih baik. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Menurut Tobing (1997), ada 3 perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial. Teori modal manusia menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi. Manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding dengan manusia yang berpendidikan rendah. Teori alokasi/persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Teori pertumbuhan kelas/strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial.

Romer, 1992 (dalam Tobing, 1997) menyatakan bahwa modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan ketrampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah salah satu cara di mana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi stok modal manusianya.

D. Tantangan Dunia Pendidikan dalam Persaingan Global

Beberapa tantangan yang menghadang dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah:

1. Heterogenitas Tingkat Pendidikan Masyarakat

Heterogenitas tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dapat dilihat pada masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia. Banyak penduduk yang buta aksara terutama di pedesaan, di samping mayoritas sudah bisa membaca dan menulis bahkan banyak yang sarjana. Penyebabnya adalah (1) kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan berbagai ketrampilan teknik bagi anak-anak

sekolah menyediakan serangkaian proses pengajaran yang mampu membekali para pesertanya dengan perangkat kemampuan yang dibutuhkan oleh lahan pekerjaan di era modern.

1. Pendidikan dan Ekonomi pada Zaman Modern

Pada umumnya, kita melihat bahwa masyarakat kita berbeda dengan kehidupan masa lalunya. Secara tegas perbedaan itu oleh Schoorl (1974) disebut sebagai efek modernisasi. Schoorl menegaskan bahwa modernisasi merupakan upaya pergantian dari penggunaan teknik industri yang bersifat tradisional menjadi cara-cara yang lebih modern.

Dahulu kala peranan pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat yang sederhana hanya cukup apabila sudah membentuk penerusnya menguasai teknik penghidupan tradisional sehingga dengan begitu tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat sudah mampu terpenuhi. Namun hal itu berbeda jauh dengan kondisi baru yang melingkupi masyarakat kompleks. Sebagai bagian dari transisi modernisasi proses divergensi dan konvergensi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tidak bisa dipungkiri. Di sini pendidikan justru menempati urutan pertama dalam mengawal masyarakat menghadapi perubahan-perubahan baru. Bersamaan dengan hal tersebut berkembang pulalah konsep sosial ekonomi masyarakat.

2. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara cermat. Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Bila dibandingkan dengan faktor teknologi, modal manusia sangat berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya menyangkut kuantitas saja tetapi jauh lebih penting adalah dari segi kualitas. Pendidikan memiliki njadi

manusia dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Fenomenologi bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep.

Dari sudut pandang sosiologi, fenomena aksi sosial merupakan aktivitas sosial yang didalamnya terdapat hubungan sosial yang terorganisir dalam beberapa macam sistem, sistem hubungan aksi sosial yang melekat pada kehidupan masyarakat modern-industrial lebih kompleks dibandingkan dengan yang melekat pada masyarakat tradisional-agraris.

i. Fenomenologi Yang di Gunakan dalam Penelitian Sosial

Dari sekian uraian perspektif fenomenologi tersebut di atas, maka fenomenologi yang digunakan dalam penelitian sosial lebih cocok menggunakan pendekatan fenomenologi Berger. Fenomenologi Berger dalam penelitian sosial untuk mengkaji pengetahuan pemahaman tentang pemahaman para aktor aksi sosial terhadap makna *aksi* dan prosesnya sebagai realitas subjektif, dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini termasuk paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan tentang makna aksi sosial yang dimaksud, Berger menyebutnya dengan *first order understanding* (meminta peneliti untuk menanyakan kepada pihak yang diteliti guna mendapatkan penjelasan yang benar), dan *second order understanding* (dalam hal ini peneliti memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai memperoleh suatu makna yang baru) sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain itu penggunaan perspektif ini tidak bisa lepas dari pandangan moralnya, baik taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan. Tidak dapat lepas, bukan berarti keterpaksaan, melainkan adanya makna etika. Perspektif fenomenologi bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi

yang sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat makna etika dalam berteori dan berkonsep.

2. Interaksi Simbolis

Interaksi simbolik (dalam sosiologi pendidikan) juga menunjang dan mewarnai aktivitas akademik riset kualitatif. Sejalan dengan pendekatan fenomenologis, sifat yang paling mendasar bagi pendekatan interaksi simbolis adalah asumsi yang menyatakan bahwa pengalaman manusia itu diperoleh dengan perantara interpretasi atau penafsiran, dan penafsiran menjadi esensial dari interaksi simbolik. Interaksi simbolik juga menjadi paradigma konseptual melebihi dorongan dari dalam, sifat pribadi, motivasi yang tidak disadari, kebetulan, status sosial ekonomi, kewajiban peranan, mekanisme pengawasan masyarakat, atau lingkungan fisik lainnya. Faktor tersebut sebagian adalah konstruk yang digunakan para ilmuwan sosial dalam usahanya untuk memahami dan menjelaskan perilaku. (Lexi J. Moleong, 1994: 11)

Benda (obyek), orang, situasi dan peristiwa atau kejadian tidak memiliki maknanya sendiri. Adanya makna dari berbagai kejadian tersebut karena diberi berdasarkan interpretasi. Interpretasi bukanlah kerja otonom dan juga tidak ditentukan oleh suatu kekuatan khusus manusia ataupun yang lain. Makna yang diberikan orang kepada pengalamannya dan prosesnya menginterpretasi merupakan hal yang esensial dan konstitutif, bukan hal yang kebetulan atau bersifat sekunder terhadap pengalaman itu. Orang berbuat sesuatu selalu diiringi dengan menginterpretasikan, mendefinisikan, bersifat simbolis yang tingkah lakunya hanya dapat dipahami peneliti dengan jalan masuk ke dalam proses mendefinisikan melalui pengobservasian terlibat (*participant observation*). (Mike S. Arifin 1994: 47).

Interpretasi sangat esensial, interaksi simbolis menjadi paradigma konseptual dari pada dorongan-internal, sifat-kepribadian, motif tidak sadar, kewajiban peran, preskripsi budaya, mekanisme pengendalian sosial, atau lingkungan fisik. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa dari konstruk-konstruk yang direka ilmuwan sosial dalam upaya untuk memahami tingkah laku.

skill daripada menghormati kepemilikan ijazah. Inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan nonformal, yang lebih bisa memberikan ketrampilan praktis pragmatis bagi kebutuhan dunia kerja yang tentunya berpengaruh pada pencapaian status seorang.

Dalam perspektif lain, dari sisi intelektualitas, memang orang-orang berpendidikan lebih tinggi derajat sosialnya dalam masyarakat dan biasanya ini lebih terfokus pada jenjang hasil keluaran pendidikan formal. Makin tinggi sekolahnya makin tinggi tingkat penguasaan ilmunya sehingga dipandang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat.

C. Kontribusi Pendidikan terhadap Kesuksesan Ekonomi

Setiap masyarakat di seluruh dunia senantiasa menghendaki kesejahteraan. Keyakinan umum bahwa seseorang yang mempunyai bekal pendidikan formal akan cenderung menuai sukses ekonomi merupakan suatu contoh pengaruh pranata pendidikan terhadap aktivitas ekonomi suatu masyarakat.

Munculnya asumsi sosial bahwa pendidikan mempengaruhi kesuksesan ekonomi seseorang bukanlah suatu keyakinan spontan yang tidak berdasar. Berangkat dari sebuah trend sosial masyarakat di Indonesia, misalnya pada masa Orde Baru, sebagian besar pekerjaan membutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan formal. Hampir mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal mampu terserap di lahan-lahan pekerjaan. Situasi tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pemerintah terhadap tenaga terdidik untuk mengoperasikan skill dan keahliannya dalam rangka industrialisasi dan modernisasi pembangunan negara.

Selain itu, keyakinan umum tersebut juga bukanlah hal yang baru. Puluhan tahun yang lalu pemerintahan kolonial Belanda berhasil membentuk pola pikir masyarakat kita tentang pendidikan dengan kesuksesan ekonomi. Lembaga pendidikan tepatnya sekolah dianggap sebagai tangga strategis untuk meraih kemapanan hidup.

Argumen lain yang melandasi kepercayaan umum bahwa melalui sekolah atau pendidikan formal, para individu dapat mencapai tingkat keberhasilan ekonomi dengan cepat karena dalam lembaga

menghilangkan ketidakadilan sosial, akan tetapi ia memperlemah efeknya.

Masyarakat modern adalah masyarakat yang kompleks, di mana keragaman jenis pekerjaan yang berbeda-beda kepentingannya membawa penghasilan yang tidak sama serta kondisi kerja yang tidak sama pula. Menurut Duverger, peningkatan umum dalam standar hidup, peningkatan dalam kemakmuran material, pengembangan waktu senggang dan fasilitasnya, merupakan ciri khas ekonomi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi.

1. Determinasi Mobilitas Sosial

Zaman dahulu seseorang mendapat status tinggi dalam sistem stratifikasi dalam masyarakatnya karena faktor keturunan dan inipun akan berlangsung selama seumur hidup tanpa ada kompetisi untuk menggapai status tertentu. Pada masyarakat modern, kesempatan-kesempatan untuk berkompetisi meraih status pada kelas-kelas atas sangat terbuka sekali. Dalam masyarakat seperti ini yang lebih dihargai pada diri seseorang adalah prestasi, kecakapan, keahlian dan faktor determinan utama, yakni struktur sosial yang menentukan jumlah relatif kedudukan tinggi yang terdistribusikan dan kemudahan untuk memperolehnya.

Dalam masyarakat juga terdapat saluran-saluran tertentu bagi mobilitas sosial, melalui saluran-saluran ini status seseorang warga bisa bergerak naik dari lapisan yang rendah ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Saluran mobilitas sosial ini antara lain organisasi pemerintahan, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan.

2. Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas

Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Dari tiga jenis pendidikan yang tersedia yakni pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, tampaknya dua dari jenis yang terakhir lebih bisa diandalkan. Pada pendidikan formal dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijazah tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi seiring dengan perkembangan, mereka lebih mempercayai kemampuan atau

Bagian penting dari teori interaksi simbolik adalah konstruksi tentang “diri pribadi” (*self*). Diri tidak dipandang terletak di dalam individu seperti ego atau kebutuhan, motif, norma internalisasi dan nilai. Diri adalah definisi yang diciptakan orang (melalui interaksi dengan orang lain) mengenai siapa dia itu. Dalam membentuk atau mendefinisikan diri, orang berusaha melihat dirinya sebagaimana orang-orang lain melihat dirinya dengan menafsirkan gerak isyarat dan perbuatan yang ditujukan kepadanya dan dengan jalan menempatkan dirinya pada peranan orang lain. Dengan singkat, kita melihat diri kita sendiri sebagai bagian dari orang lain melihat kita. Jadi, diri sendiri juga merupakan konstruksi sosial, merupakan hasil dari mempersepsi diri sendiri dan kemudian menyusun definisi melalui proses interaksi. Cara mengkonseptualisasikan diri ini menimbulkan studi-studi tentang *self-fulfilling prophecy* dan memberikan latar belakang bagi apa yang disebut pendekatan terlabel (*labeling approach*) terhadap perilaku menunjang.

Menurut Noeng Muhadjir (1989: 54) bahwa konsep interaksi simbolik bertolak dari tujuh proposisi dasar, yaitu ;

- a. Bahwa perilaku manusia itu mempunyai makna di balik yang menggejala, sehingga diperlukan metoda untuk mengungkap perilaku yang terselubung.
- b. Pemaknaan kemanusiaan manusia perlu dicari sumbernya pada interaksi sosial manusia. Manusia membangun lingkungannya, manusia membangun dunianya, dan kesemuanya dibangun berdasarkan simpasi, dengan bentuk tertinggi mencintai sesama manusia (*Menschenliebe*) dan mencintai Tuhan (*Gottesliebe*).
- c. Bahwa masyarakat manusia itu merupakan proses yang berkembang holistik, tidak terpisahkan, tidak linier, dan tidak terduga.
- d. Perilaku manusia itu berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologik, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan dan tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik atau otomatis, perilaku manusia bertujuan dan tidak terduga.
- e. Konsep mental manusia itu berkembang dialektik, mengakui

adanya tesis, antitesis, dan sistesis; sifatnya idealistik bukan materialistik.

- f. Perilaku manusia itu wajar dan konstruktif kreatif, bukan elementer-reaktif.
- g. Perlu digunakan metoda introspeksi simpatetik; menekankan pendekatan intuitif untuk menangkap makna (Muhadjir, 1989).

Dari perspektif interaksi simbolik semua organisasi sosial terdiri dari para pelaku yang mengembangkan definisi tentang suatu situasi atau perspektif lewat proses interpretasi dan mereka bertindak dalam makna definisi tersebut. Orang bisa bertindak laku di dalam kerangka kerja organisasi. Tetapi yang menentukan aksinya adalah interpretasi, bukan organisasinya. Peran sosial, norma-norma, nilai, dan tujuan, mungkin meletakkan kondisi dan konsekuensi bagi suatu aksi, namun tidaklah demikian apa yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya suatu Universitas mungkin memiliki suatu sistem penilaian, jadwal kuliah, kurikulum, dan bahkan suatu motto resmi yang semuanya memberi arti bahwa Universitas tersebut sebagai tempat belajar dan pendidikan sarjana. Tentu saja simbol-simbol tersebut akan bisa mempengaruhi bagaimana orang merumuskan apa yang mereka lakukan. Namun orang akan berperilaku berdasarkan makna organisasi baginya, dan bukan pada apa yang dipikirkan oleh para pejabat atas mengenai makan yang seharusnya. Beberapa mahasiswa memberi arti Universitas tersebut sebagai tempat untuk mendapat modal ketrampilan bekerja, atau mungkin sekedar sebagai tempat untuk mendapatkan pasangan hidup. Bagi kebanyakan yang lain mungkin ia merupakan tempat untuk mendapatkan nilai yang tinggi untuk memenuhi standar bagi wisuda sarjana (Bogdan & Taylor, 1975. dalam H.B. Sutopo, 1999: 31-32).

Contoh praktis yang diberikan Bogdan dan Biklen adalah tentang “makan”, yang tidak hanya ditafsiri sebagai dorongan untuk makan, tetapi juga ada definisi budaya tertentu mengenai bagaimana, apa, dan kapan orang harus makan. Lebih jauh, “makan” dapat dihubungkan dengan situasi khusus di mana orang itu berada, didefinisikan dalam berbagai cara, proses, perilaku, waktu, dan situasi yang berlainan. Contoh lain mungkin dapat dilihat ketika seorang santri bersalaman dengan kyainya, disertai “mencium tangan” kyai. Interaksi

tetapi menjadi kondisi apapun yang dampaknya dapat menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai manusia.

2. Pendidikan dan Pembaharuan Masyarakat

Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan yang besar sekali akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru. Sekolah tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat tempat ia berada dan dari kontrol pihak yang berkuasa. Sekolah hanya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan tak mungkin mendahuluinya. Jadi tidak ada harapan sekolah dapat membangun masyarakat baru lepas dari proses perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat itu.

Dalam dunia yang dinamis ini tanpa terkecuali setiap masyarakat akan mengalami perubahan menuju pembaharuan. Tiap pemerintah akan berusaha mengadakan perubahan yang diinginkan demi kesejahteraan rakyatnya dan keselamatan bangsa dan negaranya. Dalam hal ini diusahakan adanya keseimbangan antara dinamika dengan stabilitas. Perubahan-perubahan itu antara lain perubahan dan pembaharuan kurikulum dan sistem pendidikan.

B. Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya (Horton dan Hurt, 1999). Masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup. Apabila kita berbicara menyangkut mobilitas sosial, biasanya kita berfikir tentang perpindahan dari suatu tingkat yang rendah ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Mobilitas juga bisa ditelaah dari segi gerak “intra generasi”, yakni kita bisa mengukur sejauh mana individu yang sama mengalami perubahan sosial dalam masa hidupnya sendiri. Dalam masyarakat yang struktur sosial dan politiknya menciptakan kemungkinan mobilitas sosial yang tidak sehat akan lebih memperparah konsekuensi negatif atas proses dinamika sosial dan bahkan bisa menimbulkan sebuah antagonisme sosial yang tinggi antar kelompok. Kemajuan teknologi memang tidak

juga dengan mudah menuruti subjektivitas perasaannya untuk menuruti kelompok-kelompok siswa yang menyenangkan perasaannya. Sekali lagi jika hal terakhir yang terjadi maka kecemburuan sosial malah menjadi iklim pergulatan sosial di lingkungan kelas.

Patut ditambahkan, analisis sosiologis juga mengungkapkan betapa eratnya antara tingkah laku dan sikap-sikap seseorang dengan latar belakang kelompok aspirasi yang digandrunginya. Kelompok-kelompok atau aspirasi-aspirasi acuan merupakan tempat berlabuh yang harus diperhitungkan di dalam upaya pembinaan tingkah laku siswa. Konsekuensi pentingnya dari hasil analisis di atas, dapat memberikan wawasan sosiologi kelas kepada pengajar agar proses pendidikan dan pembinaan siswa lebih efektif (Faisal dan Yasik, 1985 : 76).

1. Perubahan Sosial dan Pendidikan

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dulu. Namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepat. Hal ini membingungkan manusia yang menghadapinya. Telah menjadi hukum alam bahwa masyarakat memiliki perbedaan dalam adopsi setiap perubahan ataupun inovasi baru. Unsur-unsur yang dapat dijadikan referensi oleh seseorang terhadap proses adopsi perubahan itu antara lain adalah (1) orang tua, (2) pemuka masyarakat baik formal/non-formal, (3) teman dekat, (4) figur idola, (5) orang yang paling berpengaruh terhadap seseorang.

Sementara kalau kita sadari perubahan budaya manusia melekat dengan perubahan alam dan jaman. Pada era teknologi suatu masyarakat akan ketinggalan apabila masyarakat itu tidak menerapkan teknologi dalam kehidupan mereka. Bahkan teknologi telah terbukti membawa tingkat efisiensi dan kemakmuran masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensi hidup masyarakat tidak dapat terhindar dari penguasaan teknologi, maka unsur kreatifitas, unsur kemandirian dalam kebersamaan, unsur produktivitas, menjadi faktor yang sangat penting untuk menanggapi budaya hidup teknologis itu. Berarti pendidikan yang menghasilkan manusia-manusia kreatif menjadi tuntutan dalam pola pendidikan umum, maka konsep pendidikan perlu mengalami pergeseran, pendidikan bukan lagi sebagai usaha yang sengaja lagi akan

dengan simbol “mencium tangan” hampir sama dengan contoh “makan” menurut Bogdan dan Biklen.

3. Kebudayaan

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Mike S. Arifin, (1994: 46-48) dijelaskan bahwa kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan studi antropologi adalah konsep tentang kebudayaan (*the concept of culture*). Usaha untuk mendeskripsikan budaya atau aspek-aspek budaya disebut etnografi (*ethnography*). Budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman yang menghasilkan perilaku (Spradly, 1980 dalam HP. Sutopo 1999: 33). Perilaku selalu didasarkan pada makna sebagai hasil persepsi terhadap kehidupan para pelakunya. Apa yang dilakukan, dan mengapa orang melakukan berbagai hal selalu didasarkan pada definisi menurut pendapatnya sendiri yang dipengaruhi secara kuat oleh latar belakang budayanya yang khusus. Budaya yang berbeda, melatih orang secara berbeda pula di dalam menangkap makna persepsi (Knobler, 1971), karena kebudayaan merupakan cara khusus membentuk pikiran dan pandangan manusia (Cohen, 1971), Kondisi kehidupan budaya seseorang sangat mempengaruhi persepsi penciptaan makna pada setiap peristiwa sosial, yang dalam setiap kehidupan sosial selalu melibatkan hubungan antar subjektif dan pembentukan makna. (Van Maanen, et.,al., 1982).

Beberapa antropolog mendefinisikan kebudayaan sebagai “pengetahuan perolehan yang digunakan orang untuk menafsirkan pengalaman dan membuahkan tingkah laku” (*Spradley* dikutip Bogdan dan Biklen, 1982). Dalam pengertian ini, kebudayaan merangkum apa yang dilakukan orang, dan barang-barang yang dibuat dan dipergunakan orang. Untuk mendeskripsikan kebudayaan dari perspektif ini seorang peneliti mungkin berpikir tentang peristiwa dan kemudian menjelaskan peristiwa itu (menjelaskan tingkah laku orang dengan jalan mendiskripsikan apa yang dialaminya).

Peneliti etnografi agar dapat mencapai tujuan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Peneliti dituntut memiliki pengetahuan dan dedikasi yang tinggi, sebab etnografi diperlukan pengamatan, interaksi dengan responden atau anggota komunitas tertentu dalam waktu yang relatif lama
- b. Etnografi umumnya tidak tertarik dengan generalisasi seperti pada penelitian psikometrik, tetapi lebih tertarik untuk memotret kondisi apa adanya.
- c. Fokus etnografi adalah situasi nyata dan *setting* secara alami di mana orang beraktivitas dan berhubungan sosial dengan anggota masyarakat lainnya. Fokus etnografi mengidentifikasi dan mendiskripsikan budaya yang dapat dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu pandangan lemah dan pandangan kuat. Pandangan lemah berusaha menelaah hipotesis dan pertanyaan penelitian lainnya, di tes dalam eksperimen formal, sedangkan pandangan kuat umumnya melihat etnografi sebagai paradigma penelitian yang valid dalam kebenaran mereka.
- d. Etnografi menempatkan pada perlunya koleksi dan interpretasi data dari pada hipotesis yang sudah ditetapkan.
- e. Etnografi bergerak dari data dalam mencari hipotesis, bukan hipotesis mencari data.

Dilihat dari aspek bentuk hipotesis yang dibangun peneliti, etnografi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Naturalisti Ecological Hypotheses* (NEH) dan *Qualitativif Phenomenological Hypotheses* (QPH).

Naturalisti Ecological Hypotheses (NEH) menyatakan bahwa konteks dunia perilaku terjadi pada subjek yang diteliti, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku subjek tersebut. Aplikasi NEH tersebut diantaranya adalah mengapa masyarakat Gunung Kidul lebih berhasil dari kegiatan migrasi ke daerah lain, hal ini telah dididik dari kondisi alam di mana tempat dan lingkungan tinggal yang relatif keras sehingga timbul sifat dan kegigihan untuk kerja..

Dalam penelitian *Qualitativif Phenomenological Hypotheses* (QPH) lebih mengkonsentrasikan etnografi dibanding dengan psikometrik, karena para peneliti lebih percaya bahwa perilaku manusia tidak dapat dimengerti dengan lebih baik tanpa meleburkan diri bersama

B A B IV PROSES SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Kelas sebagai Sistem Sosial

Pada dasarnya, proses pendidikan yang sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Berkaitan dengan fungsi sekolah maka kelas merupakan kepanjangan dari proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Proses interaksi di kelas secara khusus berusaha untuk memantapkan penanaman nilai-nilai dari masyarakat. Flanders (1967) memperkuat studi tentang interaksi di kelas, menurutnya semakin besar ketergantungan murid kepada guru, semakin kurang siswa tersebut mengembangkan strategi-strategi belajarnya sendiri. Menurut Waller, pendidikan merupakan seni menanamkan definisi-definisi situasi yang berlaku pada kaum muda dan sudah diterima oleh golongan penyelenggara. Dengan demikian sekolah merupakan satu alat ampuh untuk melakukan kontrol sosial. Inti dari studi tersebut mencoba menerangkan tentang fungsi sekolah yang mempengaruhi alam kesadaran para siswa untuk selalu konsekuen mengamalkan kriteria-kriteria penafsiran nilai yang ditekankan sekolah. (Robinson, 1981: 127-135).

Sebagai sistem sosial tentunya di dalam kelas telah terbentuk konfigurasi sosial di dunia pergaulan siswa. Dari sini tampak konsep *diferensiasi* mengacu pada praktik organisasi penentuan penghuni kelas berdasarkan prestasi-prestasi siswa. Tentunya implikasi dari pengelompokan ini akan berakibat terbentuknya *polarisasi* antar kelompok. Baik itu kelompok si bodoh, si kaya, si pandai, dan si pemalu. Apabila guru mengetahui fakta tersebut dan mampu mengelola interaksi antarkelompok maka proses penangkapan pengetahuan menjadi semakin dinamis dan cukup kaya. Sebaliknya apabila guru cenderung masa bodoh dengan keadaan demikian justru semakin mempertegas potensi disintegrasi antar siswa. Pada umumnya guru secara gegabah

(*incorporating*) ke dalam pengamatan persepsi subjek serta sistem kepercayaan diri mereka yang terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini antara peneliti dengan responden/informan perlu adanya jalinan kepercayaan dari pihak peneliti yang memerlukan dapat saling memberi dan mengambil informasi yang diperlukan.

4. Etnometodologi

Etnometodologi bukanlah sebagai metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjuk pada mata pelajaran yang akan diteliti, atau materi pokok (*subject matter*). Etnometodologi merupakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana individu mencipta dan memahami kehidupan sehari-harinya. Subjek penelitiannya bukanlah suku bangsa primitif melainkan orang-orang dalam berbagai macam situasi dalam masyarakat kita. Etnometodologi berusaha bagaimana orang-orang mulai melihat, menerangkan, dan menguraikan struktur di dunia kehidupannya sehari-hari atau menguraikan keteraturan dunia tempat mereka hidup.

Penerapan etnometodologi dalam penelitian kualitatif bahwa etnometodologi memiliki kekuatan sebagai pendekatan yang otonom, terutama untuk mengupas berbagai masalah sosial di samping itu pendekatan ini merupakan model penelitian partisipatif yang menempatkan penghampiran induktif sebagai acuan utama. Beberapa prasyarat dapat dikenakan untuk mendudukkan etnometodologi sebagai model penelitian kualitatif, yaitu:

1. Etnometodologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada realitas yang memiliki penafsiran praktis, atau sebagai pendekatan pada sifat kemanusiaan yang meliputi pemaknaan pada perilaku nyata.
2. Etnometodologi merupakan strategi yang dapat dilakukan melalui analisis wacana (*discourse analysis*). Strategi pengumpulan data yang paling tepat dengan dialog, sumber data dapat diperoleh melalui observasi partisipan dengan pencatatan data yang teratur yang disebut *field note* atau catatan lapangan.

3. Etnometodologi memiliki keunggulan dalam menghadapi kehidupan empirik, sebab pengambilan datanya langsung dari lapangan melalui model interaksi antar periset dan aktor sosial.
4. Dalam hubungan dengan peningkatan eksistensi studi sosiologi, etnometodologi menitik-beratkan pada pemahaman diri dan pengalaman hidup sehari-hari, pengambilan data melalui *in-depth interview* akan menggali semua masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk wacana percakapan terbuka.
5. Etnometodologi tidak diartikan sebagai metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjuk pada materi pokok (*subject matter*) yang akan diteliti.
6. Ketika Harold Garfinkel mempelajari arsip silang budaya di Yale, ditemukan kata *ethnobotany*, *ethnophysic*, *ethnomusic*, dan *ethnoastronomy*. Istilah-istilah seperti ini mempunyai arti bagaimana para warga suatu kelompok tertentu (biasanya kelompok suku yang terdapat dalam arsip Yale) memahami, menggunakan, dan menata segi-segi lingkungan mereka; dalam hal etnobotani, subyek atau pokok kajiannya adalah tanaman.
7. Terkait dengan uraian (6) etnometodologi berarti studi tentang bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari.
8. Subjek bagi etnometodologi bukan warga suku-suku primitif; mereka orang-orang dari berbagai situasi di dalam masyarakat kita sendiri.
9. Para ahli etnometodologi berupaya memahami bagaimana cara orang memandang, menjelaskan, dan mendeskripsikan tatanan di dunia tempat mereka hidup.

Terdapat sejumlah orang dalam bidang pendidikan telah terpengaruh dengan pendekatan ini. Pekerjaan mereka kadang-kadang sukar dipisahkan dari kerja peneliti-peneliti kualitatif lainnya, mereka cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan tentang isu yang bersifat mikro, dengan pengungkapan dan kosa kata khusus, dan dengan tindakan yang mendetail dan dengan pemahaman. Peneliti-peneliti

memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi ini meliputi:

- a. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya.
- b. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi.
- c. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
- d. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi.
- e. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dengan kompetensi ini guru diharapkan dapat:

- a. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat.
- b. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat.
- c. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. (Sumar, 2007 : 5-8).

1. Kompetensi Paedagogik

Kompetensi paedagogik yaitu kemampuan pengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci kompetensi paedagogik meliputi:

- a. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual.
- b. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya.
- c. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
- d. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
- e. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik.
- f. Mengembangkan kurikulum yang mendorong ketertiban peserta didik dalam pembelajaran.
- g. Merancang pembelajaran yang mendidik.
- h. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik.
- i. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi ini meliputi;

- a. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Mengevaluasi kinerja sendiri.
- d. Mengembangkan diri secara berkelanjutan.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang

yang menggunakan cara ini menggunakan ungkapan seperti “pemahaman akal sehat (*common sense understanding*)”, “kehidupan sehari-hari (*everyday life*)”, “pencapaian kerja praktis (*practical accomplishments*)”, “landasan rutin untuk tindakan sosial (*routine grounds for social action*)”, dan “memperhitungkan (*accounts*)”. Menurut para etno-metodolog, telah berhasil membuat peneliti menjadi peka terhadap isu, yaitu bahwa penelitian itu sendiri bukanlah merupakan usaha ilmiah yang unik, melainkan lebih dapat dipelajari sebagai “suatu penyelesaian praktis (*practical accomplishments*)”. Mereka menyarankan agar kita berhati-hati dalam memandang pemahaman akal sehat sebagai dasar pengumpulan data. Mereka mendorong para peneliti yang menggunakan cara kualitatif agar peka terhadap keperluan untuk “mengurung batas (*bracket*)” atau menunda sementara asumsi akal sehat mereka, pandangan dunianya sendiri, daripada menganggapnya sebagai hal yang sudah semestinya.

mengandung konsekuensi bahwa guru harus berani merubah dan menyempurnakan diri dan berani meneliti kekurangan dalam segala aspek keguruan serta bersedia menyempurnakan perubahan yang berarti dalam segala aspek pendidikan.

Untuk memenuhi amanah dan tuntutan dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, dewasa ini diisyaratkan bagi setiap guru untuk memiliki kompetensi sebagai guru yang profesional. Meclayland dalam *Theory of competencies* menyebut *time consciousness* (kesadaran penting waktu) sebagai kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh setiap guru yang efektif. Pada dimensi lain gagasan Norman Dodi mengenai *Taxonomy for Teachers Competencies* adalah Kompetensi guru untuk: (1) *Assessing and evaluating student behavior* (2) *Planning Instruction* (3) *Conducting or implementing instruction* (4) *Performing administrative duties* (5) *Communicating* (6) *Developing personal skills* (7) *Developing pupil self*.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pada tahun 2005 pemerintah dan DPR RI telah mensyahkan UU. RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menuntut penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan guru agar guru menjadi profesional. Di satu pihak, pekerjaan sebagai guru akan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi, tetapi di pihak lain pengakuan tersebut mengharuskan guru memenuhi sejumlah persyaratan agar mencapai standar minimal seorang profesional. Pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional akan diberikan manakala guru telah memiliki antara lain kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan (Pasal 8). Kualifikasi akademik tersebut harus “diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat” (Pasal 9). Sertifikat pendidik diperoleh guru setelah mengikuti pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (1)). Adapun jenis-jenis kompetensi yang dimaksud pada Undang-undang tersebut meliputi “kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesi (Pasal 10 ayat (1)). Berdasarkan hasil pertemuan Asosiasi LPTK Indonesia penjabaran tentang jenis-jenis kompetensi tersebut sebagai berikut.

mereka tidak mengubah cara pembelajaran untuk para siswanya. Hal ini sangat dimungkinkan karena dalam kegiatan training tersebut tidak diberikan contoh kongkret cara pembelajarannya di kelas nyata.

Bergantinya sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi pendidikan menurut Sukirman (2006: 2) seperti saat ini tidak akan serta merta mengubah pola pikir guru yang semula sebagai pelaksana pengajaran langsung menjadi pemrakarsa pembelajaran, seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi beragamnya kualitas dan profesionalitas guru, dari guru yang bermotivasi peribadahan hingga karena keterpaksaan, dari guru yang selalu menggerutu hingga yang senantiasa tawakkal. Untuk itu perlu tersedianya pendukung yang memadai dan proses yang panjang dalam program pendidikan dan pembinaan guru. Perlu adanya gerakan dari bawah, dari para guru untuk mengidentifikasi kebutuhan dirinya dalam meningkatkan kompetensinya, agar dapat mengembangkan mutu pembelajaran pada siswanya.

B. Kompetensi Guru

W. Robert Housto dalam Tjipto Subadi (1990: 56) berpendapat “*Competence ordinarily is adequate for at ask or as possession of required knowledge, skill and abilities*”. Kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dalam pengertian ini kompetensi lebih dititik beratkan pada tugas guru dalam pembelajaran. Seorang guru yang profesional dan progresif harus mengetahui dengan pasti kompetensi apa yang dituntut oleh masyarakat dewasa ini bagi dirinya. Setelah diketahui dapat dijadikan pedoman untuk meneliti apakah dirinya sebagai guru dalam menjalankan tugasnya telah dapat memenuhi kompetensi tersebut. Bila belum, maka guru yang baik harus berani mengakui kekurangannya dan berusaha untuk mencapainya. Dengan demikian guru tersebut selalu berusaha mengembangkan dirinya.

Kesadaran akan kompetensi guru juga menuntut tanggung jawab yang berat bagi pribadi guru. Ia harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun lingkungannya, sebab yang demikian akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Pernyataan tersebut

B A B III PERMASALAHAN PENDIDIKAN

A. Permasalahan Kualitas Pendidikan

1. Permasalahan Nasional

Kualitas pendidikan di Indonesia “sangat memprihatinkan” Data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*) yaitu di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 120 (1996), ke 105 (1998), dan ke 109 (1999). Menurut *Survey Political and Economic Risk Consultant* kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2002), Indonesia memiliki daya saing rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke 37 dari 57 negara yang di survei di dunia.

Balitbang (2003) mencatat bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP), dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP). Khusus kualitas guru (2002-2003) data guru yang layak mengajar, untuk SD hanya 21,07 % (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12 % (negeri) dan 60,09 % (swasta), untuk SMA 65,29 % (negeri) dan 64, 73 % (swasta), serta untuk SMK 55,49% (negeri) dan 58,26 % (swasta).

Data *Trends in Mathematic and Science Study 2003/2004* mencatat bahwa siswa Indonesia (SD) hanya berada di rangking ke 35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di rangking 37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam skala Internasional menurut Bank Dunia, *Study IFA* di Asia Timur menunjukkan ketrampilan

membaca siswa kelas IV SD Indonesia berada pada tingkat rendah apabila dibandingkan dengan Negara lain yaitu Hongkong 75,5%, Singapura 74 %, Tailand 65,1 %, sedangkan Indonesia berada pada posisi 51,7 %.

Data-data tersebut di atas maknanya terdapat masalah dalam sistem pendidikan Indonesia, pertama; masalah mendasar yakni kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan, kedua; masalah-masalah lain, yaitu berbagai problem yang berkaitan dengan aspek praktis/teknis penyelenggaraan pendidikan misalnya; biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru dan sebagainya.

2. Kondisi Pendidikan Di Jawa Tengah

Pada tahun 2002 untuk tingkat SD. MI, Angka Partisipasi Kasar (AKP) mencapai 107,88 %, Angka Transisi (AT) sebesar 88,01% dan angka Drop Out (DO) sebesar 0,23 % atau sebanyak 9.488 murid. Sedangkan pada tingkat SLTP/MTs AKP sebesar 81,73 % sementara AT sebesar 51,24 % dan DO sebesar 0,82 % atau sebanyak 9.533 murid. Pada tingkat SLTA/MA AKP sebesar 41,76 % dan DO sebesar 0,80 % atau sebanyak 5.867 murid. (Repetada Propinsi Jawa Tengah, 2004: 119-120). Partisipasi lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) relatif rendah, karena berbagai faktor; diantaranya kondisi sosial dan ekonomi keluarga dan terbatasnya daya tampung PT.

Di samping itu, masih relatif tingginya penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas tercatat 792.418 orang dan untuk usia Wajar (Wajib Belajar) 7-15 tahun yang tidak sekolah sebanyak 162.491 anak. Pada sisi lain, perhatian dan keinginan masyarakat/swasta (dunia usaha dan industri) terhadap penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) masih sangat rendah, hal ini karena keterbatasan penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana.

Kualitas dan relevansi pendidikan yang belum sesuai sangat berkaitan dengan input-output proses pembelajaran tampak pada pencapaian ratio hasil ujian akhir, penerapan kurikulum yang padat, terbatasnya penyediaan prasarana/sarana pendidikan, rendahnya mutu,

kesejahteraan dan kekurangan tenaga kependidikan serta terjadinya kurang relevansi (*miss match*) antara tamatan pendidikan dengan kualitas/standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha/industri

Manajemen dan kemandirian sekolah juga masih lemah karena belum optimalnya keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, sehingga pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah yang telah dirintis sejak tahun 1999/2000 masih perlu mendapatkan fasilitasi dan pendampingan di dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan sekolah. Kondisi demikian menggambarkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan belum optimal disebabkan keterbatasan dana serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pembangunan bidang pendidikan perlu dioptimalkan kembali sehingga terbentuk SDM yang bermutu baik melalui jalur sekolah maupun pendidikan luar sekolah yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar pasar kerja global.

3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Dalam era sentralisasi pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dari segi pendidik (guru) biasanya dilakukan dengan kegiatan *in service teacher training* yang berupa penyertaan, pelatihan, penataran, seminar atau lokakarya, atau kegiatan-kegiatan lain yang sejenis. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, diharapkan guru dapat menerapkan hasil training tersebut dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan-kegiatan tersebut pasti ada sumbangan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tetapi, kebanyakan setelah kegiatan *in service teacher training*, hasil monitoring yang mempersoalkan apakah ada peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh para peserta tidak tampak nyata hasilnya.

Pada dasarnya, hakikat pelaksanaan kegiatan *in service teacher training* selain meningkatkan kualitas guru, yang lebih penting adalah guru peserta *in service teacher training* mampu menerapkan hasil training dalam proses pembelajaran di kelasnya dan mengimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolahnya atau di kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Namun masih banyak guru setelah mengikuti kegiatan *in service teacher training*,